LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2017

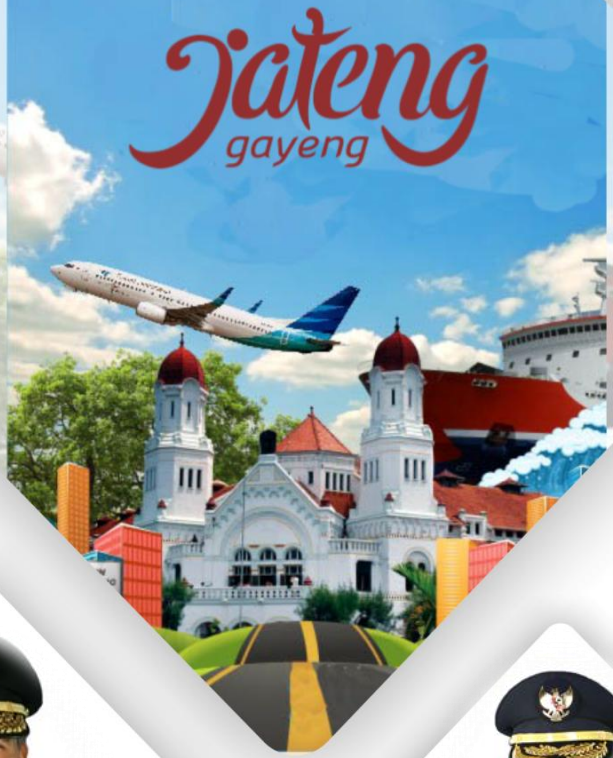

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan dan kesejahteraan dan keadilan di segala bidang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selanjutnya penyusunan LKjIP sebagai salah satu komponen SAKIP, bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja pejabat publik atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Berbekal semangat dan kerja keras serta niat luhur untuk mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 (tahun keempat periode kepemimpinan) telah berhasil mewujudkan capaian kinerja sasaran strategis pembangunan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKj IP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan, agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Semarang, Maret 2018

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT
Jl. PEMUDA 127-133 TELP. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351
SEMARANG 50132
Email: inspektorat@jatengprov.go.id, Web: inspektorat.jatengprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, Maret 2018

Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

SISWOLAKSONO, SH, M.Kn
Pembina Utama Madya
NIP. 19581009 198503 1 013

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		ix
DAFTAR GRAFIK		xi
BAB I :	**PENDAHULUAN**	1
	A Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	1
	1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	1
	2. Letak dan Kondisi Geografis	1
	3. Topografi	2
	4. Geologi	2
	5. Hidrologi	3
	6. Klimatologi	4
	7. Kondisi Demografi	5
	8. Sumber Daya Aparatur	6
	9. Isu Strategis Daerah	7
	B Kedudukan,Tugas,Wewenang dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	23
	C Maksud dan Tujuan	28
	D Sistematika Penulisan	28
BAB II :	**PERENCANAAN KINERJA**	31
	A Instrumen Guna Mendukung Pengelolaan Kinerja	31
	1.GRMS	32
	2.SIMPEG	32
	3.e-SAKIP	33
	B Rencana Strategis	34
	1.Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah	34
	2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
	3. Indikator Kinerja Utama	39
	4. Strategi dan Arah Kebijakan	41
	C Program Untuk Pencapaian Sasaran	53
	D Rencana Kinerja Tahunan 2017	54
	E Perjanjian Kinerja Tahun 2017	55
BAB III :	**AKUNTABILITAS KINERJA**	56
	A Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja 2017	56
	B Capaian Indikator Kinerja Utama	57
	C Analisis Capaian Kinerja	62
	D Akuntabilitas Anggaran	116
	1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	118

Hal

BAB IV : PENUTUP 130

A Kesimpulan Umum Capaian Kinerja..... 130

B Permasalahan Utama 131

C Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja 135

LAMPIRAN :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
2. Pencapaian Sasaran Strategis
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1	:	Karakteristik Wilayah Jawa Tengah.....	4
Tabel 1.2		Jumlah Penduduk Pertengah Tahun.....	6
Tabel 2.1	:	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Perubahan, 2013 – 2018.....	39
Tabel 2.2	:	Program yang dilaksanakan Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017.....	53
Tabel 3.2	:	Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.....	57
Tabel 3.3	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1.....	62
Tabel 3.4	:	Perkembangan Inflasi Tahun 2016-2017.....	63
Tabel 3.5		Perkembangan IPM Tahun 2015-2016.....	64
Tabel 3.6	:	Perkembangan IPM Kab/Kota Tahun 2015-2016.....	65
Tabel 3.7	:	Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2017.....	66
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.2.....	67
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.3.....	68
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.4.....	70
Tabel 3.11		Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1.....	71
Tabel 3.12	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2.1.....	74
Tabel 3.13	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.3.1.....	75
Tabel 3.14	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.4.1.....	77
Tabel 3.15	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.5.1.....	78
Tabel 3.16	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.1.....	80
Tabel 3.17	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.2.....	81
Tabel 3.18	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.3.....	82
Tabel 3.19	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.4.....	83
Tabel 3.20	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.7.1.....	85
Tabel 3.21	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1.....	87
Tabel 3.22	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.1.....	89
Tabel 3.23	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.2.....	90
Tabel 3.24	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.3.....	91
Tabel 3.25	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.3.1.....	92
Tabel 3.26	:	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1.....	93

Tabel 3.27 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2.1..... 95
Tabel 3.28 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.3.1..... 96
Tabel 3.29 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1..... 97
Tabel 3.30 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1.1..... 99
Tabel 3.31 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1.2..... 101
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2.1..... 103
Tabel 3.33 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2.2..... 104
Tabel 3.34 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.3.1..... 105
Tabel 3.35 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.4.1..... 106
Tabel 3.36 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.5.1..... 108
Tabel 3.37 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.1.1..... 110
Tabel 3.38 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.2.1..... 112
Tabel 3.39 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.3.1..... 113
Tabel 3.40 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.4.1..... 115
Tabel 3.41 : Realisasi Anggaran Daerah 117
Tabel 3.42 : Total Pagu Anggaran Dekonsentrasi 119

DAFTAR GAMBAR

			Hal
Gambar 1.1	:	Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah.....	1
Gambar 1.2		Peta Topografi Jawa Tengah.....	2
Gambar 1.3	:	Peta Daerah Aliran Sungai	4
Gambar 1.4	:	Jumlah Penduduk Kab/Kota.....	5
Gambar 2.1	:	Aplikasi GRMS.....	32
Gambar 2.2	:	Aplikasi SIMPEG.....	32
Gambar 2.3	:	Aplikasi e-SAKIP.....	33
Gambar 2.5	:	Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	36
Gambar 3.1	:	Target dan Realisasi Pelaksanaankegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.....	119
Gambar 3.2	:	Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Opd Provinsi Jawa Tengah.....	120
Gambar 3.3	:	Target Dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Opd Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV....	121
Gambar 2.5	:		

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 1.1	:	PNS Provinsi Jawa Tengah Menurut Golongan.....	7
Grafik 3.1		Perkembangan Pencapaian sasaran 1.1.3.....	69
Grafik 3.2	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 1.1.4.....	70
Grafik 3.3	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 2.1.1.....	72
Grafik 3.4	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 2.2.1.....	74
Grafik 3.5	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 2.3.1.....	76
Grafik 3.7	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 4.1.1.....	94
Grafik 3.8	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 4.1.1.....	95
Grafik 3.9	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 4.4.1.....	97
Grafik 3.10	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 5.1.1.....	98
Grafik 3.11	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 6.1.2.....	101
Grafik 3.12	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 6.2.1.....	103
Grafik 3.13	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 6.2.2.....	104
Grafik 3.14	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 6.5.1.....	109
Grafik 3.15	:	Perkembangan Pencapaian sasaran 7.1.1.....	111

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada 5040' - 8030' Lintang Selatan dan 108030' - 111030' Bujur Timur.

3. Topografi

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan, Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Peta Topografi Jawa Tengah

Sumber : *RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029*

4. Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zone Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial,

planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.
Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (diTemanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara) dan Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus

5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak.Beberapa DAS yang menjadi DAS Prioritas di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 18 DAS Prioritas di Jawa Tengah, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai II – 4 Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 6 (enam) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Banyumas, dan bermuara di Kabupaten Cilacap,

dengan panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 12-25 m, peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Peta Daerah Aliran Sungai

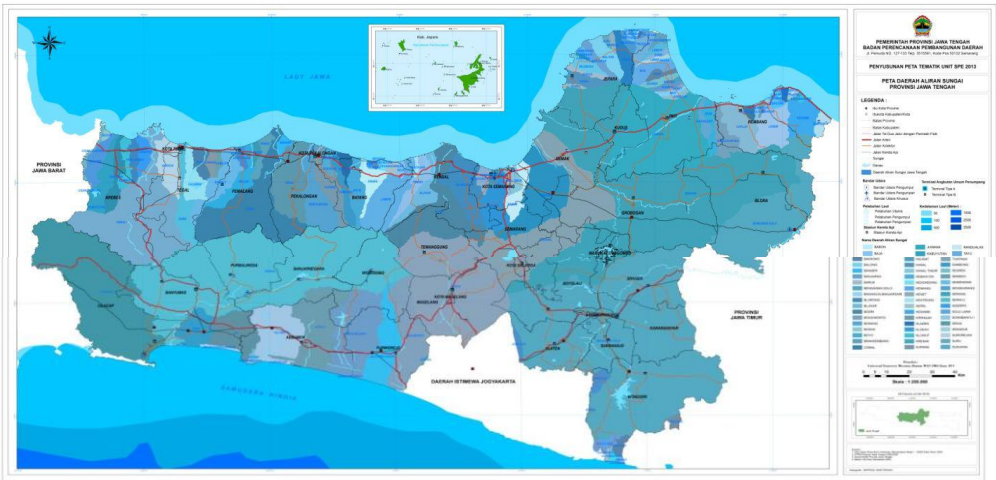

Sumber : ***Badan Informasi Geospasial, 2016***

6. Klimatologi

Iklim di Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Pada tahun 2016, suhu udara di Jawa Tengah berkisar 24,4°C–28,0°C dengan kelembaban udara berada pada kisaran 70% -85%. Curah hujan tertinggi yang tercatat di Stasiun Meteorologi Sempor, Kebumen yaitu sebesar 1.320 mm. Sedangkan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun SMPK, Borobudur Magelang 64 hari.

Tabel 1.1
Karakteristik Wilayah Jawa Tengah, 2016

Letak astronomis	5°40′ – 8°30′ LS 108°30′ – 111°30′ BT
Letak geografis	
• Batas timur	Prov. Jawa Timur
• Batas barat	Prov. Jawa Barat
• Batas utara	Laut Jawa
• Batas selatan	Prov. DI Yogyakarta Samudera Indonesia
Luas Wilayah	32.544,12 km2
Suhu udara	
• Rata-rata	24,4°C– 28,0°C
• Minimum	20°C
• Maksimum	36°C
Kelembaban udara	70% - 85%
Banyaknya hari hujan	82 - 223 hari
Banyaknya curah hujan	1.269 - 3.616 mm

Sumbe r: BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

7. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010–2025 pada tahun 2017 sebanyak 34.257.865 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 16.988.093 jiwa (49,59%) dan perempuan sebanyak 17.269.772 jiwa (50,41%), dengan *sex ratio* sebesar 98,37 Sedangkan jumlah rumah tangga hasil update 2017 BPS sebanyak 9.009.084 dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,72 jiwa. Jumlah Penduduk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana Gambar 1.4

Gambar 1.4
Jumlah Penduduk masing-masing Kab./Kota di Jawa Tengah

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Dilihat dari distribusi penduduk per kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa kabupaten dengan penduduk paling banyak yaitu Kabupaten Brebes sejumlah 1.796.004 jiwa, selanjutnya Kota Semarang 1.757.686 jiwa, dan Kab. Cilacap 1..711.627 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun
Hasil Proyeksi Penduduk, 2015-2020

2015	2016	2017	2018	2019	2020
33 .774 .141	34 019 095	34 257 865	34 490 835	34 718 204	34 940 078

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

8. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, seiring dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah semula 59 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi 48 OPD. Jumlah pegawai yang berstatus PNS semula 16.258 orang pada tahun 2015, menjadi 43.607 orang pada Januari tahun 2018. Dari jumlah tersebut 1,29 persen merupakan PNS golongan I sebanyak 10,71 persen PNS golongan II, 55,38 persen merupakan PNS golongan III dan 32,62 persen PNS golongan IV

Grafik 1.1
PNS di Lingkungan Pemprov. Jateng Menurut Golongan
2018

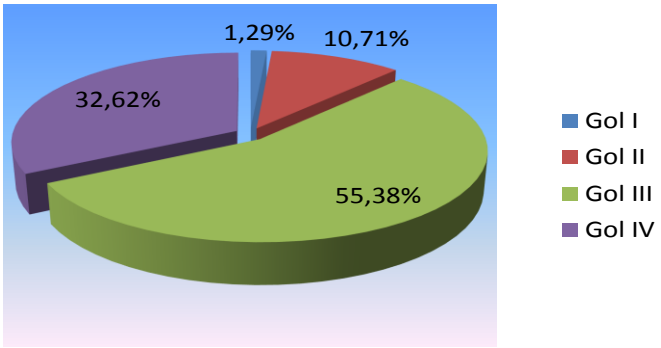

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah Januari 2018

9. ISU STRATEGIS DAERAH

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, pada tahun 2017 masih menghadapi berbagai permasalahan dan

tantangan, yang berpengaruh strategis bagi keberhasilan pembangunan daerah, yakni :

1) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kondisi lingkungan. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada September 2016 mencapai 4,507 juta orang (13,19 persen) naik sekitar 1,11 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang tercatat sebesar 4,506 juta orang (13,32 persen). Meskipun secara absolut meningkat namun secara persentase penduduk miskin turun yaitu sebesar 0,05 persen. untuk menekan persentase penduduk miskin di antaranya melalui bea siswa miskin dan bantuan pembangunan bagi rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, BPJS Kesehatan non kuota masih tersisa 1,6 juta akan diselesaikan oleh kabupaten/kota sebesar 70% dan Pemprov Jateng sebesar 30 %.

2) Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2011-2015 cenderung mengalami penurunan dari 5,93% menjadi 4,99%. Permasalahan pengangguran dapat dilihat dari aspek ketersediaan dan pemanfaatan. Pada aspek ketersediaan antara lain belum sepenuhnya kebijakan pemerintah daerah dan swasta pro tenaga kerja, sarana prasarana dan SDM termasuk instruktur pada Balai Latihan kerja (BLK) belum memadai, penyediaan dan pembinaan pelatihan/kompetensi tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sebagian tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi, keterbatasan penyediaan lapangan kerja/lembaga penyalur kerja, serta pengendalian jumlah penduduk belum. optimal. Kemudian dari aspek pemanfaatan antara lain ditunjukkan belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja, terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pemberian kredit usaha dan ketersediaan berbagai pelatihan kerja, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peluang kerja, rendahnya kemampuan masyarakat memanfaatkan informasi

kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi, serta rendahnya minat masyarakat untuk meningkatkan kompetensi.

Permasalahan lain terkait pengangguran yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu (setengah penganggur), yaitu sebanyak 5,38 juta pada tahun 2014. Terjadi peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, konstruksi dan perdagangan. Penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan konstruksi, menjadikan pengangguran lebih kompleks permasalahannya berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja, karena penerapan sistem kerja *outsourcing* dan informal, yang rentan dengan perubahan kondisi perekonomian.

3) Kesejahteraan Pekerja

Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 16,43 juta orang atau 64,47% dari jumlah penduduk usia kerja sebanyak 25,18 juta orang. Permasalahan kesejahteraan pekerja terkait dengan Upah Minimum, selalu menjadi permasalahan klasik yang mengemuka setiap tahun. Rasio Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jawa Tengah telah meningkat menjadi 100,33% dari target 97,50% pada tahun 2015. Namun demikian masih terjadi permasalahan lain yakni belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja terhadap akses layanan kesehatan dan kepemilikan rumah layak huni, serta belum optimalnya perlindungan tenaga kerja. Kesejahteran pekerja perlu terus diupayakan peningkatannya untuk menghindari terjadinya proses pemiskinan berikutnya, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.

4) Pendidikan

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan aspek

ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan kepastian dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain capaian APM SD/SDLB/MI/Paket A pada tahun 2015 baru mencapai 98,43% dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B mencapai 79,51%, yang masih perlu didorong dalam rangka mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*). Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C baru mencapai 74,01%. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan Angka Pendidikan yang Ditamatkan berdasarkan penduduk usia kerja (15-64 tahun), yang masih didominasi lulusan SD.

Untuk itu, pembangunan pendidikan ke depan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan APK SMA /SMALB/MA/SMK/Paket C dan Rata-rata Lama Sekolah, serta meningkatkan pendidikan non formal sebagai alternatif layanan pendidikan. Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat masih perlunya peningkatan kualitas siswa, pendidik/tenaga kependidikan, serta prasarana sarana pendidikan. Kualitas/mutu lulusan siswa masih perlu ditingkatkan karena Angka Kelulusan baik jenjang dikdas maupun dikmen belum mencapai 100%, sehingga masih terdapat siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang tidak lulus sekolah. Selanjutnya, terkait pendidik/tenaga kependidikan masih dihadapkan pada permasalahan kualifikasi S1/D4 jenjang PAUD (46,66%), SD/SDLB/MI (77,9%), SMP/SMPLB/MTs (91,45%) dan SMA /SMALB /MA/SMK (96,89%), sertifikasi pendidik, serta kesejahteraan khususnya pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, sehingga ke depan perlu peningkatan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menjadi prasyarat kualitas layanan pendidikan di masa yang akan datang. Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi beserta kompetensinya, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal yang penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan

"identitas" sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan budi pekerti dikalangan siswa sekolah. Materi seperti budi pekerti, bahasa, dan kesenian merupakan subyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa.

5) Kesehatan

Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 116,01/100.000 Kelahiran Hidup (tahun 2011) menjadi 111,16/100.000 Kelahiran Hidup (tahun 2015). Masih tingginya AKI tersebut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat, serta kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan pada kehamilan risiko tinggi. Upaya untuk menurunkan AKI menghadapi tantangan yang berat dikarenakan penyebab kematian ibu tidak hanya pada sisi *supply* (*provider*/ penyelenggara pelayanan kesehatan) namun juga pada sisi *demand* (ibu, keluarga), masyarakat maupun lingkungannya.

Selanjutnya berkenaan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) juga masih cukup tinggi, yaitu dari 10,34/1.000 Kelahiran Hidup (tahun 2011) menjadi 10,00/1.000 Kelahiran Hidup (tahun 2015) antara lain disebabkan *asfiksia* (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR), infeksi neonatus, *pneumonia*, diare, dan gizi buruk.Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskemas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Namun masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak antara lain disebabkan belum terpenuhinya prasarana dan sarana, serta belum meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan

optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular seperti penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan, serta keterbatasan prasarana sarana di Puskesmas dan rumah sakit. Masih tingginya kasus DBD dikarenakan kondisi iklim tidak stabil dan tingginya curah hujan sehingga berpotensi pada meningkatnya perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti*, serta belum optimalnya kegiatan PSN. Tingginya kasus HIV/AIDS dimungkinkan karena semakin meningkatnya perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, serta belum optimalnya upaya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS.

Selain itu terdapat kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) seperti kanker, jantung, *diabetes milletus*, gagal ginjal dan lainnya yang disebabkan perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat(kurang aktifitas fisik, konsumi alkohol, kebiasaan merokok, dan diet yang tidak seimbang). Peningkatan kasus PTM akan berakibat meningkatnya pembiayaan kesehatan mengingat PTM merupakan penyakit katastropik (lama dan butuh biaya banyak), sehingga diperlukan upaya deteksi dini faktor risiko PTM.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan dan penyediaan pelayanan rawat inap kelas III khususnya untuk masyarakat miskin (Jamkesmas dan Jamkesda).

6) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan terkait pembangunan bidang sosial adalah belum optimalnya penanganan PMKS dikarenakan peningkatan jumlah PMKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan, serta tingginya jumlah penduduk miskin.

Selain itu akurasi data penanganan PMKS yang masih lemah didukung dengan pelaporan kabupaten/kota yang belum kontinyu, menyebabkan perencanaan dan implementasi program penanganan PMKS sampai saat ini belum optimal.

Balai rehabilitasi sosial merupakan salah satu sistem penanganan PMKS berbasis kelembagaan berdasarkan standar pelayanan. Namun hingga saat ini, belum semua balai rehabilitasi sosial menerapkan standar pelayanan secara optimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta prasarana sarana pendukung pemulihan sosial PMKS.

Terkait dengan upaya penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum simultan dengan penanganan PMKS, dikarenakan belum optimalnya kapasitas PSKS dalam mengimplementasikan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial PMKS.

Disamping itu, belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam penanganan PMKS dan penguatan kapasitas PSKS, antara lain dikarenakan belum sepenuhnya institusi yang menangani permasalahan sosial berjalan efektif, dan masih menginduk pada perangkat daerah dengan tupoksi lainnya.

7) Keadilan Gender dan Perlindungan Anak

Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000, yang pada intinya mengintruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga non kementerian di tingkat pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk mengintegrasikan perspektif gender (aspirasi, pengalaman, masalah dan kebutuhan) perempuan serta laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta program pembangunan.

Dalam kaitan ini perspektif keadilan gender berfungsi sebagai cara pandang untuk semua upaya penguatan kapasitas birokrasi dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, serta diharapkan dapat mendukung birokrasi dalam menjalankan tata kerja dan tupoksinya. Terkait dengan perlindungan anak, telah diterbitkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang mengamanatkan upaya perlindungan anak melalui pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko kerentanan terhadap anak-anak dengan mengurangi angka kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

perlakuan salah terhadap anak, pekerja anak, sekaligus diharapkan dapat memberikan perlindungan anak dari bahaya seksual, pornoaksi dan pornografi, serta penggunaan narkoba.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya. Sementara itu dalam tataran publik, berbagai permasalahan nampak dari masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta belum optimalnya upaya pencegahan dan pengurangan risiko terhadap tindak kekerasan. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami penurunan, yaitu tahun 2014 sebesar 0,009%, menjadi 0,0059% pada tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya kinerja lembaga layanan terpadu kekerasan berbasis gender dan anak serta *trafficking* di kabupaten/kota. Permasalahan lain adalah peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30% perempuan di legislatif masih rendah. Hal ini disebabkan terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi di bidang politik dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif.

Dari sisi perlindungan anak, permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya sistem perlindungan anak utamanya anak rentan (kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak). Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan, penanganan, dan pengurangan risiko terhadap anak-anak yang rentan. Sedangkan penanganan terhadap anak yang berkebutuhan khusus lebih ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

8) Pelestarian Budaya

Budaya Tradisional merupakan elemen penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan, karenanya perlu dilindungi dan dilestarikan. Melalui seni diharapkan mampu meningkatkan dinamika kehidupan, sedangkan melalui budaya diharapkan

dapat memperkuat jati diri sehingga mampu menangkal pengaruh dari luar yang bersifat negatif.

Dalam kontek penvapaian visi menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari –*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*, seni budaya jawa merupakan identitas cita, rasa dan karsa masyarakat jawa yang diekspresikan melalui tutur, sikap, perilaku dan karya yang mengandung nilai-nilai adiluhung.

Nilai-nilai adiluhung mengacu kepada penghargaan yang sangat tinggi terhadap sifat luhur manusia dalam tata kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Di era globalisasi, sangat ironis ketika banyak masyarakat yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Melalui pembelajaran budaya, diharapkan dapat diketahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal ditengah perkembangan zaman.

Permasalahan terkait dengan **Pelestarian Budaya Tradisional** adalah kecenderungan semakin memudarnya nilai adiluhung jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, belum terinternailasikannya ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu *" ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani"* dalam kehidupan sehari-hari, semakin rendahnya intensitas dan kualitas penggunaan bahasa jawa, belum optimalnya upaya untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian jawa, serta kurangnya pembelajaran budaya. Selain itu masih rendahnya upaya untuk melakukan perlindungan situs, bangunan, budaya, benda dan karya seni yang bernilai sejarah tinggi.

9) Ketimpangan Pendapatan Masyarakat dan Antar Wilayah

Indeks Gini merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2011–2015 cenderung meningkat yaitu sebesar 0,34 pada Tahun 2011, menjadi 0,38 pada Tahun 2015, yang artinya kesenjangan pendapatan masyarakat semakin melebar. Indeks tersebut menunjukkan pergeseran kelompok ketimpangan pendapatan masyarakat dari kelompok ketimpangan rendah menjadi ketimpangan sedang. Sementara tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah

di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari Indeks Williamson. Selama kurun waktu tahun 2012–2014, capaian Indeks Williamson Jawa Tengah 0,6272 pada tahun 2014 menjadi 0,6993 pada tahun 2016 Kondisi tersebut mencerminkan bahwa ketimpangan distribusi pembangunan antar wilayah kabupaten/kota semakin mengecil, namun kondisinya masih termasuk kategori ketimpangan tinggi.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, diketahui bahwa masih cukup banyak kabupaten yang berada pada kelompok relatif tertinggal (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di bawah rata-rata) yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Blora, Rembang, Grobogan, Demak, Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Brebes. Oleh karena itu perlu upaya lebih intensif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memprioritaskan pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal tersebut.

10) Energi

Pengembangan energi di Jawa Tengah masih bergantung pada sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Komposisi pemakaian energi sampai dengan tahun 2016 berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah minyak bumi 1,84%, gas bumi 3,92%, batu bara 87,99%, dan Energi Listrik 36,25%. Permasalahan lain adalah pelayanan energi (listrik dan migas) yang masih terbatas dan belum merata, serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Belum optimalnya pelayanan listrik bagi masyarakat terlihat masih adanya 972.236 KK yang belum menikmati listrik, walaupun rasio elektrifikasi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 89,29%, di atas rata-rata rasio elektrifikasi nasional sebesar 84,12%. Hal tersebut terjadi terutama di wilayah pedesaan yang belum terlayani oleh pasokan listrik PLN, sehingga masih perlu upaya pembangunan jaringan listrik pedesaan serta mengembangkan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi.

Pengembangan potensi energi baru terbarukan masih mengalami kendala dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 yang belum mengakomodir peran pemerintah daerah dan adanya jaminan terhadap produsen dalam pengembangan *biofuel*, biaya investasi masih tinggi, potensi berada di daerah terpencil, dan masih adanya subsidi pemerintah (BBM dan listrik). Budaya hemat energi di masyarakat belum sesuai harapan, sehingga masih terjadi kecenderungan pemakaian energi yang boros. Hal tersebut dapat dilihat pada realisasi bahan bakar minyak bersubsidi (premium) tahun 2017 sebesar 613.582.118 Liter. Meskipun sudah dilakukan upaya pengembangan sumber-sumber energi non fosil atau Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH), *solar cell*, biogas, biomassa, dan *biofuel*, namun pemanfaatannya pada tahun 2017 masih sebesar 9,56%, karena belum optimalnya kelembagaan pengelola di masyarakat.

11) Pangan

Jawa Tengah memiliki luasan lahan sawah sebesar 992 ribu hektar (30,47%) dan lahan bukan sawah sebesar 2,26 juta hektar (69,53%). Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan tahun 2016 yaitu padi sebesar 6.714.715 ton, Adapun produksi jagung sebesar 3,21 juta ton atau meningkat 160,87 ribu ton, dan kedelai sebesar 129,79 ribu ton atau meningkat 4,32 ribu ton. Secara umum produksi komoditas pertanian mengalami peningkatan. Namun demikian untuk mewujudkan kedaulatan pangan tetap diperlukan kebijakan dan strategi peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang lebih baik serta sehat sesuai sumber daya lokal. Perwujudan kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan konsep ramah lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan serta memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

12) Iklim Investasi

Pengembangan iklim investasi di Jawa Tengah merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja dan

menurunkan tingkat pengangguran. Iklim investasi di Jawa Tengah semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah ivestor yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah pada tahun 2016 sebanyak 158 investor dengan nilai investasi sebesar 14,28 trilyun atau 427% dari target yang ditetapkan sebesar 37 investor dengan nilai investasi sebesaar 3,525 Trilyun. Permasalahan pengembangan iklim investasi antara lain kurangnya informasi dan promosi investasi (penyediaan *website*, *booklet* dan profil investasi); kepastian dan kemudahan pengurusan perijinan, regulasi dan waktu pengurusan; terbatasnya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi; belum optimalnya dukungan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandar udara dan energi); serta sinergitas pemangku kepentingan terkait.

13) **Koperasi dan UKM**

Koperasi dan UKM dapat berperan sebagai penyangga sekaligus penggerak perekonomian daerah. Jumlah koperasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2015 untuk Koperasi Sehat tercatat sebesar 16,71% dan Koperasi Aktif sebesar 81,69 % sedangkan tahun 2016 persentase koperasi sehat mencapai 18,80% atau meningkat 2,09% dan koperasi aktif mencapai 81,78% atau meningkat sebesar 0,09%.

Permasalahan pengelolaan koperasi dan UKM antara lain rendahnya kualitas SDM dan berdampak pada belum optimalnya kinerja manajemen pengelolaan, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun modern, kualitas produk belum memenuhi standar, lemahnya akses pasar dan jejaring pemasaran, kurangnya informasi perbankan dan akses permodalan, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, serta belum terpadunya upaya pemberdayaan koperasi dan UKM.

14) Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Jawa Tengah mengalami fluktuatif, 421.191 orang pada tahun 2015, dan menjadi 578.924 orang pada tahun 2016 meningkat sebesar 157.733 orang atau (27,24%). Sedangkan untuk wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari 33.030.843 orang pada tahun 2015 menjadi 36.893.120 pada tahun 2016, meningkat sebesar 3.862.277 orang atau 10,47%, Fluktuasi kunjungan wisatawan mancanegara disebabkan oleh kurangnya daya saing obyek wisata daerah, belum optimalnya pengembangan potensi *event* dan kegiatan wisata berbasis wilayah, dan kurangnya promosi wisata Jawa Tengah secara nasional maupun internasional. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya keterkaitan lintas destinasi wisata unggulan (Dieng-Borobudur, Solo-Sangiran, Nusakambangan, Karimunjawa, Tegal-Pekalongan dan Rembang-Blora); masih rendahnya kualitas SDM pelaku wisata; infrastruktur dan prasarana sarana yang mendukung aksesibilitas; dan belum optimalnya kerja sama para pemangku kepentingan dalam mengembangkan wisata di Jawa Tengah.

15) Aset Daerah

Permasalahan pengelolaan aset di Jawa Tengah terutama dalam hal pemanfaatan aset kurang optimal, karena masih belum terselesaikannya kejelasan status tanah, kondisi bangunan dan letak bidang kurang strategis atau kurang kompetitif.

16) Reformasi Birokrasi

- Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi permasalahan, yaitu:Penataan struktur kelembagaan belum dapat dilakukan secara komprehensif, karena belum terbitnya regulasi baru yang mengatur organisasi perangkat daerah;
- Disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik peraturan yang sederajat, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di atasnya atau peraturan pusat dengan daerah;

- Manajemen SDM, peningkatan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur;
- Pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan dinamika masyarakat;
- Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien dan profesional.

17) Politik

Dalam aspek pembangunan politik, masyarakat Jawa Tengah masih perlu didorong untuk menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan demokrasi. Disamping itu peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula masih perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 yang baru mencapai 55,64%; penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 sebesar 71,25%; serta penggunaan hak pilih pada pilkada serentak tahun 2015 sebesar 68,54%. Selain itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik dan penentuan arah pembangunan yang bersifat strategis masih perlu dioptimalkan.

18) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan ketertiban masyarakat memegang peranan penting untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Kondisi wilayah yang aman dan tertib ditandai dengan terwujudnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman berupa kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum berikut bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Terkait dengan upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, masih dijumpai permasalahan yaitu terbatasnya jumlah personil aparat keamanan dibandingkan jumlah penduduk, sehingga masih diperlukan dukungan dan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan kondusivitas daerah.

19) Infrastruktur dan Perhubungan

Permasalahan infrastruktur di Jawa Tengah adalah belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan infrastruktur sebagai berikut :

a. **Infrastruktur Fisik,** terkait dengan pekerjaan umum dan perhubungan antara lain belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah di kabupaten/kota, dan pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo dan Tol Brebes–Semarang; belum optimalnya prasarana sarana transportasi utamanya terkait kondisi kinerja pelayanan, keselamatan transportasi, integrasi antar moda transportasi dan pengembangan sistem transportasi masal; kondisi jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian, utamanya irigasi kewenangan kabupaten/kota; masih luasnya area genangan banjir; meningkatnya luasan rob terutama di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah akibat penurunan muka air tanah, meningkatnya muka air laut, daya dukung dan tampung drainase serta sungai yang sudah tidak memadai; ketersediaan tampungan air baku yang belum merata dan dalam kondisi yang belum optimal sehingga masih terdapat wilayah yang mengalami kekeringan; belum optimalnya akses aman penduduk terhadap air minum dan pelayanan sanitasi layak; pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara terpadu antar wilayah dan belum memperhatikan kesehatan lingkungan; rendahnya pengelolaan jasa konstruksi; serta masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni.

b. **Infrastruktur Non Fisik,** terkait dengan pendidikan, kesehatan dan sosial, antara lain: pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan baik bangunan sekolah, ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung (perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer) yang masih belum optimal dan merata; belum terpenuhinya prasarana dan sarana di Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, serta jumlah dan sebaran Puskesmas yang

masih kurang; belum optimalnya kondisi panti-panti sosial sehingga memerlukan upaya peningkatan; serta belum optimalnya prasarana dan sarana publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

c. **Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)**, antara lain: masih terbatasnya kapasitas *bandwith* internet; kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada *data center*; keterbatasan pengetahuan dan SDM aparatur serta masyarakat terhadap TI dan kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI.

20) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah adalah meningkatnya kerusakan ekosistem teresterial, serta pesisir dan laut, yang ditandai dengan masih tingginya luas lahan kritis, rusaknya *catchment area* yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut baik *mangrove* maupun terumbu karang, meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan akibat kerusakan ekosistem yang cukup tinggi, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan meningkatnya pencemaran lingkungan industri penghasil limbah B3 dan limbah cair B3, serta limbah padat atau *sludge* B3.

21) Penanggulangan Bencana

Jawa Tengah mempunyai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana relatif tinggi, karena letak geografis berada dalam *ring of fire.* Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya upaya-upaya mitigasi bencana dan *early warning system* untuk mengurangan risiko bencana, keterbatasan sumber daya, serta masih rendah dan belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

a. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur

Berdasarkan Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daearah, sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang dan kewajiban pelaksanaan otonomi daerah Gubernur memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut :

a.1 Tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah :

1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5) mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.2 Wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah :

1) mengajukan rancangan Perda;
2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3) menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.3 Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1) mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyeleng garaan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
2) melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3) memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
4) melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
5) melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/kota; dan
6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

a.4 Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1) membatalkan Perda Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali kota;
2) memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3) menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
4) memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten/kota; dan
5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana tersebut di atas, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas sekaligus kewenangan yang harus dilaksanakan , yaitu :

1. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar- Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
4. melantik Bupati/Walikota;
5. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah Provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tentang penataan organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Gubernur, antara lain:

a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Perda tersebut, Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Biro, yaitu :
   1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan :
      - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
      - Biro Hukum;
      - Biro Kesejahteraan Rakyat.
   2) Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, mengkoordinasikan :
      - Biro Perekonomian;
      - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
      - Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
   3) Asisten Administrasi, mengkoordinasikan :
      - Biro Organisasi;
      - Biro Umum

b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 s.d 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. terdiri dari :
   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2) Dinas Kesehatan;
   3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
   4) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
   5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   6) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
   7) Dinas Sosial;
   8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   10) Dinas Ketahanan Pangan;
   11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
   12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   13) Dinas Perhubungan;
   14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
17) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19) Dinas Kelautan dan Perikanan;
20) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
21) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
23) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 s.d 93 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah. terdiri dari :
   1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
   2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
   3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
   4) Badan Kepegawaian Daerah;
   5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
   6) Badan Penghubung.

d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

e) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD), terdiri :
   1) RSUD Dr. Moewardi ;
   2) RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo;
   3) RSUD Tugurejo;
   4) RSUD Kelet .

   RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD), terdiri :
   1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
   2) RSJD Surakarta;
   3) RSJD Dr. RM Soedjarwadi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah, selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan perjanjian kinerja.

Tujuan Penyusunan LKj IP Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017 sebagai alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, identifikasi keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang.
Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang diangap perlu.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka sistem pembangunan nasional, maka seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

1. **Government Resources Management System (GRMS)**

Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

Gambar 2.1. Aplikasi GRMS

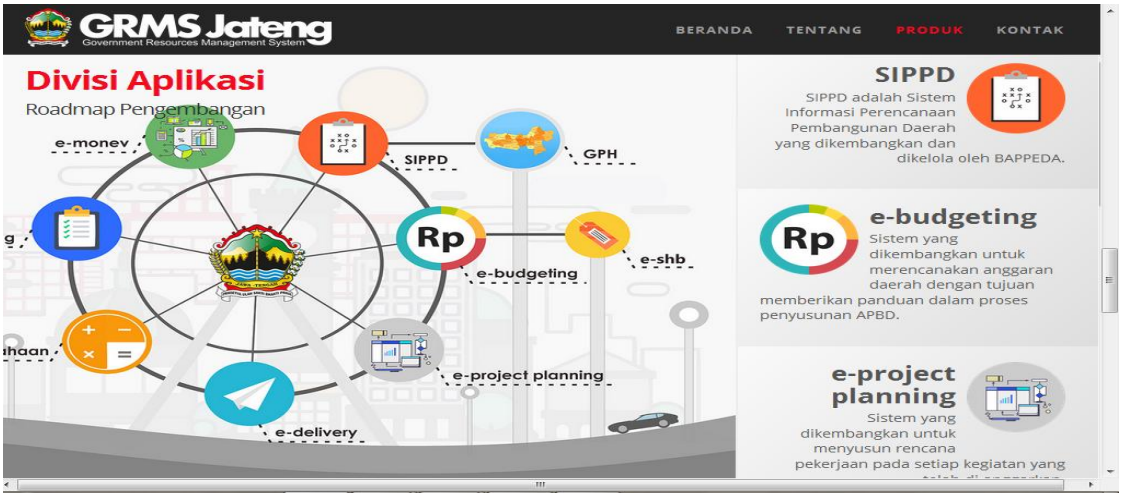

2. **Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)**

Gambar 2.2. Aplikasi SIM Kepegawaian

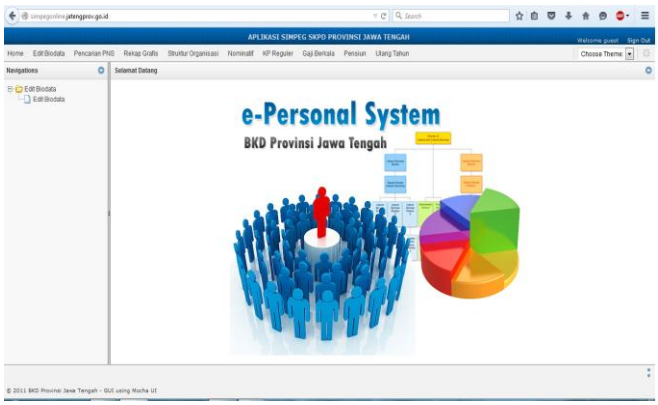

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG) secara komprehensip.

Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . SIMPEG bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi terintegrasi, terpadu dan *reliable* dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir

Fungsi SIMPEG antara lain untuk menunjang dan mempercepat proses promosi pegawai, mutasi, rotasi, kenaikan pangkat /golongan, dan informasi kepegawaian lainya. Selain itu SIMPEG juga membantu PNS dalam penyebaran berita kegiatan kepegawaian kepada masyarakat. SIMPEG juga memfasilitasi pegawai yang ingin bertanya mengenai proses kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Daearah.

Manfaat SIMPEG antara lain menyimpan data PNS secara lengkap, riwayat jabatan, pangkat dan golongan, pendidikan, jenis kelamin, alamat pekerjaan, selain itu SIMPEG juga mempermudah pegawai untuk melihat unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar dapat segera melakukan promosinya.

Pengguna SIMPEG adalah PNS Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Nomor Identitas Pegawai dan mempunyai *account* SKPD yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. e-SAKIP

Gambar 2.3. Aplikasi e-SAKIP

e-SAKIP adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengenda lian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan, komponen dari e-SAKIP

Provinsi Jawa Tengah meliputi perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah (RPJMD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan SKPD sampai dengan pejabat struktural eselon IV, Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja per Triwulan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah per tahun sejak tahun 2013.
Manfaat dibangunnya e-SAKIP adalah untuk memudahkan dalam pengumpulan data capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah

B. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu para Kepala Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif. Rencana strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimanifestasikan dalam bentuk dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diuraikan dalam bab ini, sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2016 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan tersendiri dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

1. VISI DAN MISI PROVINSI JAWA TENGAH

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih periode tahun 2013-2018 adalah :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi “

Untuk mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*.
4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Rumusan tujuan yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut.

Gambar 2.4
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 Perubahan

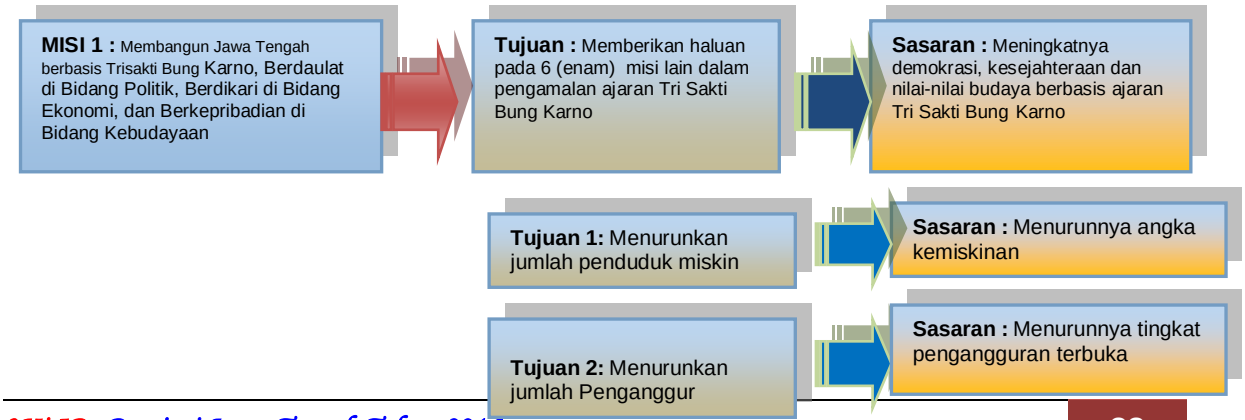

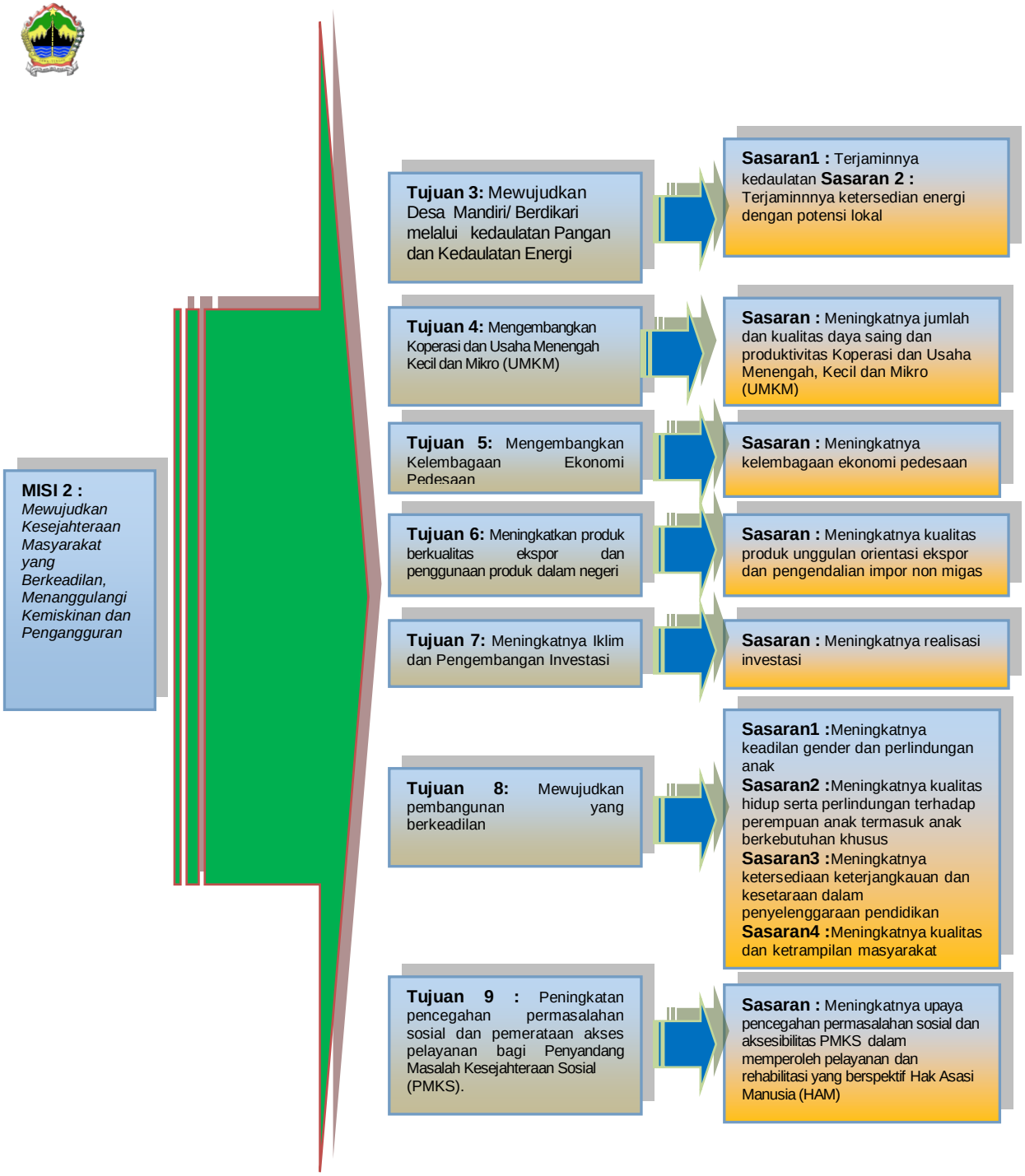
MISI 2 :
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
Tujuan 3: Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi
Sasaran1 : Terjaminnya kedaulatan Sasaran 2 : Terjaminnnya ketersedian energi dengan potensi lokal
Tujuan 4: Mengembangkan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)
Sasaran : Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)
Tujuan 5: Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan
Sasaran : Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan
Tujuan 6: Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri
Sasaran : Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas
Tujuan 7: Meningkatnya Iklim dan Pengembangan Investasi
Sasaran : Meningkatnya realisasi investasi
Tujuan 8: Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
Sasaran1 :Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak
Sasaran2 :Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan anak termasuk anak berkebutuhan khusus
Sasaran3 :Meningkatnya ketersediaan keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan
Sasaran4 :Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat
Tujuan 9 : Peningkatan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Sasaran : Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

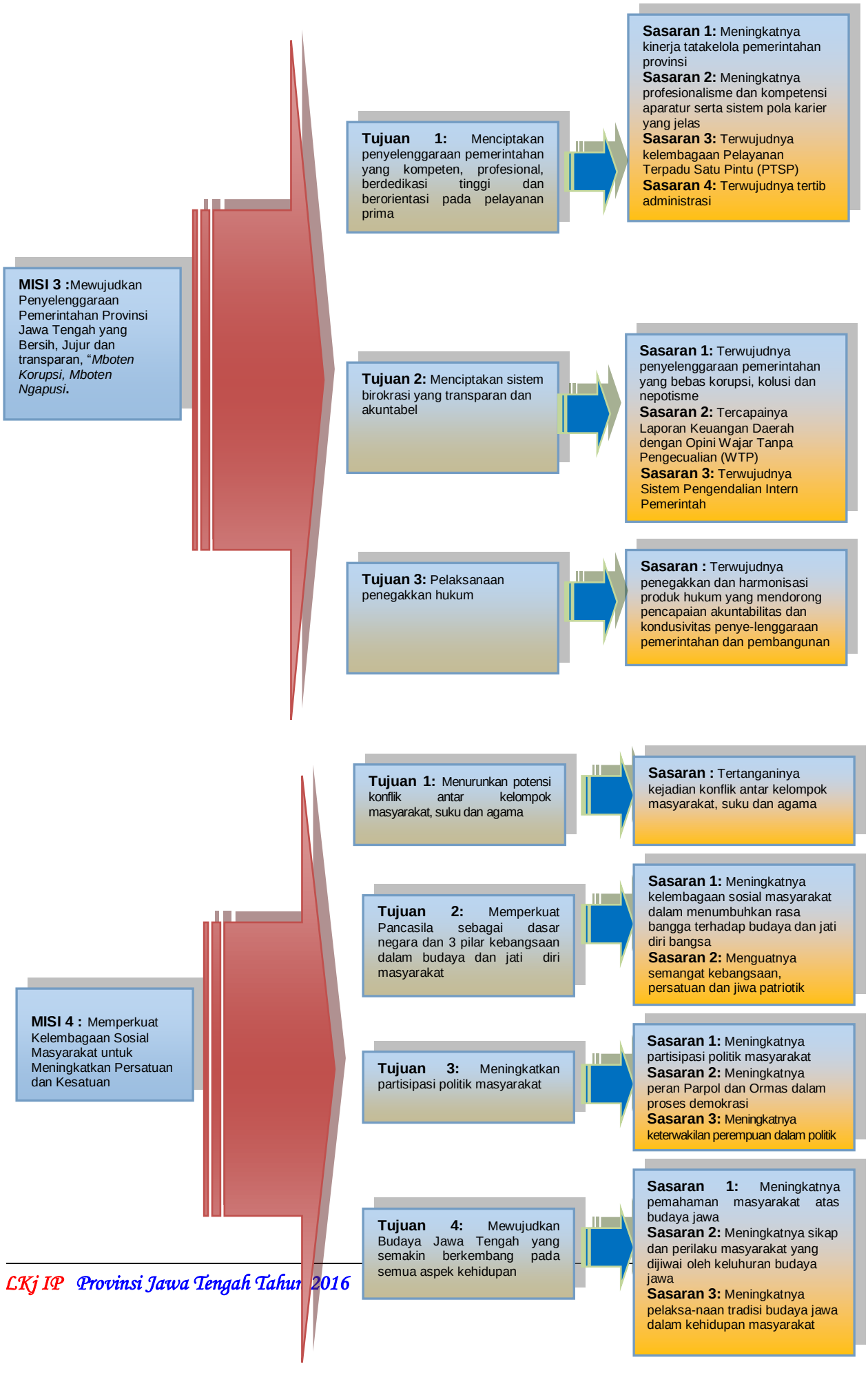
MISI 3 :Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*.
Tujuan 1: Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
Sasaran 1: Meningkatnya kinerja tatakelola pemerintahan provinsi
Sasaran 2: Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas
Sasaran 3: Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Sasaran 4: Terwujudnya tertib administrasi
Tujuan 2: Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Sasaran 2: Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sasaran 3: Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Tujuan 3: Pelaksanaan penegakkan hukum
Sasaran : Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penye-lenggaraan pemerintahan dan pembangunan
MISI 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
Tujuan 1: Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
Sasaran : Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
Tujuan 2: Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat
Sasaran 1: Meningkatnya kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa
Sasaran 2: Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik
Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
Sasaran 2: Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi
Sasaran 3: Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik
Tujuan 4: Mewujudkan Budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan
Sasaran 1: Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya jawa
Sasaran 2: Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa
Sasaran 3: Meningkatnya pelaksa-naan tradisi budaya jawa dalam kehidupan masyarakat

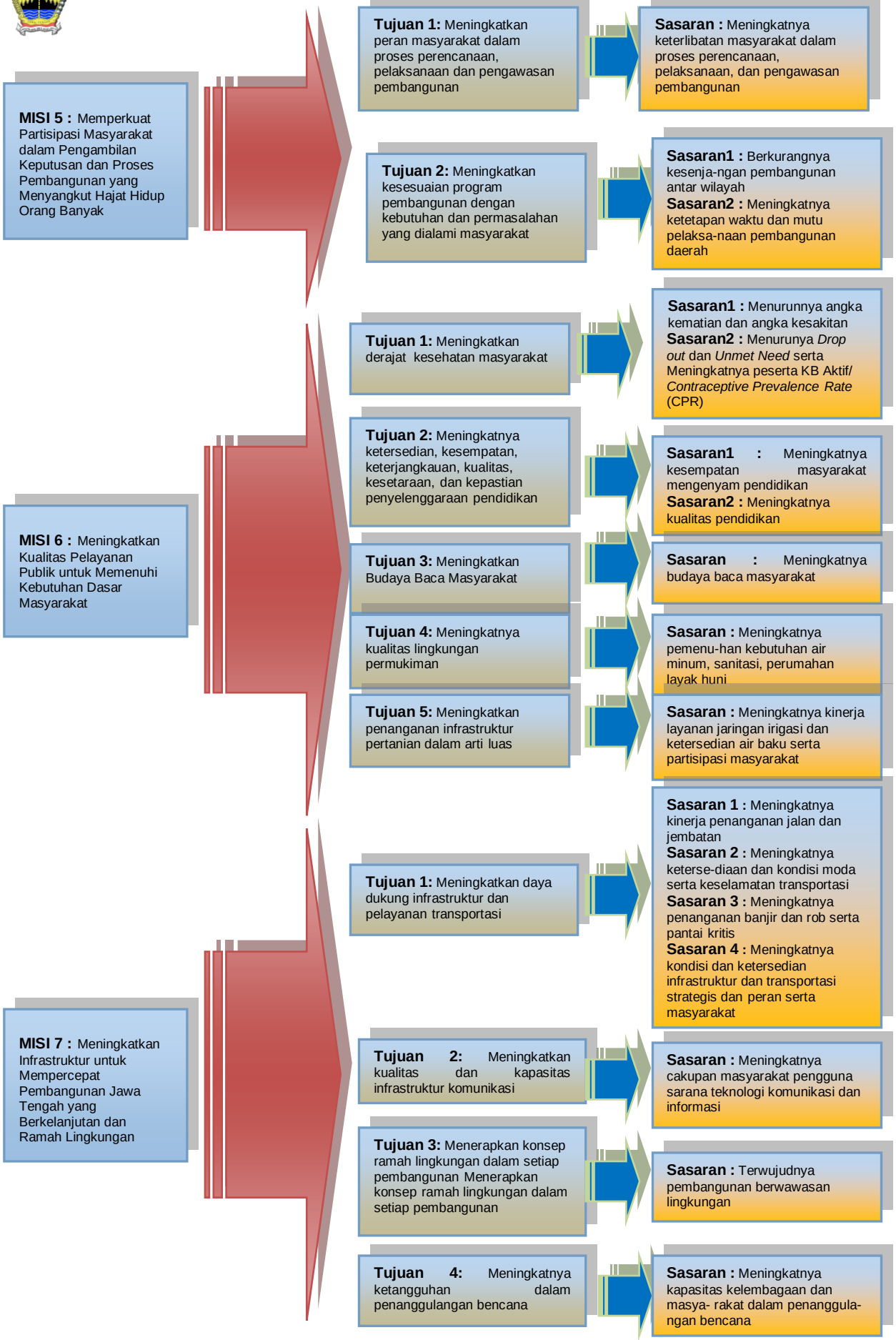
MISI 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Tujuan 1: Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Sasaran : Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
Tujuan 2: Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat
Sasaran1 : Berkurangnya kesenja-ngan pembangunan antar wilayah
Sasaran2 : Meningkatnya ketetapan waktu dan mutu pelaksa-naan pembangunan daerah
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
Tujuan 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran1 : Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan
Sasaran2 : Menurunya Drop out dan Unmet Need serta Meningkatnya peserta KB Aktif/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Tujuan 2: Meningkatnya ketersedian, kesempatan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan
Sasaran1 : Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan
Sasaran2 : Meningkatnya kualitas pendidikan
Tujuan 3: Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya budaya baca masyarakat
Tujuan 4: Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
Sasaran : Meningkatnya pemenu-han kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni
Tujuan 5: Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas
Sasaran : Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersedian air baku serta partisipasi masyarakat
MISI 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Tujuan 1: Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan
Sasaran 2 : Meningkatnya keterse-diaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi
Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis
Sasaran 4 : Meningkatnya kondisi dan ketersedian infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
Sasaran : Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi
Tujuan 3: Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan
Sasaran : Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan
Tujuan 4: Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masya- rakat dalam penanggula-ngan bencana

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 068.2/54/Tahun 2009 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perubahan 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno	1) Laju Inflasi
		2) Nilai Tukar Petani (NTP)
2	Menurunya angka kemiskinan	3) Persentase Angka Kemiskinjan
		4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
		5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	Menurunya tingkat pengangguran terbuka	6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
		7) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja
4	Terjaminnya kedaulatan pangan	8) Persentase penguatan cadangan pangan
		9) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)
		10) Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)
		11) Kontribusi Sektor Peternakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)
5	Terjaminnnya ketersedian energi dengan potensi lokal	12) Rasio Elektrifikasi
		13) Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto(PDRB)
6	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	14) Persentase Koperasi Sehat
		15) Persentase Koperasi Aktif
7	Meningkatnya kelembagaan ekonomi perdesaan	16) Persentase Desa Mandiri/Berdikari
8	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	17) Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)
		18) Kontribusi perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)
9	Meningkatnya realisasi investasi	19) Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN
		20) Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN
10	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	21) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		22) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
11	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	23) Rasio kab./kota menuju Kota Layak Anak (KLA)
12	Meningkatnya ketersediaan	24) Angka Partisipasi Kasar (APK)

	keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan		SMA/SMALB/MA/Paket C
13	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat	25)	Rasio Desa Inovatif
		26)	Rasio Kab/Kota Inovatif
		27)	Rasio Klaster Inovatif
14	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	28)	Persentase penanganan PMKS
		29)	Persentase penguatan kapasitas PSKS
15	Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	30)	Indeks Reformasi Birokrasi
16	Terwujudnya penyeleng-garaan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	31)	Indek Persepsi Korupsi
17	Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penye-lenggaraan pemerintahan dan pembangunan	32)	Persentase penindakan pelanggaran Perda
18	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	33)	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan
19	Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik	34)	Persentase kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan
20	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	35)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah
21	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa	36)	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
22	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksa-naan, dan pengawasan pembangunan	37)	Persentase pelaksanaan *rembug* masyarakat dalam pengambilan keputusan
23	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	38)	Indeks Gini
		39)	Indeks Wiliamson
24	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan	40)	Angka Harapan Hidup (AHH)
25	Menurunnya Drop out dan Unmet Need serta Meningkatnya peserta KB Aktif/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	41)	Persentase *Drop out* Peserta KB
		42)	Persentase *Unmet Need*
		43)	Persentase *Contraceptive Prevalence Rate*
26	Meningkatya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan	44)	Rata-rata lama sekolah
		45)	Harapan lama sekolah
27	Meningkatnya kualitas pendidikan	46)	Angka kelulusan SMA/ SMALB/MA/ SMK
28	Meningkatnya budaya baca masyarakat	47)	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan provinsi
29	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, perumahan layak huni	48)	Cakupan layanan air minum perkotaan
		49)	Cakupan layanan air minum perdesaan
		50)	Cakupan layanan sanitasi
		51)	Rasio rumah layak huni
30	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersedian air baku serta partisipasi masyarakat	52)	Persentase jaringan irigasi baik
		53)	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku
31	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	54)	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
		55)	Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m
		56)	Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)
		57)	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik
32	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	58)	Prosentase ruang publik berfasilitas hotspot/wifi

33	Terwujudnya pembangu-nan berwawasan lingkungan	59)	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis
		60)	Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
34	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	61)	Jumlah Desa Tangguh Bencana

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :

4.1 Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

a. Strategi

Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi politik, konsultasi, koordinasi, komunikasi, demokratisasi, pemanfaatan potensi lokal, kerjasama dan kemitraan, serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.

b. Arah Kebijakan

Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai-nilai dasar Trisakti Bung Karno.

4.2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

a. Strategi

1) Pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dengan pola pendekatan:
   a. Fokus pada sasaran kepala rumah tangga produktif dan tidak produktif;

b. Fokus pada wilayah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi;

2) Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar daya tarik wisata;
3) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja;
4) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
5) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
6) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan kejuruan;
7) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
8) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;
9) Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumberdaya lokal;
10) Perlindungan petani dan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan;
11) Antisipasi penanganan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan;
12) Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi,energi alternatif, dan peningkatan jaringan listrik perdesaan;
13) Peningkatan budaya hemat energi;
14) Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha baru;
15) Peningkatan produktivitas dan kapasitas Koperasi dan UMKM;
16) Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan;
17) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/ kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal;
18) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
19) Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;
20) Pengarusutamaan gender dan hak anak;
21) Peningkatan kualitas hidup SDM serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
22) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
23) Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat;
24) Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.

b. Arah Kebijakan

1) Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada kepala rumah tangga miskin tidak produktif dan produktif dengan tingkat kemiskinan tinggi, melalui pola pendampingan *charity* program dari pemerintah serta pola pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
2) Penguatan basis data perencanaan dan sistem informasi terpadu untuk penanggulangan kemiskinan;
3) Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata;
4) Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi;
5) Mengembangkan kondusivitas hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja;
6) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang ramah lingkungan serta mendorong penggunaan pupuk organik;
7) Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian utamanya LP2B dan reformasi agraria dalam rangka mempertahankan produksi dan produktifitas pertanian;
8) Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
9) Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan;
10) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan;
11) Meningkatkan budaya hemat energi;
12) Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi;
13) Meningkatkan kapasitas dan produktivitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) diarahkan pada fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial berbasis sumber daya lokal;
14) Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan;

15) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster;
16) Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
17) Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
18) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
19) Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;
20) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
21) Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*;
22) Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
23) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan khusus dan pendidikan menengah;
24) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
25) Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
26) Pengembangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
27) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"

a. Strategi

1) Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur;
2) Keterbukaan sistem karier kepegawaian;
3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik;
4) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;

5) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik;
6) Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara PTSP;
7) Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
8) Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di provinsi dan seluruh kabupaten/kota;
9) Peningkatan manajemen administrasi keuangan dan aset;
10) Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah;
11) Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh OPD Provinsi;
12) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP Provinsi Jawa Tengah;
13) Optimalisasi pelaksanaan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan;
14) Penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

b. Arah Kebijakan

1) Mengembangkan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten dan/atau tersertifikasi, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
2) Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
3) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
4) Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perijinan;
5) Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota;
6) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7) Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;
8) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi

pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

9) Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang handal;
10) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi APIP;
11) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;
12) Mengoptimalisasikan proses penyusunan peraturan perundang undangan di daerah;
13) Penanganan pelanggar peraturan daerah melalui tindakan-tindakan preventif dan represif.

4.4 Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

a. Strategi

1) Optimalisasi peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah;
2) Perluasan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
3) Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olah raga prestasi, pendidikan, rekreasi dan tradisional;
4) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga guna mendukung budaya dan prestasi olahraga;
5) Penguatan peran, partisipasi dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan;
6) Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal;
7) Penguatan kapasitas kader partai politik dan relawan organisasi masyarakat;
8) *Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Jawa melalui lembaga pendidikan, penyelenggaraan* event *tertentu dan penggunaan atribut Jawa dalam kegiatan formal.*

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa

Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;

2) Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di lingkungan pendidikan formal maupun non formal;
3) Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
4) Meningkatkan fasilitas dukungan sarpras keolahragaan guna menunjang prestasi olahraga;
5) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
6) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;
7) Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar;
8) Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;
9) Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

4.5 Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

a. Strategi

1) Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan;
2) Peningkatan partisipasi dan fungsi kontrol masyarakat, ormas dan dunia usaha;
3) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembug* masyarakat;
4) Peningkatan pemerataan pembangunan daerah;
5) Peningkatan fungsi pengawasan pembangunan;
6) Meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai mitra pembangunan.

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum *rembug*;
2) Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa;
3) Meningkatkan partisipasi aktif anak dalam pembangunan yang responsif anak;

4) Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
5) Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi.

4.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

a. Strategi

1) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan;
2) Optimalisasi pelayanan KB;
3) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
4) Peningkatan budaya baca masyarakat;
5) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
6) Peningkatan cakupan pelayanan akses aman air minum di perkotaan dan perdesaan, serta sanitasi;
7) Peningkatan dan pengembangan kondisi prasarana sarana dan ketersediaan air baku serta kondisi jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian dan air minum.

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta pemerataan tenaga kesehatan dan non kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi;
2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
3) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
4) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;
5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;

6) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi (SPAM dan TPA Regional);
7) Meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin;
8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
9) Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan akses aman air minum dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan.

4.7 Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

a. Strategi

1) Peningkatan kualitas dan kapasitas penanganan jalan dan jembatan;
2) Peningkatan kinerja kondisi baik jalan dan jembatan;
3) Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan serta kapasitas SDM;
4) Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik;
5) Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi;
6) Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;
7) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur dan transportasi strategis untuk percepatan penanganan kebutuhan dan masyarakat;
8) Peningkatan penggunaan teknologi informasi;
9) Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang terutama alih fungsi lahan;
10) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dan koridor jalan;
11) Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir;
12) Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;

13) Peningkatan penegakan hukum penataan ruang dan lingkungan hidup;
14) Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat;
15) Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana.

b. Arah Kebijakan

1) Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan kecepatan penanganan kerusakan jalan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan untuk menuju jalan bebas lubang;
2) Meningkatkan penuntasan penanganan secara bertahap dan terarah pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);
3) Meningkatkan ketersediaan peralatan yang mendukung pemeliharaan jalan dan SDM teknis kebinamargaan; pengembangan sistem informasi manajemen dan publik menyesuaikan perkembangan teknologi dan struktur konstruksi jalan; meningkatkan fungsi perencanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi serta mempersiapkan rencana penanganan infrastruktur strategis diantaranya rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang dan pengembangan akses menuju kawasan wisata unggulan;
4) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal *(mass rapid transport*) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan

pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;

6) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura;
7) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;
8) Meningkatkan pengendalian pembangunan infrastruktur dengan meminimalkan pemanfaatan LP2B, kawasan resapan air, dan pengurangan emisi GRK;
9) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
10) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
12) Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;
13) Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
14) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15) Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasirekonstruksi).

C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 adalah:

Tabel 2.2
Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2017

No	SASARAN STRATGEIS	Jumlah Program Pendukung
1	Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno	Semua Program
2	Terjaminnya kedaulatan pangan.	10
3	Terjaminnnya ketersedian energi dengan potensi lokal	3
4	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	2
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	7
6	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	3
7	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	2
8	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	2
9	Meningkatnya realisasi investasi	2
10	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	1
11	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	2
12	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan	1
13	Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat	3
14	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	2
15	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas	1
16	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	1

	bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	
17	Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	2
18	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2
19	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan	1
20	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1
21	Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi	1
22	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa	1
23	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1
24	Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah	1
25	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan	1
26	Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	3
27	Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan	3
28	Meningkatnya kualitas pendidikan	1
29	Meningkatnya budaya baca masyarakat	1
30	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni	4
31	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	2
32	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	4
33	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	1
34	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	3
35	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian

target jangka menengah (5 tahunan). Secara rinci terlampir Rencana Kinerja Tahunan 2017 berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2017. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

E. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Kinerja Tahun 2017 Sebagaimana Terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja berisi :
A. Pengukuran Kinerja
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
D. D Akuntabilitas anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2017

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Secara umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82.1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Tujuan 1.1 : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno					
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno					
1	Persentase capaian sasaran pembangunan	%	-	-	-
2	Laju Inflasi	%	4,5	2,68	167,91
3	PDRB Per Kapita	%	26,06	26,7*	102,46
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,87	69,98	98,74
5	Nilai Tukar Petani	Angka	102,86	103,48	100,60
Sasaran Strategis 2: Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi					

dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal					
1	Persentase penguatan cadangan pangan	%	127.69	134,4	127.69
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,91	8,46	71,03
3	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	%	1,48	1,41	96,27
4	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	2,39	2,54*	106,28
Sasaran Strategis 3: Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal					
1	Rasio Elektrifikasi	**%**	35,00	34.16	97.60
2	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	**%**	17,53	13.33	76,04
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat					
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah	Indeks	70,25	66,71	94,96
Tujuan 2.1 : Menurunkan jumlah penduduk miskin					
Sasaran Strategis : Menurunnya Angka Kemiskinan					
1	Persentase Angka kemiskinan	%	10,83	13,28	85,09
Tujuan 2.2 : Menurunkan jumlah penganggur					
Sasaran Strategis : Menurunnya tingkat pengangguran terbuka					
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20	4,57	91,19
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,22	69,11	94,38
3	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Usia Kerja	Angka	71,83	69,96	97,39
Tujuan 2.4 : Mengembangkan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)					
Sasaran Strategis : Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)					
1	Persentase Koperasi Sehat	%	18,30	19,86	108,52
2	Persentase Koperasi Aktif	%	81,90	82,81	101,11
Tujuan 2.6 : Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri					
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas					
1	Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	35,00	34.16	97.60
2	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	%	17,53	13.33	76,04
Tujuan 2.7 : Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi					
Sasaran Strategis : Meningkatnya realisasi investasi					
1	Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN	**%**	10	40,89	408,90
2	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	**%**	10	59,21	592,10
Tujuan 2.8 : Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan					

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indek	69,40	*92,22	132.88
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus					
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	71,49	*74,89	104.75
2	Rasio kabupaten/ kota menuju Kota Layak Anak	%	100	100	100
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan					
1	APK SMA/SMALB/ MA / Paket C	Angka	78,00	76,43*	97,99*
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat					
1	Rasio Desa Inovatif	%	0,56	0,61	107,01
2	Rasio Kab/Kota Inovatif	%	77,14	77,14	100
3	Rasio Klaster Inovatif	%	68,57	68,57	100
Tujuan 2.9 : Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS					
Sasaran Strategis : Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM					
1	Persentase penanganan PMKS	%	0,69	0,72	104,35
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	1,63	3,58	111,60
Tujuan 3.1 : Menciptakan penyelenggaran pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima					
Sasaran Strategis : Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,76*	73,76	100
Tujuan 3.2 : Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel					
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme					
1	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,5	3,22*	92,0
Sasaran Strategis 2: Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian					
1	Opini BPK (WTP)	Provinsi	Provinsi	Provinsi	100
2	Persentase Dividen	%	0,54	9,24	146,90
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
1	Tingkat Maturitas SPIP	Kalimat	Level 3	Level 3	100
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Kalimat	Level 2	Level 3	150
Tujuan 3.3 : Melaksanakan penegakan hukum					
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan					
1	Persentase penindakan pelanggaran Perda	%	100	95	95
Tujuan 4.1 : Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama					

Sasaran Strategis : Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama					
1	Persentase penanganan konflik sosial	%	95	100	105,26
Tujuan 4.3 : Meningkatkan partisipasi politik masyarakat					
Sasaran Strategis : Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi					
1	Persentase penggunaan hak pilih dalam: - Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur - Pilkada Kabupaten/ Kota	 % %	 - 72,88	 - 79,79	 - 109,48
Tujuan 4.4 : Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan					
Sasaran Strategis : Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa					
1	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	10,42	11,14	107
Tujuan 5.2 : Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat					
Sasaran Strategis 1 : Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah					
1	Indeks Gini	Indeks	0,341	0,365	93,42
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah					
1	Indeks Wiliamson	Indeks	0,6993	0,6272*	111,49
Tujuan 6.1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
Sasaran Strategis 1 : Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan					
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	74,75	74,02*	99,02
Sasaran Strategis 2 : Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)					
1	Persentase *Drop out* Peserta KB	%	13,75	13,50	101
2	Persentase *Unmet Need*	%	9, 25	9,94	93,06
3	Persentase *Contraceptive Prevalence Rate*	%	79,50	78,61	98,88
Tujuan 6.2 : Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan					
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,09	7,15	100,84
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,05	12,45*	95,40
3	APM SMA/SMALB/ MA/Paket C	Angka	64	64,02	100,03
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pendidikan					
1	Angka Kelulusan SMA/SMALB/ MA/SMK	Angka	99,98	99,99	100,01
Tujuan 6.3 : Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat					
Sasaran Strategis : Meningkatnya budaya baca masyarakat					
1	Pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	orang	889.811	3117285	350

Tujuan 6.4 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni					
1	Cakupan layanan air minum perkotaan	%	78,00	80.98	103.82
2	Cakupan layanan air minum perdesaan	%	71,00	72.80	102.54
3	Cakupan layanan sanitasi	%	80,00	80	100
4	Rasio rumah layak huni	%	78,74	80,31	101,99
Tujuan 6.5 : Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas					
Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat					
1	Persentase jaringan irigasi baik	%	80	80	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	58,50	58,50	100
Tujuan 7.1 : Meningkatkan dayadukung infrastruktur dan pelayanan transportasi					
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan					
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	88,92	88,92	100
2	Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m	%	77,46	77,46	100
3	Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	%	79,63	79,63	100
4	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	83,61	83,61	100
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi					
1	Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	%	54,00	54	100
Tujuan 7.3 : Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan					
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan					
1	Luas Ruang Terbuka Hujau di wilayah perkotaan (ha)	Ha	40	40	100
2	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	25	28,59	114
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,83	0,47	56,63
Tujuan 7.4 : Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana					
Sasaran Strategis : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana					
1	Desa Tangguh Bencana	Desa	62	66	106,45

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, untuk analisis dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian 2016 dengan capaian 2017, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2013 – 2018.

Analisis tentang 34 (tiga puluh empat) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1.1.1

Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1.1 : Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran tri sakti bung karno, tercapai sebesar **93,94 %** atau kategori **Baik**. Dari 5 (lima) indikator, satu indikator belum dapat diperoleh data capaiannya, karena baru dapat diukur setelah akhir perencanaan jangka menengah.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian Thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan	Persen	-	-	-	100	-
2	Laju Inflasi	Persen	4,5	2,68	167,91	4,5	167,91
3	PDRB Per Kapita	Persen	26,06	26,7*	102,46	27,13	98,42
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,87	69,98	98,74	71,59	97,75
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	102,86	103,48	100,60	103,27	100,20
Rata-rata persentase capaian Sasaran 1.1.1					**93,94**		**92,86**

Capaian kinerja Sasaran 1.1.1 pada tahun 2016 sebesar 96,58% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 2,64 %.

Laju inflasi Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 2017 sebesar 2,68% lebih rendah dari angka perkiraan sebesar 4,5±1%, namun masih diatas laju inflasi nasional sebesar 2,67% dan lebih tinggi dibanding laju inflasi tahun 2016 yaitu 2,36%. Kontribusi terbesar laju inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,82% kemudian disusul oleh kelompok perumahan, listrik, dan bahan bakar sebesar 5,62% dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 4,04%. Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 3,26%.

Dari enam kota besar di Jawa Tengah, yaitu: Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang, dan Tegal maka inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Cilacap sebesar 3,40% sedangkan inflasi terendah di kota Surakarta sebesar 1,83%, Laju inflasi Jawa Tengah pada bulan Oktober apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga yaitu: DKI Jakarta, jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Banten mempunyai angka paling rendah. Perkembangan inflasi Jawa Tengah dibandingkan dengan Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 3.4
Perkembangan Inflasi Tahun 2016-2017

NO	PROVINSI/NASIONAL	Inflasi (%)	
		2016	2017
1	DKI Jakarta	2,37	2,97
2	Banten	2,94	2,90
3	Jawa Barat	2,75	2,84
4	Jawa Tengah	2,36	2,68
5	DIY	2,29	3,06
6	Jawa Timur	2,74	3,07
	Nasional	3,02	2,67

Sumber : BPS Jateng, 2017

Anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 1.1.1 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.41

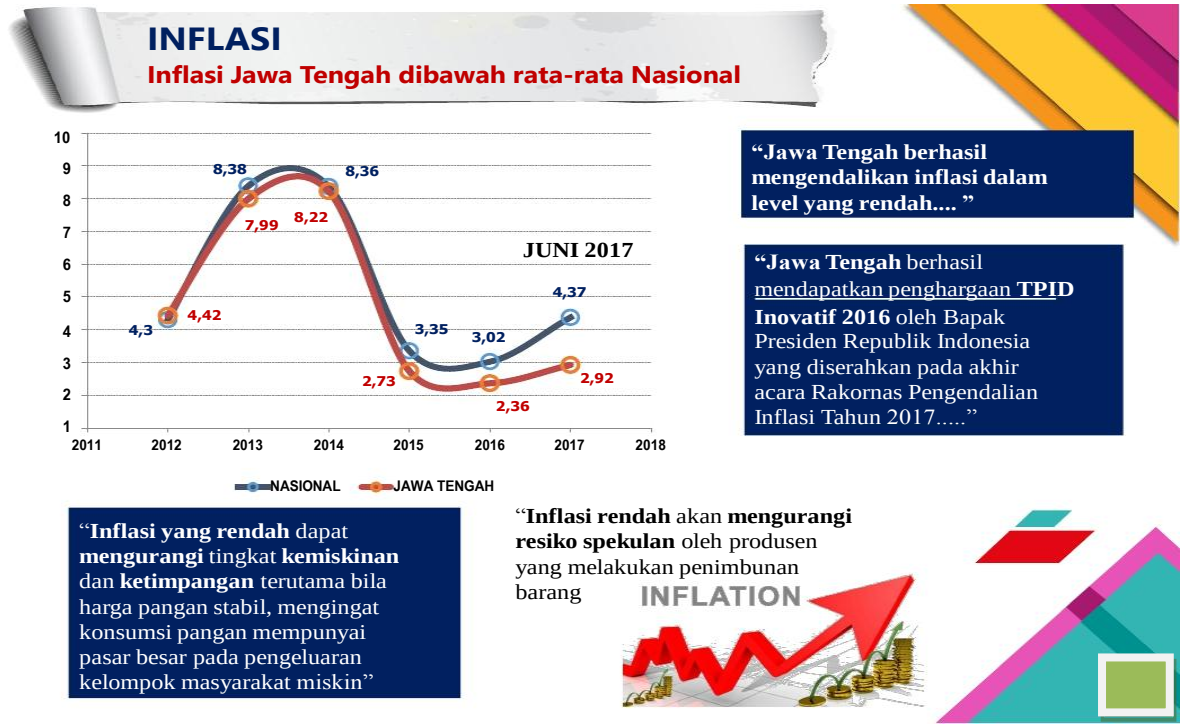

IPM digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dengan melihat data yang mencerminkan kemajuan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan IPM Jawa Tengah yang dihitung berdasarkan metode baru dengan indikator: angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM Tahun 2017 baru akan dirillis oleh BPS sekitar bulan April 2018. IPM Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 69,98 mengalami kenaikan sebesar 0,49 dibandingkan Tahun 2015, namun masih di bawah IPM Nasional sebesar 70,18. Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2015-2016 dibandingkan dengan Provinsi tetangga dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1.5

Tabel 3.5.
Perkembangan IPM Tahun 2015-2016

NO	PROVINSI/NASIONAL	CAPAIAN IPM	
		2015	2016
1	DKI Jakarta	78,99	79,60
2	Banten	70,27	70,96
3	Jawa Barat	69,50	70,05
4	Jawa Tengah	69,49	69,98
5	DIY	77,59	78,38
6	Jawa Timur	68,95	69,74
	Nasional	69,55	70,18

Sumber : BPS Jateng, 2017

Sedangkan perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 3.6
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016

NO.	KAB/KOTA	IPM	
		2015	2016
1	Cilacap	67,77	68,60
2	Banyumas	69,89	70,49
3	Purbalingga	67,03	67,48
4	Banjarnegara	64,73	65,52
5	Kebumen	66,87	67,41
6	Purworejo	70,37	70,66
7	Wonosobo	65,70	66,19
8	Magelang	67,13	67,85
9	Boyolali	71,74	72,18
10	Klaten	73,81	73,97
11	Sukoharjo	74,53	75,06
12	Wonogiri	67,76	68,23
13	Karanganyar	74,26	74,90
14	Sragen	71,10	71,43
15	Grobogan	68,05	68,52
16	Blora	66,22	66,61
17	Rembang	68,18	68,60
18	Pati	68,51	69,03
19	Kudus	72,72	72,94
20	Jepara	70,02	70,25
21	Demak	69,75	70,10
22	Semarang	71,89	72,40
23	Temanggung	67,07	67,60
24	Kendal	69,57	70,11
25	Batang	65,46	66,38
26	Pekalongan	67,40	67,71
27	Pemalang	63,70	64,17
28	Tegal	65,04	65,84
29	Brebes	63,18	63,98
30	Kota Magelang	76,39	77,16
31	Kota Surakarta	80,14	80,76
32	Kota Salatiga	80,96	81,14
33	Kota Semarang	80,23	81,19
34	Kota Pekalongan	72,69	73,32
35	Kota Tegal	72,96	73,55
	Jawa Tengah	69,49	69,98

Sumber : BPS Jateng, 2017

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah dengan menghitung indeks Nilai Tukar Petani (NTP), dengan cara membandingkan kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Capaian NTP Provinsi Jawa Tengah pada bulan November Tahun 2017 sebesar 103,48 lebih tinggi dari NTP Tahun 2016 sebesar 100,02. Perbandingan NTP Provinsi tetangga dan Nasional Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.7

Tabel 3.7
Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2017

NO	PROVINSI/NASIONAL	NTP	
		2016	2017
1	DKI Jakarta	100,09	98,06
2	Banten	102,36	101,29
3	Jawa Barat	104,86	108,02
4	Jawa Tengah	100,02	103,43
5	DIY	104,09	101,98
6	Jawa Timur	104,63	106,50
	Nasional	101,65	103,07

Sumber : OTS BPS Jateng, bulan November 2017

Adapun program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 1.1.1 meliputi semua program yang ada di masing-masing perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.

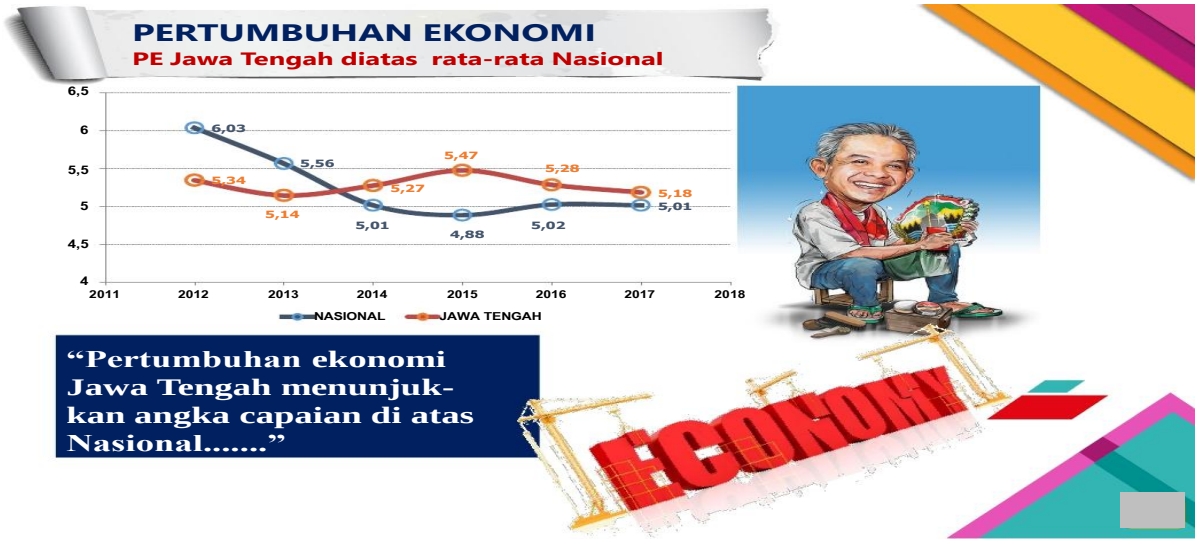

Sasaran Strategis 1.1.2

Terjaminnya kedaulatan pangan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1.2 : Terjaminnya kedaulatan pangan, tercapai sebesar **102 %** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penguatan cadangan pangan	Persen	95,00	127,69	134,41	100	127,69
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	11,91	8,46	71,03	11,88	71,21
3	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,48	1,41	96,27	1,45	97,24
4	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	Persen	2,39	2,54*	106,28	2,39	106,28
Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.1.2					**102,00**		**100,61**

Capaian kinerja Sasaran 1.1.2 pada tahun 2016 sebesar 104,72% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 2,72%, penurunan ini utamanya disebabkan oleh tidak tercapainya target Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan PDRB Sektor Perkebunan dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 tercapai sebesar 100,61%. Dari sektor peternakan penghargaan /prestasi tingkat nasional yang dicapai selama Tahun 2017 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

1) Penghargaan Apresiasi Anugerah Bakti Peternakan Tahun 2017 Kategori Kelompok Peternak Berprestasi:
   a) Kelompok Tani Ternak "MARGOMULYO", Kelurahan Kemandu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang (Komoditas Kambing).
   b) Kelompok Tani "TANI TENTREM", Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar (Komoditas Sapi Potong).

2) Penghargaan Apresiasi Anugerah Bakti Peternakan Tahun 2017 Kategori Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan Berprestasi yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Tani Mukti Tawangsari, Kabupaten Wonosobo.
3) Juara I Inseminator Berprestasi Kategori Swadaya atas nama Sdr. Budiyono, Kabupaten Rembang.
4) Peringkat I Kelompok Tani berprestasi bidang tanaman pangan komoditas kedelai, Kelompok Tani Ngudi Rejeki I Kabupaten Grobogan.

Adapun besaran anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran 2.1.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3...., sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.1.1 melalui Program pengembangan agribisnis dan Program peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian

Sasaran Strategis 1.1.3

Terjaminnnya Ketersedian Energi Dengan Potensi Lokal

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1.3 : Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal, tercapai sebesar **108,07%** atau kategori **Sangat Baik**. Dari 2 (dua) indikator Kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi dan PDRB sektor pertambangan, capaian kinerjanya diatas target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio Elektrifikasi	Persen	91,70	96,3	105,02	94	102,45
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap produk domestik bruto (PDRB)	Persen	2,03	2,28	112,32	204	111,76
Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.1.3					**108,07**		**107,11**

Capaian kinerja Sasaran 1.1.3 pada tahun 2016 sebesar 109,22% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 1,15 %, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai diatas target yang telah ditetapkan sebesar 107,11%.

Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.1

Grafik 3.1
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 1.1.3
dari Tahun 2014-2017

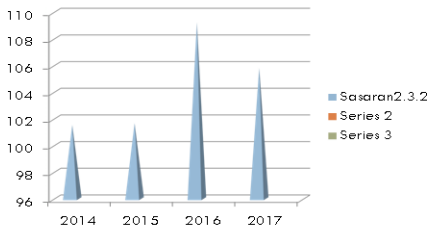

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 1.1.3 Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal adalah perbedaan data antara data masyarakat tidak mampu yang berhak menerima bantuan listrik murah di Pemerintah dengan data dari PLN serta realita kondisi masyarakat di lapangan, sehingga solusi pemecahaanya melalui verifikasi lapangan bersama dengan PLN dan aparat setempat.

Adapun anggaran pendukung pencapaian sasaran 1.1.3 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 1.1.3 melalui Program pengembangan pertambangan dan air tanah, Program pengembangan ketenagalistrikan dan migas

Sasaran Strategis 1.1.4

Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1.4 : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dengan satu indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah tercapai sebesar **94,96%** atau kategori **Baik**.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah	Indeks	70,25	66,71	94,96	70,50	94,62
Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.1.4					**94,96**		**94,62**

Capaian kinerja Sasaran 4.3.1 pada tahun 2016 sebesar 100% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 tidak terdapat perbedaan, karena capaian kinerja sebesar 100%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 100%. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.2

Grafik 3.2
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 1.1.4
dari Tahun 2014-2017

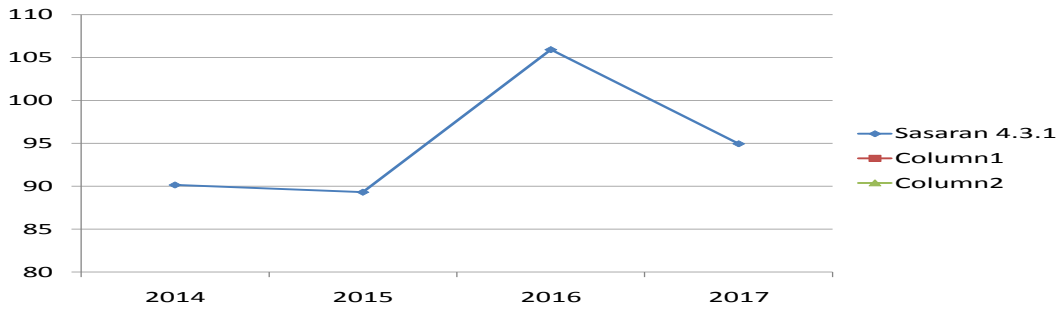

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 1.1.4 Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik adalah :

1). Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintah
2). Pendidikan Politik belum merata
3). Rendahnya penggunaan hak-hak politik masyarakat
4). Minimnya partisipasi perempuan dalam politik

Solusi pemecahaanya melalui :

1). Pemerataan dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat

2). Mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan mengadakan sosialisasi, pameran, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang politik

Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 1.1.4 sebagaiamana diuraikan dalam tabel 3.41 laporan ini, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 1.1.4 adalah Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Sasaran Strategis 2.1.1

Menurunya Angka Kemiskinan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.1.1 : Menurunya Angka Kemiskinan, tercapai sebesar **85,09%** atau kategori **Baik**. Dari indikator yang ada menunjukan bahwa meskipun angka kemiskinan di Jawa Tengah sudah menunjukan angka 13,28, tetapi dibandingkan tahun 2016 sebesar 13,27 masih terlalu tinggi sebesar 0,1 %.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Angka Kemiskinan	%	10,83	13,28	85,09	10,40	78,31
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.1.1					85,09		78,31

Capaian kinerja Sasaran 2.1.1 pada tahun 2016 sebesar 87,80% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 2,71%, bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 tercapai sebesar 78,31%. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.3

Grafik 3.3
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 2.1.1
dari Tahun 2013-2017

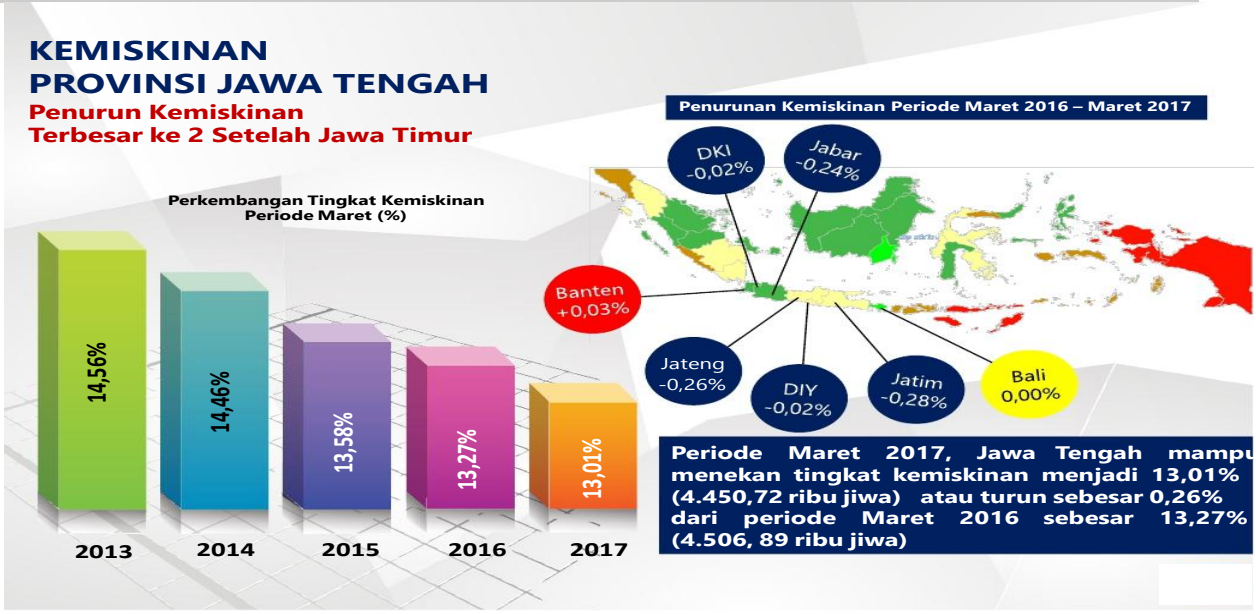

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 2.1.1 Menurunnya angka kemiskinan adalah

1) Kurangnya peluang bagi kegiatan produktif, contoh rendahnya investasi swasta dan kegiatan wirausaha di kantong-kantong kemiskinan serta alih fungsi lahan pertanian yang mendorong pengangguran perdesaan;
2) Lemahnya kemampuan SDM, terutama kelompok usia muda dan anak miskin. Hal ini tampak pada kesenjangan akses pada pendidikan, kesehatan, layanan sosial lainnya, serta prasarana dan aset produktif (kredit, lahan);
3) Terbatasnya perlindungan sosial karena terbatasnya sumberdaya, kurang tepatnya pentargetan serta belum baiknya tata kelola pemerintahan.
4) Belum optimalnya sinergitas antara program CSR dunia usaha dengan program –program penanggulangan kemiskinan yang diampu oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah :

1) Memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar melalui Program Bantuan Sosial terpadu berbasis individu, rumah tangga atau keluarga (KKS/Kartu Keluarga Sejahtera → PSKS/ Program Simpanan Keluarga Sejahtera, KIP/Kartu Indonesia Pintar, KIS/ Kartu Indonesia Sehat);

2) Memberdayakan penduduk miskin untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
3) Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat diperbaiki apabila seluruh program menggunakan sumber data yang sama untuk menentukan sasaran (basis data terpadu yang akurat).
4) Perlu upaya peningkatan soliasisasi yang berkelanjutan dalam rangka mensinergikan program CSR dunia usaha di Jawa Tengah dengan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota

Mengingat banyak sekali program yang memberikan dukungan pada penurunan kemiskinan, namun demikian berikut ini dicoba untuk melakukan indentifikasi bagi program yang terkait langsung bagi penurunan kemiskinan antara lain :

1) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
3) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi;
4) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
6) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan;
7) Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
8) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
9) Program Promosi dan Pemberdayaan;
10) Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
11) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
12) Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan;
13) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
14) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
15) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 2.1.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41.

Sasaran Strategis 2.2.1

Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.2.1 : Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka yang terdiri dari 3 (tiga) indikator Tingkat pengangguran terbuka, Tingkat partisipasi angkatan kerja dan Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja tercapai sebesar **92,46%** atau kategori **Baik**.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,20	4,57	91,19	4,13	90,37
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,22	69,11	94,38	73,55	93,96
3	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja	Persen	71,83	65,96	91,83	72,63	90,82
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.2.1					**92,46**		**91,72**

Capaian kinerja Sasaran 2.2.1 pada tahun 2016 sebesar 94,09% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 1,63 % artinya terjadi penurunan pengangguran di jawa tengah sebesar 1,63%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 91,72 %. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.4

Grafik 3.4
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 2.2.1
dari Tahun 2014-2017

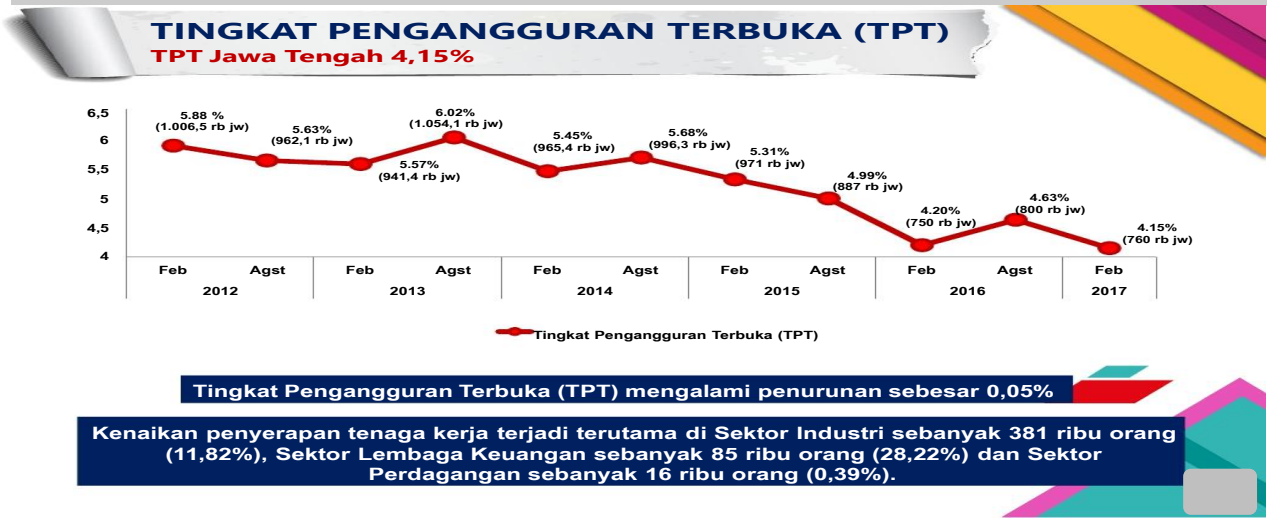

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 2.2.1 Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah:

1. Lowongan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja sebagai dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regioanl.
2. Penduduk yang bekerja berpendidikan rendah SMP ke bawah sebesar 68,37%, sehingga kesulitan mencari peluang kerja.
3. Karena lowongan yang tersedia di pasar kerja mempersyaratakan kualifikasi jabatan, sedangkan tenaga kerja yang tersedia belum memiliki kompetensi yang di persyatkan

Solusi pemecahaanya melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan melalui sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja agar memiliki daya saing, melalui informasi pasar untuk penempatan tenaga kerja baik di dalam daerah, dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun anggaran pendukung untuk menacapai target kinerja sasaran 2.1.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.2.1 melalui :

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Program peningkatan kesempatan kerja
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

Sasaran Strategis 2.3.1

Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.3.1 : Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas koperasi dan usaha menengah, kecil dan mikro, tercapai sebesar **104,81%** atau kategori **Sangat Baik**. Dari 2 (dua) indikator, semuanya capaian kinerjanya melebihi terget yang telah ditetapkan.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Koperasi Sehat	Persen	18,30	19,86	108,52	19,50	101,84

2	Persentase Kop[erasi Aktif	Persen	81,90	82,81	101,11	82,50	100,37
	Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.3.1				**104,81**		**101,10**

Capaian kinerja Sasaran 2.3.1 pada tahun 2016 sebesar 103,34 % dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 1,47%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 tercapai sebesar 101,10%, Analisa pencapaian sasaran 2.4.1 adalah sebagai berikut : Secara umum, tingkat kepatuhan koperasi di Jawa Tengah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat koperasi aktif yang mampu mencapai 82,81% dan tingkat koperasi sehat sebesar 19,86%. Hasil ini disebabkan oleh upaya pembinaan dan pengawasan secara sinergis antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu dukungan tenaga pendamping bagi koperasi berupa Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM RI di 17 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah turut meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan koperasi di Jawa Tengah. Selain itu dukungan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Koperasi yang dilaksanakan oleh UPTD Balatkop secara berkesinambungan turut meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dari pengurus Koperasi di Jawa Tengah. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.6

Grafik 3.5
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 2.3.1
dari Tahun 2014-2017

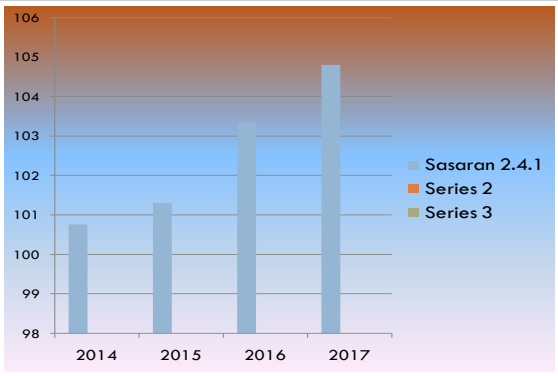

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran 2.3.1 tersebut antara lain masih terdapat koperasi yang belum sepenuhnya menerapkan azas, nilai – nilai dan prinsip – prinsip sesuai dengan jati diri perkoperasian, serta lambatnya regenerasi pengurus koperasi mengakibatkan kualitas sumber daya manusia relatif terbatas dan kurang kompetitif. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan ke depan adalah :

1). Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaaan terhadap koperasi secara berkala.
2). Meningkatkan kualitas administrasi dan kelembagan koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3). Penyelenggaraan aneka pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, manajerial, ataupun teknis bagi pengurus/pengelola koperasi.

Adapun anggaran pendukung untuk pencapaian sasaran strategis 2.3.1 baik meliputi besaran dan realisasinya sebagaimana diuraikan dalam pada Tabel 3.41

Sasaran Strategis 2.4.1

Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Orientasi Ekspor dan Pengendalian Impor Non Migas

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.4.1 : Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas sebesar **100,73%** atau kategori **Sangat Baik**. Dari 2 (dua) indikator, kesemuanya tercapai dengan baik.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.4.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Presentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	Persen	35,00	34,96	99,88	35,10	99,60
2	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	Persen	13,39	13,60	101,57	13,57	100,22
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.4.1					**100,73**		**99,91**

Capaian kinerja Sasaran 2.4.1 pada tahun 2016 sebesar 83,78%.dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 16,95%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah

tercapai sebesar 99,91%. Pencapaian Sasaran 2.4.1 Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.

Adapun anggaran pendukung untuk pencapaian sasaran strategis 2.4.1 baik meliputi besaran dan realisasinya sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.4.1 melalui :

1. program Pengembangan industri logam, mesin dan tekstil;
2. Program pengembangan industri agro, kimia dan hasil hutan;
3. Program Pengembangan industri alat transportasi, elektronika dan aneka;
4. Program pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha industri;
5. Program peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor;
6. Program peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM;
7. Program peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri;
8. Program penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah;
9. Program peningkatan perdagangan luar negeri;
10. Program pengembangan perdagangan dalam negeri.

Sasaran Strategis 2.5.1

Meningkatnya Realisasi Investasi

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.5.1 : Meningkatnya realisasi investasi, tercapai sebesar **245,0%** atau kategori **Sangat Baik**. Dari 2 (dua) indikator capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan iklim investasi di Jawa Tengah semakin kondusif, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di jawa tengah, hal ini sebagai wujud dari Jawa Tengah Ramah Investasi.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.5.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN	Persen	10	14,02	140,2	12	116,83
2	Persentase	Persen	10	34,98	349,80	12	291,50

kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)		
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.5.1	**245,0**	**204,17**

Capaian kinerja Sasaran 2.5.1 pada tahun 2016 sebesar 416 % dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 171 %, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 204,17 %, penurunan pencapaian kinerja sasaran karena adanya perubahan indikator kinerja dari yang semula berkualitas *output* menjadi indikator berkualitas *outcome.* Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 2.5.1 Meningkatnya realisasi investasi adalah ketersediaan lahan untuk industrai terkendala oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

Pengembangan investasi di Jawa Tengah masih menemui sejumlah kendala antara lain :

1. Tata ruang, khususnya untuk kawasan industri atau peruntukan industri, karena banyak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya;
2. Peraturan terkait kegiatan berusaha masih banyak bersifat sektoral, duplikasi dan saling mengunci (*interlocking*);
3. Rezim perpajakan yang belum memberikan ruang lebih kepada investor;
4. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relatif masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Pertanahan, khususnya dalam pengadaan lahan;
6. Infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri seperti kawasan industry, dan;
7. Pasokan energi (listrik, gas), air bersih dan lainnya.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

1. Penyederhanaan sistem, prosedur dan persyaratan perizinan serta peningkatan jumlah perizinan yang dikelola PTSP dari 158 menjadi 166
2. sosialisasi penandatangan nota kesepahaman antara Polri dan BKPM tentang keamanan investasi kepada kabupaten atau kota dan para pelaku usaha;
3. Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksana Berusaha
4. Penerapan KLIK di kawasan industri dan layanan I23J dan pemberian penghargaan bagi Kabupaten atau Kota pro investasi dan perlunya pembentukan Forum PTSP se-Jawa Tengah;

5. pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan. Ini dengan mendorong kelompok industri yang cepat menghasilkan bahan baku atau setengah jadi bagi industri lainnya, penunjang infrastruktur;
6. Tahap kedua (2016-2020) infrastruktur dan energi dengan percepatan infrastruktur fisik kawasan regional, termasuk infrastruktur pendukung zona dan kawasan industri, diversifikasi dan konversi energi serta peningkatan kualitas SDM. Untuk tahap ketiga (2021-2025) pengembangan industri skala besar yang terintegrasi (upstream-downstream) dan tahap keempat (setelah 2025) pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan pengembangan investasi dan inovasi berteknologi tinggi

Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 2.5.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.5.1 melalui :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi
3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Sasaran Strategis 2.6.1

Meningkatnya Keadilan Gender dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.6.1 : Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak, tercapai sebesar **118,81%** atau kategori **Sangat Baik**. Dari 2 (dua) indikator, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) capaian kinerjaya diatas 100%, artinya melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	69,40	92,22*	132,88	69,99	131,76
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,49	74,89*	104,75	71,99	104,02
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.6.1					**118,81**		**117,89**

Capaian kinerja Sasaran 2.6.1 pada tahun 2016 sebesar 127,66 % dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 8,85%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 117,89% atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 2.6.1 Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak adalah Masih adanya kesenjangan gender di beberapa bidang pembangunan (bidang ekonomi dan politik) dan Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan pemerintahan Kab/Kota, sehingga solusi pemecahaanya melakukan pelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan pelembagaan PUG di lembaga pemerintah tingkat provinsi dan mendorong kab/kota untuk meningkatkan pelembagaan PUG di kab/kota masing-masing

Adapun anggaran untuk mencapai target kinerja sasaran 2.6.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.6.1 adalah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran Strategis 2.6.2

Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan anak termasuk anak berkebutuhan khusus

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.6.2 : Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan anak termasuk anak berkebutuhan khusus, tercapai sebesar **100%** atau kategori **Sangat Baik**. Dari indikator yang ada capaian kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100

	menuju Kota layak anak (KLA)		
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.6.2		**100**	**100**

Capaian kinerja Sasaran 2.6.2 pada tahun 2016 sebesar 131,26% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 31,26%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 100%

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 2.6.2 Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan anak termasuk anak berkebutuhan khusus adalah Belum semua Kabupaten/Kota memenuhi sebagian besar indiaktor KLA dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak (60% atau 21 Kab/kota), sehingga solusi pemecahaanya mendorong dan memberikan advokasi kepada Kab/kota yang belum memenuhi indiaktor KLA paling sedikit nilai 500 dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak, Adapun anggaran untuk mencapai target kinerja sasaran 2.6.2 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.6.2 adalah Program Peningkatan Kualitas Hidup, dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sasaran Strategis 2.6.3

Meningkatnya ketersediaan keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.6.3 : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan tercapai sebesar **100,01 %** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMALB/MA/ Paket C	Angka	78,00	78,01	100,01	80	97,51
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.6.3					**100,01**		**97,51**

Capaian kinerja Sasaran 2.6.3 pada tahun 2016 sebesar 104,05% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat

penurunan sebesar 4,04% hal ini disebabkan satu indikator kinerja Angka Putus Sekolah beralih menjadi indikator kinerja perangkat daerah, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 97,51%. Yang masih perlu ditingkatkan dalam mencapai Sasaran 2.6.3 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah masih tinnginya pernikahan dini di daerah pedesaan, sehingga solusi pemecahaanya melalui sosialisasi peningakatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan.
Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 2.6.3 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.6.3 melalui Program pendidikan menengah.

Sasaran Strategis 2.6.4

Meningkatnya Kualitas dan Ketrampilan Masyarakat

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.6.4 : Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat tercapai sebesar **102,34 %** atau kategori **Sangat Baik**. Dari 3 (tiga) indikator rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.6.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio Desa Inovatif	Persen	0,56	0,61	107,01	0,68	89,71
2	Rasio Kab/Kota Inovatif	Persen	77,14	77,14	100	100	77,14
3	Rasio Klaster Inovatif	Persen	68,57	68,57	100	85,71	80,00
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.6.4					**102,34**		**82,28**

Capaian kinerja Sasaran 2.6.4 pada tahun 2017 bila dibandingkan target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 82,28%, adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 2.6.4 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41

SEBARAN KLASTER PRODUK UNGGULAN DAERAH KAB/KOTA BINAAN FEDEP

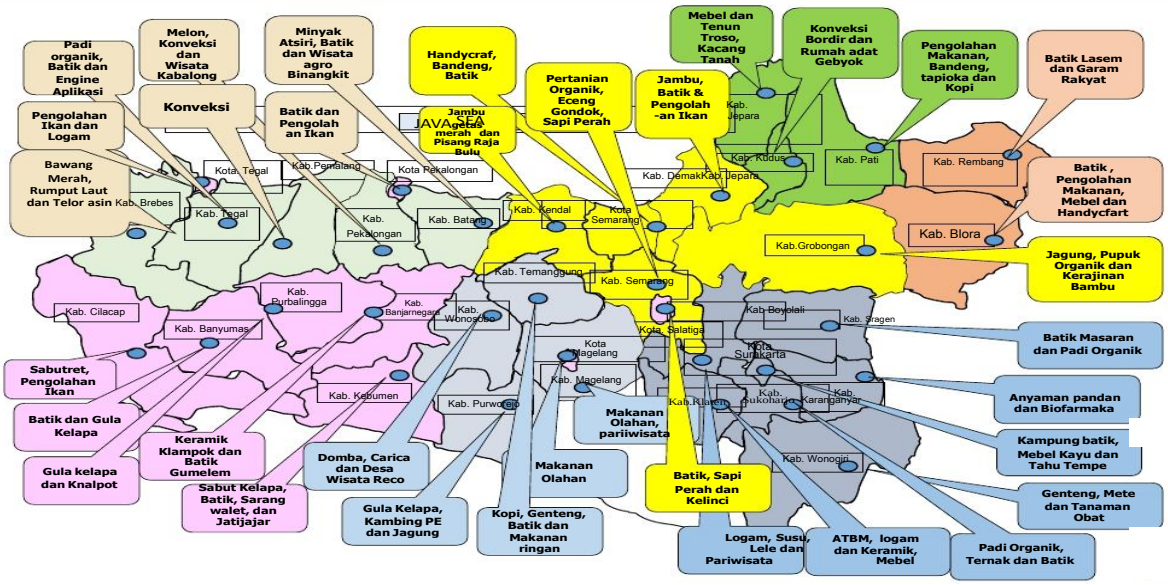

Untuk mencapai target kinerja sasaran Strategis 2.6.4 yang telah ditetapkan tersebut didukung dengan beberapa program pendukung antara lain Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Pendidikan Non Formal dan Informal dan Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan .Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran 2.6.4 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya :

1) Masih terbatasnya masyarakat untuk mengakses modal yang dibutuhkan untuk menunjang wirausaha;
2) Masih minimnya jejaring pasar, sehingga menyebabkan kesulitan masyarakat yang telah dilatih untuk memasarkan hasil produksinya.
3) Tidak tercapainya target karena kebijakan penerima hibah kepada masyarakat harus berbadan hukum dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga banyak kelompok kewirausahaan pemuda tidak memenuhi persyaratan

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain dengan:

1) Memberikan pelatihan kepada masyarakat, tidak saja terbatas pada ketrampilan untuk berwirausaha, tetapi juga tentang mekanisme untuk mengakses modal terhadap sumber-sumber permodalan;
2) Membantu kepada masyarakat yang telah dilatih untuk membuka jaringan pemasaran, sehingga hasil produk usahanya tidak mengalami kesulitan untuk pemasarannya.

3) Membina kelompok kewirausahaan pemuda agar mendaftarkan kelompoknya ke Kementerian Hukum dan HAM, agar dapat menerima bantuan hibah.

Sasaran Strategis 2.7.1

Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2.7.1 : Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM) tercapai sebesar **161,99%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.7.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Persentase Penanganan PMKS	Persen	0,69	0,72	104,35	0,69	104,35
2	Persentase penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persen	1,63	1,81	111,04	1,64	110,37
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.7.1					**161,99**		**107,36**

Capaian kinerja Sasaran 2.7.1 pada tahun 2016 sebesar 99,96%. dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 8,03%, peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan capaian peningkatan persentase penanganan PMKS dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah melebihi target karena sudah tercapai sebesar 107,36%

Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.6

Grafik 3.6
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 2.7.1
dari Tahun 2014-2017

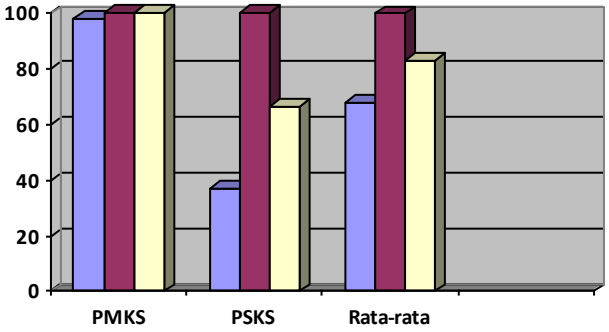

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 2.7.1 Meningkatnya upaya pen-cegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM) adalah :

1) Data kemiskinan yang masuk ke dalam basis data terpadu (BDT) yang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih belum akurat;
2) Tingginya mobilitas PMKS jalanan membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Terdekat dalam sinergi dan kemitraan dalam penanganannya.
3) Optimalisasi peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayahnya masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten/Kota.
4) Penanganan PMKS di tingkat Hulu (keluarga dan Masyarakat) belum simultan dengan penanganan langsung (direct services) pada PMKS, diperlukan harmonisasi dan strategi pola penanganan yang komprehensip, simultan dan berkelanjutan.
5) Keterbatasan daya tampung Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum ditindaklanjuti oleh pendirian Shelter penampungan/ persinggahan oleh Kabupaten/Kota.
6) Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten/kota yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.

Alternatif dan solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 2.7.1 antara lain melalui :

1) Perlu adanya verifikasi dan validasi data di lapangan terkait data kemiskinan;
2) Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam

penyelenggaraan pemerintahan sehingga alokasi anggaran harus berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.

3) Optimalisasi peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan kerjasama yang efektif melalui Program *Corporate Social Responbility* (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahan (TJSLP) dalam penanganan PMKS.
4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Lintas Wilayah, Lintas Instansi dan Lintas Sektoral.

Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 2.7.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 2.7.1 melalui :

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
7) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
8) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Sasaran Strategis 3.1.1

Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur yang tersertifikasi dan Berintegritas serta Sistem Pola Karier yang Jelas

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3.1.1 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur yang tersertifikasi dan Berintegritas serta Sistem Pola Karier yang Jelas tercapai sebesar **100 %** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,7	73,76	100	-	100
Persentase Capaian Sasaran Strategis 3.1.1					**100**		**100**

Capaian kinerja Sasaran 3.1.1 2017 tercapai sesuai dengan target atau 100%. Untuk indikator Indek Reformasi Birokrasi adalah indikator baru, yang merupakan perbaikan dari indikator sebelumnya yang berkualitas *output* . Sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, sehingga pada tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 73,76 (sangat baik) atau peringkat satu nasional. Untuk hasil evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi pada tahun 2017 , sudah dilakukan, namun sampai dengan Awal Maret 2018 hasil evaluasi tersebut belum diumumkan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan hasil evaluasi oleh tim internal di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan ada kenaikan atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan nilai 83,79 (memuaskan).Pada Tahun 2017dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan membangun integritas aparatur telah dilaksanakan Diklatpim III sebanyak 239 orang, Diklatpim IV sebanyak 280 orang, Diklat Prajab Gol III sebanyak 521 orang .

Anggaran pendukung untuk pencapaian sasaran strategis 3.1.1 baik meliputi besaran dan realisasinya sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.4, sedangkan beberapa program pendukung antara lain: Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Dari ketiga program yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 3.1.1 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala khusunya di bidang sumber daya aparatur diantaranya :

1) Keterlambatan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah sehingga pelaksanaannya mundur dari jadwal yang ditetapkan.
2) Adanya keterlambatan informasi pelaksanaan kebijakan *talent scouting* yang disampaikan Perangkat Daerah kepada PNS di lingkungannya setelah surat edaran dan sosialisasi disampaikan sehingga terdapat PNS yang tidak mengetahui mengenai kegiatan *talent scouting.*
3) Terdapat data PNS yang memenuhi persyaratan administrasi namun belum terdaftar pada saat uji publik.
4) Hasil perumusan kebijakan talent scouting yang ditetapkan dalam Pergub terjadi penambahan tahapan seleksi.

5) Pilihan prioritas tugas kedinasan yang lebih penting dibandingkan untuk mengikuti diklat.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan melalui Optimalisasi komunikasi, koordinasi dan monitoring dengan OPD secara intensif dan Membuat surat edaran kepada instansi pengirim agar konsisten dengan usulan calon peserta.

Sasaran Strategis 3.2.1

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3.2.1 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme tercapai sebesar **92,0 %** atau kategori **Baik**.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,5	3,22*	92,0	4	80,5
Persentase Capaian Sasaran Strategis 3.2.1					**92,0**		**80,5**

Capaian kinerja Sasaran 3.2.1 pada tahun 2017 apabila dibanding capaian akhir perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) sudah tercapai 80,5 %. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, selain telah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Gubenur Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai berikut :

1) Mengeluarkan kebijakan terkait dengan Gratifikasi, diatur dengan Peraturan Gubenur Nomor 59 Tahun 2014;
2) Mengeluarkan kebijakan terkait dengan LHKPN, yang diatur dengan Kepgub LHKPN No.770/4 tanggal 2 Juni Tahun 2014;
3) Melaksanakan *e-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa;
4) Melaksanakan penerimaan CPNS melalui Sistem Computer Asissted Test (CAT) ;

5) Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat, melalui situs : Lapor Gub yang dapat diakses pada portal : Jatengprov.go.id;
6) Melakukan pencanangan pembangunan zona integritas bersama-sama dengan 35 pemerintah kab./kota se Jawa Tengah.

Untuk mencapai target kinerja sasaran 3.2.1 tersebut didukung dengan anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung antara lain Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemerintahan Umum . sedangkan hambatan dan kendala dalam mencapai target kinerja Sasaran Strategis 3.2.1 tersebut antara lain :

1) Masih belum sepenuhnya mentalitas aparatur, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program yang terkait dengan pencegahan dan pemberatasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2) Masih permisifnya aparatur, melihat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
3) Belum sepenuhnya sistem dan iklim kerja mencegah, terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan dengan memperkuat budaya aparatur untuk mendukung suksesnya pencegahan dan pemberatasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan memperkuat sistem yang mendukung terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sasaran Strategis 3.2.2

Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3.2.2 : Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian tercapai sebesar **123,45%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Opini BPK (WTP)	Prov	Prov	Prov	100	Prov	100
2	Persentase Deviden	Persen	6,29	9,24	146,90	7,10	130,14

Persentase Capaian Sasaran Strategis 3.2.2	**123,45**	**115,07**

Capaian kinerja Sasaran 3.2.2 pada tahun 2017 bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 115,07% artinya sudah melebihi target kinerja yang telah diperjanjikan. Anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran 3.2.2 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Sasaran Strategis 3.2.3

Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3.2.3 : Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah tercapai sebesar 125 % atau kategori **Sangat Baik** Dari 2 (dua) indikator yang ada rata-rata sudah tercapai 100%

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Tingkat Maturitas SPIP	Kalimat	Level 3	Level 3	100	Level 3	100
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Kalimat	Level 2	Level 3	150	Level 3	100
Persentase Capaian Sasaran Strategis 3.2.3					**125**		**100**

Capaian kinerja Sasaran 3.2.3 pada tahun 2017 cukup signifikan ini di pengaruhi oleh capian indikator meningkatnya kapabilitas APIP yang semula di targetkan level 2, pada tahun 2017 bisa mencapai level 3 bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 100%

Adapun anggaran pendukung pancapaian target kinerja sasaran 3.2.3 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan Program pendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3.2.3, antara lain : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan

Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah, sedangkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 3.2.3**,** antara lain :

1) Implementasi SPIP yang masih minim di lingkup Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2) Format dan sistematika penerapan SPIP yang masih berbeda-beda berimplikasi terhadap peraturan yang disusun menjadi tidak sama antar instansi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya;
3) Masih banyak perangkat daerah yang belum dapat membedakan penyelenggaraan SPIP dengan Sistem Pengendalian Intern yang selama ini sudah dilakukan di beberapa perangkat daerah dan Rumah Sakit.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan melalui :

1) Penyusunan peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan SPIP guna mempermudah perangkat daerah dalam menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai output dari penyelenggaraan SPIP;
2) Sosialisasi yang intens kepada perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan SPIP.

Sasaran Strategis 3.3.1

Terwujudnya Penegakkan dan Harmonisasi Produk Hukum yang Mendorong Pencapaian Akuntabilitas dan Kondusivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3.3.1 : Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tercapai sebesar **100 %** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Persentase penindakan pelanggaran PERDA	Persen	100	100	100	100	100

Persentase Capaian Sasaran Strategis 3.3.1	**100**	**100**

Capaian kinerja Sasaran 3.3.1 pada tahun 2016 sebesar 72,73% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 27,27%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 100%. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 3.3.1 Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah Perda No 10. Tahun 2011 tentang Mineral batubara belum disesuaikan dengan regulasi yang baru sehingga Satpol PP belum bisa melakukan penegakan perda tersebut secara efektif, sehingga solusi pemecahaanya melalui Perubahan Perda No 10. Tahun 2011 tentang Minerba menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014, Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 3.3.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.3.1 melalui Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Strategis 4.1.1

Tertanganinya Kejadian Konflik Antar Kelompok Masyarakat, Suku dan Agama

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4.1.1 : Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama dengan satu indikator kinerja persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan tercapai sebesar **105,26%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Persen	95	100	105,26	100	100
Persentase Capaian Sasaran Strategis 4.1.1					**105,26**		**100**

Capaian kinerja Sasaran 4.1.1 pada tahun 2016 sebesar 100% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 5,26%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 100%. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.18

Grafik 3.7
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 4.1.1
dari Tahun 2014-2017

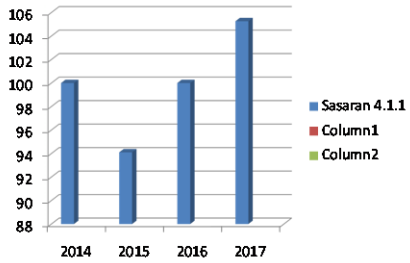

Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 4.1.1 yang telah ditetapkan tersebut didukung dengan anggaran sebagaimana telah diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukungnya antara lain Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 4.1.1 Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama adalah:

1) Menurunnya tingkat kepedulian masyarakat;
2) Meningkatnya apatisme masyarakat dan penyempurnaan terhadap SOP deteksi dini dan penanganan konflik.

Sedangkan alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan melalui :

1) Penyelenggaraan sosialisasi penguatan partisipasi masyarakat
2) Penguatan koordinasi antar Aparat Penegak Hukum
3) Penguatan jaring komunikasi dan koordinasi antar APH
4) Penguatan FKDM dan FKUB

Sasaran Strategis 4.2.1

Meningkatnya Peran Parpol dan Ormas Dalam Proses Demokrasi

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4.2.1 : Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam proses demokrasi dengan satu indikator kinerja Persentase

penggunaan hak pilih dalam pilkada Kab/Kota tercapai sebesar **109,48%** atau kategori **Sangat Baik**

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2.1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017			TARGET AKHIR RPJMD 2018	% CAPAIAN THD TRGT AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Persentase penggunaan hak pilih dalam :	Persen					
	- Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur		-	-	-	75	-
	- Pilkada Kab/Kota		72,88	79,79	109.48	75	106,39
Persentase Capaian Sasaran Strategis 4.2.1					**109,48**		**106,39**

Capaian kinerja Sasaran 4.2.1 pada tahun 2016 sebesar 100% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 tidak terdapat perbedaan, karena capaian kinerja sebesar 100%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 100%. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.7

Grafik 3.7
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 4.2.1
dari Tahun 2014-2017

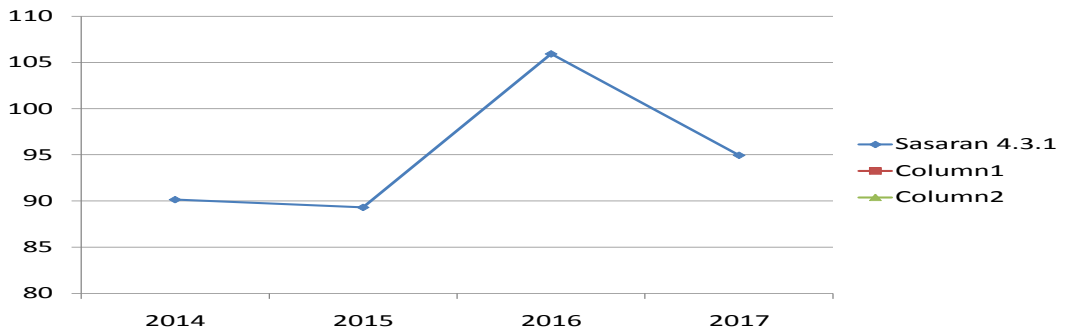

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 4.2.1 Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik adalah :

1. Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintah
2. Pendidikan Politik belum merata
3. Rendahnya penggunaan hak-hak politik masyarakat
4. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik

Solusi pemecahaanya melalui :

1. Pemerataan dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat
2. Mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan mengadakan sosialisasi, pameran, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang politik

Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran strategis 4.2.1 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.2.1 adalah Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat.

Sasaran Strategis 4.3.1

Meningkatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat Yang Dijiwai Oleh Keluhuran Budaya Jawa

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4.3.1 : Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa dengan satu indikator kinerja Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tercapai sebesar **107 %** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	Persen	10,42	11,14	107	10,42	107
Persentase Capaian Sasaran Strategis 4.3.1					**107**		**107**

Capaian kinerja Sasaran 4.3.1 pada tahun 2016 sebesar 100 % dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 0,7%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai sebesar 107 % artinya sudah melampaui target kinerja yang diperjanjikan di akhir perencanaan jangka menengah.

Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.8

Grafik 3.8
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 4.4.1
dari Tahun 2014-2017

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 4.3.1 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa adalah keterbatasan kewenangan pengelolaan kebudayaan di tingkat provinsi, sehingga solusi pemecahaanya melalui pengusulan Peraturan Daerah dalam prolegda pengelolaan cagar budaya.
Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 4.4.1 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.3.1 melalui Program pelestarian dan pengembangan kesenian dan cagar budaya.

Sasaran Strategis 5.1.1

Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5.1.1 : Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan 2 (dua) indikator kinerja Indeks Gini dan Indeks Williamson tercapai sebesar **102,45%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Gini	Indeks	0,341	0,365	93,42	0,337	92,32
2	Indeks Williamson	Indeks	0,6993	0,6272*	111,49*	0,6986	111,38*

Persentase Capaian Sasaran Strategis 5.1.1	**102,45**	**101,85**

Capaian kinerja Sasaran 5.1.1 pada tahun 2016 sebesar 100,17% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 2,72%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 101,85%, pencapaian target kinerja Sasaran 5.1.1 tersebut dilakukan melalui program Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 5.1.1 sebagaimana diurakan pada tabel 3.41

Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.9

Grafik 3.9
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 5.1.1
dari Tahun 2014-2017

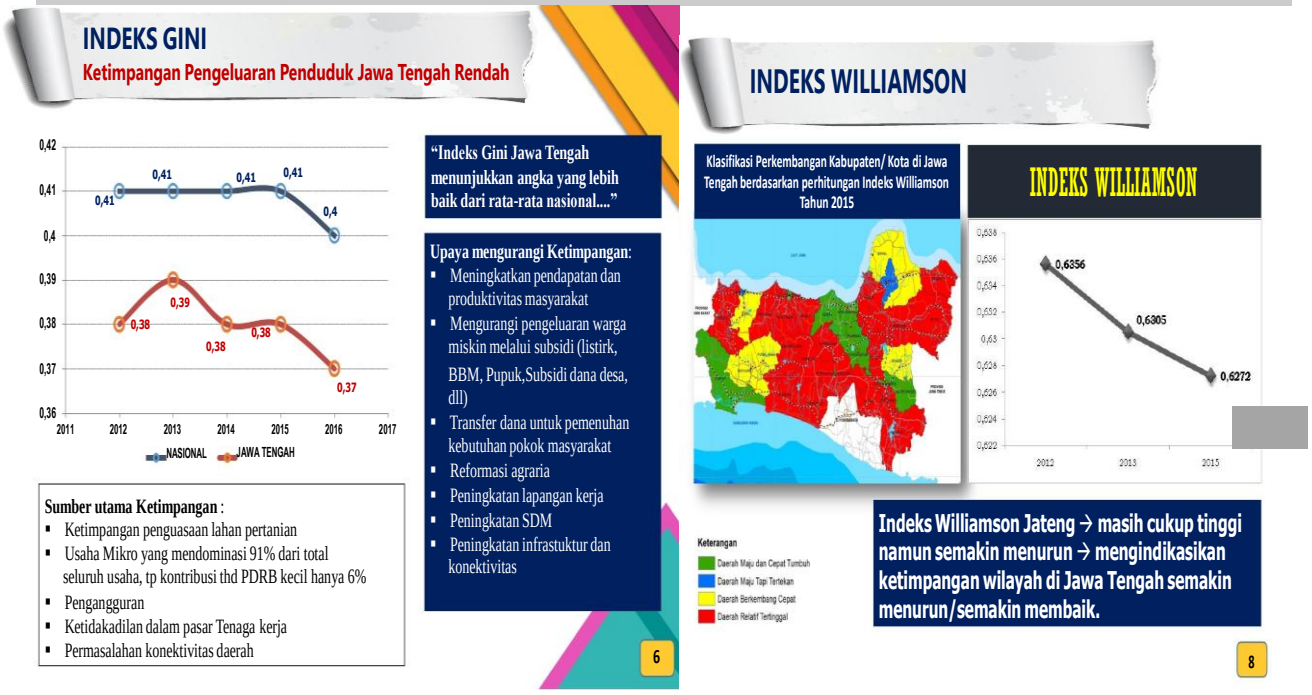

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 5.1.1 Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah :

1) Luas dan beragamnya karakteristik dan potensi Jawa Tengah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya;
2) Terdapat kecenderungan pada daerah perkotaan tingkat pendapatan masyarakatnya cukup tinggi, sementara itu pada beberapa daerah perbatasan antar provinsi cenderung pendapatan masyarakatnya rendah.

Sedangkan alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam mencapai target kinerja sasaran 5.1.1 dangan cara :

1) Memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota (stimulan), pembangunan infrastruktur untuk pengembangan investasi, berdasarkan potensi dan urgensitas masing-masing kab./kota;
2) Mendorong untuk tumbuhnya kerjasama antar kab./kota dalam pengelolaan potensi daerah

Sasaran Strategis 6.1.1

Menurunnya Angka Kematian dan Angka Kesakitan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.1.1 : Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) tercapai sebesar **99,05 %** atau kategori **Baik**.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	74,75	74,04	99,05	75,05	98,65
Persentase Capaian Sasaran Strategis 6.1.1					**99,05**		**98,65**

Capaian kinerja Sasaran 6.1.1 pada tahun 2017 bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 98,65%, realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis 6.1.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.30
Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 6.1.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 6.1.1 melalui :
1) Sumber Dana APBD :
   a) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
   b) Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan ;
   c) Program Pelayanan Kesehatan;
   d) Program Kesehatan Lingkungan;
   e) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   f) Program Promosi dan Pemberdayaan.
   g) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan;
2) Sumber Dana APBN (Dekonsentrasi):

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya kementerian Kesehatan
b) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
c) Program Pembinaan Upaya Kesehatan;
d) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
e) Program Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 6.1.1 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala antara lain

1) Masih tingginya kematian ibu di rumah sakit hal ini menunjukkan bahwa sistem rujukan dari desa ke puskesmas dan rumah sakit masih belum optimal.
2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan masih banyak dijumpai lingkungan yang belum bersih dan sehat.
3) Rasio Puskesmas dibandingkan jumlah penduduk masih kurang.
4) Jumlah rumah sakit rujukan antar daerah Kabupaten/kota masih kurang.
5) Stigma masyarakat terhadap penderita kusta masih tinggi yang mengakibatkan penderita dikucilkan dan malu memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala diatas, maka dilakukan upaya pemecahan dengan alternatif atau solusi sebagai berikut :

1) Penguatan system rujukan dan rumah singgah khususnya untuk ibu hamil risiko tinggi.
2) Optimalisasi gerakan hidup bersih dan sehat mulai dari usia pra sekolah dan kerja bakti di lingkungan RT/RW.
3) Pembangunan Puskesmas baru khususnya Puskesmas mampu persalinan.
4) Pembangunan Rumah Sakit rujukan tingkat Provinsi di wilayah Pati, Magelang dan Tegal.

5) Meningkatkan peran Rumah Sakit Pemerintah dalam upaya penemuan kasus dan pengobatan penderita kusta khususnya di RSUD Tugurejo Semarang dan RSUD Kelet Jepara.

Sasaran Strategis 6.1.2

Menurunnya Drop Out dan Unmet Need serta Meningkatnya Peserta KB Aktif/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.1.2 : Menurunnya Drop out dan Unmet Need serta Meningkatnya peserta KB Aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dengan 3 (tiga) indikator kinerja Persentase *Drop out* Peserta KB, Persentase *Unmet Need dan* Persentase *Contraceptive Prevalence Rate* tercapai sebesar **97,65%** atau kategori **Baik**.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Presentase *drop out* peserta KB	Persen	13,75	13,50*	101	13,50	100
2	Persentase *Unmet Need*	Persen	9,25	9,94*	93,06	9,00	90,5
3	Persentase Contraceptivem Prevalence Rate	Persen	79,50	78,61*	98,88	80	98,26
Persentase Capaian Sasaran Strategis 6.1.2					**97,65**		**96,25**

Capaian kinerja Sasaran 6.1.2 pada tahun 2016 sebesar 125,64% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 27,99 %, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 96,25%. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.10

Grafik 3.10
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 6.1.2
dari Tahun 2014-2017

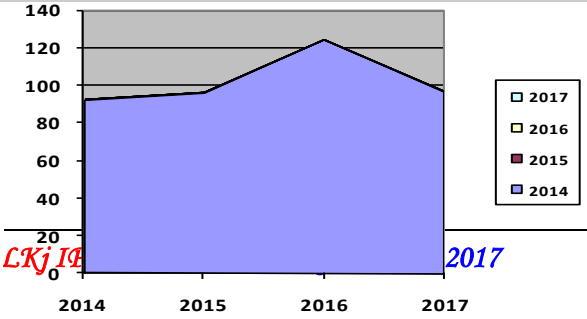

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 6.1.2 Menurunnya Drop out dan

Unmet Need serta Meningkatnya peserta KB Aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrsepsi MKJP dan Masih tingginya *Unmeet Need*, sehingga solusi pemecahaanya melalui Peningkatan kesertaan KB MKJP melalui dukungan pelayanan kepada akseptor keluarga Pra Sejahtera dan KS I, Advokasi kepada Kabupaten/Kota pelatihan PPKBD dalam membantu PLKB penggerakan institusi masyarakat dan penggunaan media KIE kepada masyarakat dan optimalisasi informasi program KB kepada masyarakat melalui mesia KIE dan Penggerakan petugas KB lini lapangan di Kabupaten/Kota, Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 6.1.2 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 6.1.2 melalui :

1) Program Pelayanan Keluarga Berencana;
2) Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
3) Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD.
4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri.
5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Kelompok, Bina Keluarga dan Bina Balita

Beberapa hambatan dan kendala antara lain :

1. Masih tingginya persentase Unmet Need (Pasangan Usia Subur yang tidak ingin punya anak dan ingin anak ditunda tetapi tidak ber KB);
2. Masih tingginya persentase usia perkawinan perempuan pasangan usia subur kurang dari 20 tahun;
3. Menurunnya persentase UPPKS yang ber KB;
4. Kurangnya tenaga PKB/PLKB sebagai ujung tombak dalam pembinaan dan penggerakan KB di lapangan (1 PLKB menangani 3 – 4 Desa).

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan dengan:

1. Penggerakan KB bersama mitra kerja antara lain organisasi masyarakat, TP PKK, TNI dan Polri serta tokoh agama dan tokoh masyarakat;
2. Pemberian uang Transport/uang harian pelayanan KB bagi Akseptor Pra KS dan KS1;
3. Advokasi penggerakan KB di Kabupaten/Kota DO peserta KB Nya tinggi (Sragen, Wonogiri, Kota Tegal, Kebumen, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kudus, Cilacap, Sukoharjo, Jepara, Banyumas, Temanggung, Brebes, Batang, Wonosobo);
4. Peningkatan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS selain upaya pelibatan organisasi masyarakat guna menekan

persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur Kurang dari 20 Tahun;

5. Peningkatan kualitas Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia dalam Peningkatan kesejahteraan keluarga

Sasaran Strategis 6.2.1

Meningkatya Kesempatan Masyarakat Memperoleh Pendidikan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.2.1 : Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dengan 3 (tiga) indikator kinerja Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan APM untuk jenjang SMA/SMALB/MA/Paket C tercapai sebesar **98,76%** atau kategori **Baik**.

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,09	7,15	100,84	7,15	100
2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,05	12,45*	95,40	13,35	93,25
3	APM SMA/SMALB/MA/Paket C	Angka	64	64,02	100,03	66	97
Persentase Capaian Sasaran Strategis 6.2.1					**98,76**		**96,75**

Capaian kinerja Sasaran 6.2.1 pada tahun 2016 sebesar 99,84% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,08 %, hal ini terjadi karena adanya capaian pada indkator lama sekolah yang tidak sesuai target dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 96,75%, Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.25

Grafik 3.11
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 6.2.1
dari Tahun 2014-2017

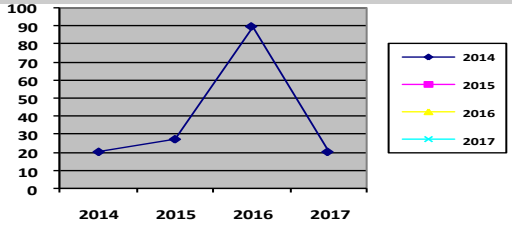

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 6.2.1 Meningkatya kesempatan masyarakat

memperoleh pendidikan adalah adanya fenomena pergeseran usia anak masuk sekolah (banyak dijumpai anak masuk SD berusia kurang 6 tahun), sehingga solusi pemecahaanya melalui sekolah negeri melakukan penerimaan siswa baru berdasarkan usia sesuai ketentuan.

Adapun besaran anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran 6.2.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 6.2.1 melalui Program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Khusus.

Sasaran Strategis 6.2.2

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.2.2 : Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator kinerja Angka kelulusan SMA/ SMALB/MA/ SMK tercapai sebesar **100,01 %** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka kelulusan SMA/SMALB/MA/ SMK	Angka	99,98	99,99	100,01	99,99	99,99
Persentase Capaian Sasaran Strategis 6.2.2					**100,01**		**99,99**

Capaian kinerja Sasaran 6.2.2 pada tahun 2016 sebesar 109,78 %, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 99,99%. Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.12

Grafik 3.12
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 6.2.2
dari Tahun 2014-2017

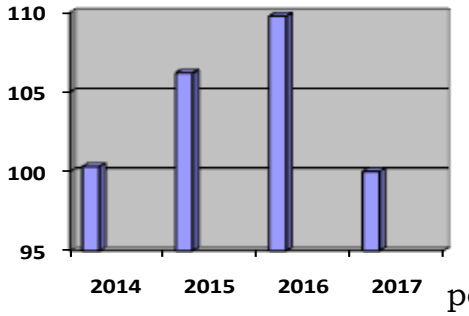

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 6.2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan adalah belum optimalnya partisipasi siswa dalam ujin nasional, sehingga solusi pemecahaanya melalui pembinaan dan pengawalan dari guru terhadap siswa akan pentingnya ujian nasional

Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 6.2.2 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 6.2.2 melalui Program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Khusus.

Sasaran Strategis 6.3.1

Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.3.1 : Meningkatnya budaya baca masyarakat dengan indikator kinerja Pengunjung perpustakaan provinsi per tahun tercapai sebesar **350%** atau kategori **Sangat Baik**

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengunjung Perpustakaan Provinsi per Tahun	Orang	889,811	311.7285	350	934,302	333,65
Persentase Capaian Sasaran Strategis 6.3.1					**350**		**333,65**

Capaian kinerja Sasaran 6.3.1 pada tahun 2016 sebesar 118,40% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 231,6 %, hal ini terjadi karena pengembangan layanan perpustakaan, baik digital maupun layanan langsung ke masyarakat sehingga aksesibilitas semakin mudah, dan bila dibanding

target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 333,65 %, tetapi secara fisik masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan sebagaimana hambatan dan kendala dibawah ini.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 6.3.1 Meningkatnya budaya baca masyarakat adalah:

1. Terbatasnya SDM (Fungsional Pustakawan) untuk melayani perpustakaan di semua titik sehingga layanan perpustakaan belum bisa merata di semua masyarakat yang membutuhkan bahan bacaan;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan terutama koleksi Buku dan Peralatan IT serta mobil keliling sehingga belum bisa maksimal melayani masyarakat;

Solusi pemecahaanya melalui :

1). Melaksanakan Bintek dan Pelatihan bagi pengelola perpustakaan di semua perpustakaan sehingga layanan masyarakat bisa teratasi;
2). Mengadakan penambahan Koleksi yang *Up To Date* serta melengkapi peralatan IT dan menambah jam Layanan Perpustakaan Keliling sehinnga tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi melalui peningkatan minat baca bisa teratasi;

Adapun anggaran pendukung pencapaian target kinerja sasaran 6.3.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 6.3.1 melalui :

1). Program Pengembangan Budaya Baca
2). Program Peningkatan SDM Perpustakaan
3). Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
4). Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan

Sasaran Strategis 6.4.1

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Akses Aman Air Minum, Sanitasi, Perumahan Layak Huni

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.4.1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, perumahan layak huni dengan 4 (empat) indikator kinerja Cakupan layanan air minum perkotaan, Cakupan layanan air minum perdesaan, Cakupan layanan sanitasi dan Rasio rumah layak huni tercapai sebesar **102,08%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.4.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan layanan air minum perkotaan.	Persen	78,00	80,98	103,82	79,50	101,86
2	Cakupan layanan air minum perdesaan	Persen	71,00	72,80	102,54	72,50	100,41
3	Cakupan layanan sanitasi	Persen	80,00	80,00	100	81,50	98,15
4	Rasio rumah layak huni	Persen	78,74	80,31	101,99	78,78	101,94
Persentase Capaian Sasaran Strategis 6.4.1					**102,09**		**100,59**

Foto : Pembuatan Embung Kedung Waduk

Capaian kinerja Sasaran 6.4.1 pada tahun 2016 sebesar 111,50 % dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 9,42 %, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 100,59%

Anggaran pendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis 6.4.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3... Adapun program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 6.4.1 melalui Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi serta program Pembangunan Perumahan.

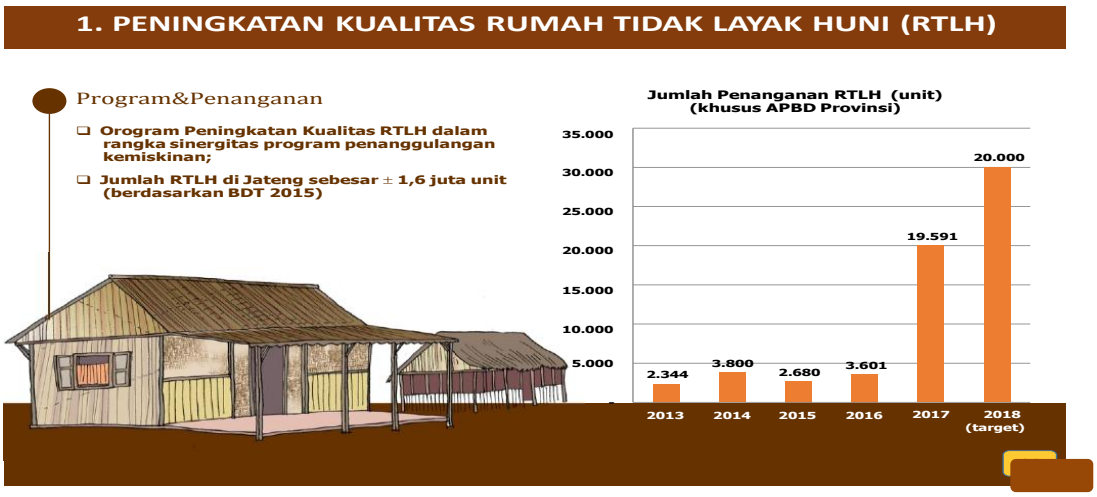

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 6.4.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, perumahan layak huni adalah : Terbatasnya akses Rumah Tangga Miskin untuk menempati Rumah Layak Huni. berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah sebesar 1.682.723 unit; Jumlah Backlog Perumahan di Jawa Tengah cukup tinggi yakni sebesar 1.256.551 unit rumah (Backlog Keberpenghunian 503.703 unit dan Backlog Kepemilikan 752.848 unit);

Masih banyaknya kebutuhan akan rumah karena peningkatan jumlah kelurga (KK), sedang di lain pihak lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan dan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah; Dibutuhkan penyedia perumahan utamanya terkait dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sehingga solusi pemecahaanya melalui :

1. Program dan Rencana Aksi kegiatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena kendala Skema Pola Penganggaran. Untuk Bantuan Sosial hanya bisa dilaksanakan untuk kegiatan bantuan material RTLH dan kegiatan yang lain dilaksanakan dalam bentuk Studi Identifikasi;
2. Perlu adanya Pembangunan Rusun untuk MBR dan Pekerja;
3. Perlu Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota duduk bersama untuk saling berkomunikasi dan koordinasi dalam rencana aksi penyelesaian RTLH

Sasaran Strategis 6.5.1

Meningkatnya Kinerja Layanan Jaringan Irigasi dan Ketersedian Air Baku Serta Partisipasi Masyarakat

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6.5.1 : Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersedian air baku serta partisipasi masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja Persentase jaringan irigasi baik dan Persentase pemenuhan kebutuhan air baku tercapai sebesar **100%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.5.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase jaringan irigasi baik	Persen	80	80	100	82	97,56
2	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	Persen	58,50	58,50	100	60,80	96,22
Persentase Capaian Sasaran Strategis 6.5.1					**100**		**96,99**

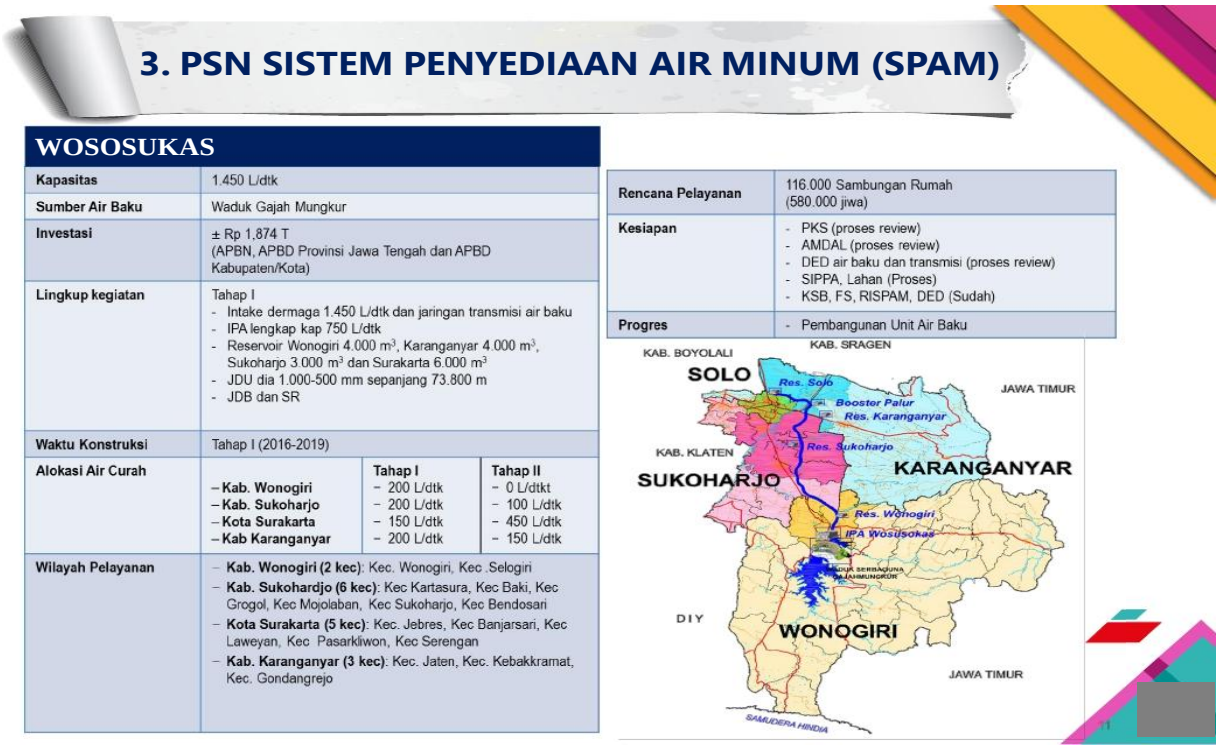

Capaian kinerja Sasaran 6.5.1 pada tahun 2016 sebesar 101,11 % dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,11%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 96,99%, untuk mencapai sasaran 6.5.1 didukung dengan anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung antara lain :

1). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
2). Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3). Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.29

Grafik 3.13
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 6.5.1
dari Tahun 2014-2017

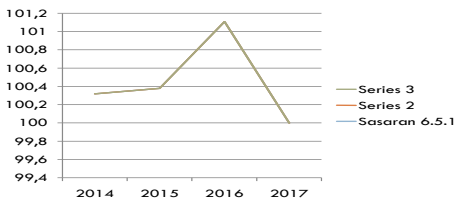

Adapun Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran 6.5.1 tersebut antara lain :

Kesempatan pengambilan Uang Muka / penarikan Termin belum/ tidak dimanfaatkan oleh Penyedia Jasa dan Ada beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan dikarenakan adanya keterlambatan pabrikasi bahan serta menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan jadwal pengeringan sehingga **solusi** yang harus dilakukan ke depan adalah :

1. Mengundang Para Penyedia Jasa yang telah menandatangani kontrak diberi pengarahan dan dihimbau agar segera mengambil Uang Muka.
2. Kepada Penyedia Jasa yang telah memenuhi progres cukup besar diharapkan segera mengambil Termin.
3. Perlu pula mengingatkan kepada Penyedia Jasa agar segera melakukan Akselerasi/percepatan pekerjaan dengan menambah jumlah tenaga kerja untuk memacu keterlambatannya hingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

Sasaran Strategis 7.1.1

Meningkatnya Kinerja Penanganan Jalan dan Jembatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7.1.1 : Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan dengan 4 (empat) indikator kinerja Persentase panjang jalan dalam kondisi baik, Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m, Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton) dan Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik tercapai sebesar **100 %** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	Persen	88,92	88,92	100	89,60	99,24
2	Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m	Persen	77,46	77,46	100	77,87	99,47
3	Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	Persen	79,63	79,63	100	82,30	96,75
4	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	Persen	83,61	83,61	100	60,00	139,35
Persentase Capaian Sasaran Strategis 7.1.1					**100**		**108,70**

Capaian kinerja Sasaran 7.1.1 pada tahun 2016 sebesar 106,07% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 6,07%, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 108,07%

No Ruas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nama Ruas	Pejagan - Pemalang	Pemalang - Batang	Batang-Semarang	Semarang - Solo	Solo - Ngawi	Ngawi - Kertosono	Mojokerto-Jombang-Kertosono	Mojokerto - Surabaya	Gempol – Pasuruan	Pasuruan – Probolinggo
Badan Usaha	PTPejagan Pemalang Tol Road	PT Pemalang Batang Tol Road	PT Jasamarga Semarang Batang	PTTransmarga Jateng	PTSolo Ngawi Jaya	PTNgawi Kertosono Jaya	PTMarga Harjaya Infrastruktur	PTMarga Nujayasumo Agung	PTTrans Jatim Pauruan	PTTrans Jawa Paspro Jalan Tol
Panjang (km)/ Jumlah Seksi	57,50/4	39,20/2	75,00/5	72,64/5	90,10/4	87,02/4	40,50/4	36,47/5	34,15/3	31,30/3
Biaya Investasi (Rp. Triliun)	6,84	4,08	11,05	7,30	5,14	3,83	3,48	3,79	2,77	3,55
Biaya Konstruksi (Rp. Triliun)	3,39	2,27	7,66	3,11**)	3,20	2,36	2,38	1,83	0,256	1,56
Progres Tanah Bebas	99,41%	92,07%	76,34%	97,69%	93,07%	97,96%	100,00%	100,00%	76,47	96,85
Progres Konstruksi	65,66% (Operasi Seksi I&II)	19,42%	24,95%	59,96% (Operasi Seksi Semarang-Bawen)	Total 74,88% / Pmrnth 98,21% / BUJT 67,78 %.	Total 43,14 % / Pmrnth 9,70% / BUJT 69,83%	86,40% (Operasi Seksi 1 & 3)	82,82% (Operasi Seksi IA, Seksi IV)	45,4%	9,22%
Target Selesai Konstruksi	2017	2018	2017- 2018	2017- 2018	2017	2017- 2018	2017	2017	2017- 2019	2019

**) tidak termasuk dukungan Pemerintah

Keterangan : Cikampek-Palimanan beroperasi tanggal 13 Juni 2015;
Kanci-Pejagan beroperasi tanggal 26 Januari 2010

Perkembangan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2013-2018 selama empat tahun terkahir sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.30

Grafik 3.14
Perkembangan Pencapaian Sasaran Stratgis 7.1.1
dari Tahun 2014-2017

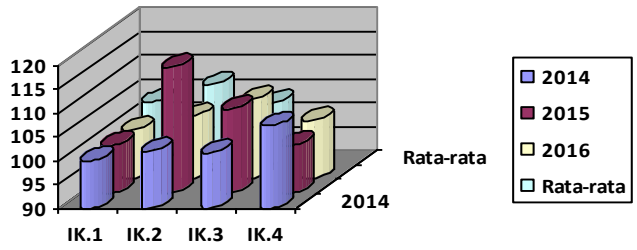

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 7.1.1 Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan serta partisipasi masyarakat adalah :

1) Kendaraan yang membawa muatan melebihi tonase yang ditetapkan tidak terkendali, sehingga berakibat pada rusaknya jalan sebelum umur teknis jalan tercapai.
2) Penanganan jalan dengan lebar lebih dari 6 m memerlukan lahan yang banyak, sehingga perlu pembebasan tanah.
3) Kurangnya tenaga teknis di bidang kebinamargaan dibandingkan dengan banyaknya infrastruktur yang ditangani.
4) Belum terintegrasinya sistem informasi jalan baik pusat, provinsi dan kab/kota.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan melalui :

1) Perlu sinergi antara binamarga, perhubungan dan perindustrian dalam regulasi yang mengatur tonase kendaraan, aspek keselamatan jalan dan kalaikan jalan;
2) Mengintensifkan musyawarah harga dan mempercepat penaksiran nilai tanah, bangunan dan tanaman melalui apraisal;
3) Mengusulkan pengadaan dan pengangkatan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan;
4) Perlu sinkronisasi sistem informasi jalan baik tingkat pusat, provinsi dan kab/kota, sehingga terbentuk jaringan jalan yang terintegrasi.

Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 7.1.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 7.1.1 melalui :

1. Program peningkatan jalan dan penggantian jembatan
2. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Sasaran Strategis 7.2.1

Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi Moda serta Keselamatan Transportasi

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7.1.1 : Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi Moda serta Keselamatan transportasi dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Prasarana Keselamatan Jalan Provinsi tercapai sebesar 100 **%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.2.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	Persen	54,00	54,00	100	60,00	90
Persentase Capaian Sasaran Strategis 7.2.1					**100**		**90**

Capaian kinerja Sasaran 7.2.1 bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 90%. Besaran dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 7.2.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung antara lain :

1) Program Pengembangan Perhubungan Darat;
2) Program Pengembangan Perhubungan Laut;

Dari ketiga program yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 3.1.2 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya :

1) Masyarakat dan stakeholder yang kurang mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan Angkutan Umum Massal;
2) Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan pengelolaan angkutan umum massal harus berbadan hukum;

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan melalui :

1) Sosialisasi manfaat dan dampak positif angkutan umum massal dan mengajak stakeholder untuk ikut berpartisipasi;

2) Melakukan restrukturisasi kelembagaan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengkaji ulang target renstra dan RPJMD.

Sasaran Strategis 7.3.1

Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7.3.1 : Terwujudnya pembangu-nan berwawasan lingkungan dengan 3 (tiga) indikator kinerja Luas ruang terbuka hijau diwilayah perkotaan, Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tercapai sebesar **90,21%** atau kategori **Baik**.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan	Ha	40	40	100	40	80
2	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	25,00	28,59	114	30	95,30
3	Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,83	0,47	56,63	0,93	50,54
Persentase Capaian Sasaran Strategis 7.3.1					**90,21**		**75,28**

Capaian kinerja Sasaran 7.3.1 pada tahun 2016 sebesar 103,17 % dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 12,96 %, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 baru tercapai sebesar 75,28 %, Penurunan pada sasaran ini disebabkan indikator pada Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 9,8% dibanding Tahun 2016, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan penundaan seluruh tebangan kayu jati untuk menjaga keseimbangan *supply dan demand*.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 7.3.1 Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan adalah :

1. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah pemanfaatan potensi sumberdaya hutan belum optimal. Hasil hutan kayu di Jawa Tengah belum mampu memenuhi kebutuhan industri hasil hutan, sedangkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan masih banyak yang belum dimanfatkan.
   Solusi pemecahaanya melalui :
   Memantapkan ketersediaan 10 jenis prioritas bahan baku industri hasil hutan, pengembangan 3 hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan dan pengembangan wisaata alam

Aksi Penanaman dalam rangka rehabilitasi mangrove di Pantai Maron, Semarang

   Adapun anggaran pendukung untuk mencapai target kinerja sasaran 7.3.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung 7.3.1 melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan serta Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
   1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
   2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
   3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
   4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
   5) Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan;
   6) Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan;

Sasaran Strategis 7.4.1

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7.4.1 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan indikator kinerja jumlah desa tangguh bencana tercapai sebesar **106,45%** atau kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.4.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Desa tangguh bencana	Desa	62	66	106,45	68	97,06
Persentase Capaian Sasaran Strategis 7.4.1					**106,45**		**97,06**

Capaian kinerja Sasaran 7.4.1 pada tahun 2016 sebesar 100% dibanding capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 6,45 %, dan bila dibanding target akhir RPJMD tahun 2018 sudah tercapai 97,06 %. Peningaktan capaian kinerja Sasaran 7.4.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dipengaruhi sinergitas menejemen kebencanaan antar Kabupaten/Kota dan dukungan lembaga non pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana.

Adapun anggaran pendukung pencapaian target kinerja sasaran 7.4.1 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.41, sedangkan program pendukung untuk pencapaian kinerja Sasaran 7.4.1 melalui Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Dari kedua program yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis 7.4.1 tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya :

1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional untuk penanggulangan bencana;
2) Pemahaman/persepsi terhadap regulasi baru bidang kebencanaan yang belum seragam.
3) Belum terintegrasinya antar komponen yang terlibat dalam penanganan bencana;
4) Kurangnya tenaga teknis kebencanaan.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan melalui :

1) Perlu menambah kelengkapan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana;
2) Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi Regulasi terbaru kepada stakeholder dan Kab/Kota

3) Perlu melakukan simulasi sinergitas penanganan bencana, agar pada saat terjadi bencana tim penanggulangan bencana siap siaga secara taktis menangani korban bencana.
4) Perlu segera dilakukan pemenuhan tenaga teknis kebencanaan;

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 sebagaimana tabel 3.77 dibawah ini :

Tabel 3.41
Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017 *(unaudited) Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2017*

No.	Uraian	Target Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
4	**PENDAPATAN**	**23.613.056.128.000,00**	**23.637.371.398.866,00**	**100,10**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**12.126.880.430.000,00**	**12.482.448.040.929,00**	**102,93**
4.1.1	Pajak Daerah	10.216.892.000.000,00	10.573.202.005.610,00	103,49
4.1.2	Retribusi Daerah	101.608.925.000,00	107.056.931.781,00	105,36
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	371.233.579.000,00	371.112.481.501,00	99,97

No.	Uraian	Target Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.437.145.926.000,00	1.431.076.622.037,00	99,58
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**11.399.678.255.000,00**	**11.067.786.491.093,00**	**97,09**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1.007.260.893.000,00	848.309.911.393,00	84,22
4.2.2	Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000,00	3.652.586.431.000,00	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	6.739.830.931.000,00	6.566.890.148.700,00	97,43
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**86.497.443.000,00**	**87.136.866.844,00**	**100,74**
4.3.1	Pendapatan Hibah	36.299.500.000,00	36.938.923.844,00	101,76
4.3.7	Dana Insentif Daerah	50.197.943.000,00	50.197.943.000,00	100
5	**BELANJA**	**23.955.179.003.000,00**	**22.857.700.615.831,00**	**95,42**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**18.081.908.866.000,00**	**17.548.267.443.848,00**	**97,05**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.718.026.792.000,00	5.622.988.624.641,00	98,34
5.1.4	Belanja Hibah	5.099.260.775.000,00	4.920.624.483.818,00	96,50
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	242.865.000.000,00	239.499.500.000,00	98,61
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.893.724.400.000,00	4.812.323.251.641,00	98,34
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.110.531.899.000,00	1.951.700.633.748,00	92,47
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000,00	1.130.950.000,00	6,46
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**5.873.270.137.000,00**	**5.309.433.171.983,00**	**90,40**
5.2.1	Belanja Pegawai	494.560.051.000,00	461.318.637.266,00	93,28
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.784.187.865.000,00	3.408.017.278.505,00	90,06
5.2.3	Belanja Modal	1.594.522.221.000,00	1.440.097.256.212,00	90,32
	Jumlah	**23.955.179.003.000,00**	**22.857.700.615.831,00**	**95,42**
	Surplus/(Defisit)	**(342.122.875.000,00)**	**779.670.783.035,00**	**(227,89)**

No.	Uraian	Target Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**342.122.875.000,00**	**342.575.639.754,00**	**100,13**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**646.122.875.000,00**	**646.575.639.754,00**	**100,07**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	646.122.875.000,00	646.122.875.158.,00	100
6.1.2			452.764.596,00	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**304.000.000.000,00**	**304.000.000.000,00**	**100**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	154.000.000.000,00	154.000.000.000,00	100
	Pembiayaan Neto	**342.122.875.000,00**	**342.575.639.754,00**	**100,13**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**1.122.246.422.789,00**	

a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang paling utama berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun anggaran 2017 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Berdasarkan hasil rangkuman laporan dari OPD Provinsi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan laporan dari Bappeda Kabupaten/Kota kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan III Tahun 2017 digambarkan sebagai berikut:

1) Alokasi Anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp. 1.242.407.900.000,- diampu oleh 20 OPD. Target dan Realisasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi adalah sebagai berikut: target keuangan: 63,16 % realisasi keuangan 58,03 % (deviasi -5,13%) dan target fisik 64,80 % realisasi fisik 64,49 % (deviasi -0,83 %).
2) Alokasi Anggaran kegiatan Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp. 473.689.710.000,- Target keuangan: 61,58 % realisasi keuangan 57,42 % (deviasi keuangan: - 4,16 %) dan target fisik 62,77 % realisasi fisik 61,54 % (deviasi fisik: - 1,19 %);
3) Alokasi Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp. 768.718.280.000,- Target keuangan 71,55 % realisasi keuangan 58,03 % (deviasi keuangan: - 13,88 %) dan target fisik 74,10 % realisasi fisik 75,45 % (deviasi fisik: 1,35 %);
4) Alokasi Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (30 Kab/Kota) Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp. 345.532.378.000,- target keuangan: 54,21 % realisasi keuangan 49,01 % (deviasi keuangan: - 5,20 %) dan target fisik 55,66 % realisasi fisik 52,26 % (deviasi fisik: - 3,40 %).

Proporsi total anggaran APBN di Jawa Tengah yang bersumber dari dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan III Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.587.940.368.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.842.971.000,- menjadi Rp. 1.652.783.339.000,- pada triwulan IV Tahun Karena adanya perubahan DIPA pada masing-masing OPD dan Kabupaten/Kota yang menerima Dekonsentrasi ataupun Tugas Pembantuan. Alokasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 dapat digambarkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 3.42
Total Pagu Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2017

JENIS ANGGARAN	Anggaran TW III (000)	Anggaran TW IV (000)	Perubahan (000)
I. DK dan TP Provinsi	**Rp 1.242.407.990**	**Rp 1.188.061.012**	**Rp 64.842.971**
a. Dekonsentrasi	Rp 473.689.710	Rp 431.036.852	Rp 42.652.858
b. TP Provinsi	Rp 768.718.280	Rp 757.024.160	Rp 11.694.120
II. TP Kabupaten/Kota	**Rp 345.532.378**	**Rp 464.722.327**	**Rp 119.189.949**
JUMLAH	**Rp 1.587.940.368**	**Rp 1.652.783.339**	**Rp 184.032.920**

Sumber : BAPPEDA LITBANG Provinsi Jawa Tengah 2017

Total Alokasi Anggaran APBN Triwulan IV Tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.652.783.339.000,- dalam pelaksaanaan kegiatan target dan realisasi capaian adalah sebagai berikut : target keuangan sebesar 86,66 % realisasi 79,93 % (deviasi - 6,48 %) target fisik 87,30 % realisasi 84,74 % (deviasi : - 2,94 %)

a) Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Alokasi Anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017 sebesar Rp. 1.188.061.012.000,- diampu oleh 20 OPD yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Sosial, Disdikbud, Diskop UKM, Disnakertrans, Distanbun, DPPPA DALDUK KB, DKP, Dispermades Dukcapil, DLHK, Dishanpan, Disporapar, DPMPTSP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Target dan Realisasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Opd di lingkungan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: target keuangan: 94,45 % realisasi keuangan 88,86 % (deviasi – 5,10%) dan target fisik 95,21 % realisasi fisik 96,74 % (deviasi – 0,78 %) seperti digambarkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut.

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017

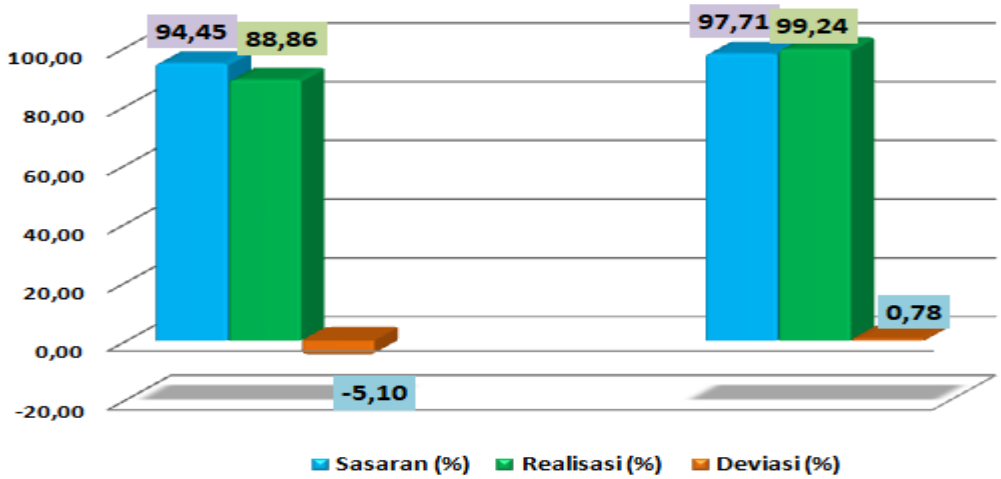

Target dan realisasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017 masing-masing OPD ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut 3.43

TABEL 3.43
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TA. 2017

NO	NAMA OPD	ANGGARAN TW II (Rp. 000)			KEUANGAN			FISIK		
		DEKON	TP	TOTAL	(%)	R (%)	DEV	S (%)	R (%)	DEV
1	BAPPEDA	738.731		738.731	100,00	90,29	-9,71	100,00	100,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	56.104.845		56.104.845	100,00	92,09	-7,91	100,00	100,00	0,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.484.573		6.484.573	100,00	88,02	-11,98	100,00	100,00	0,00
4	Dinas Sosial	33.371.836		33.371.836	98,64	98,15	-0,49	100,00	100,00	0,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	25.399.347		25.399.347	100,00	95,21	-4,79	100,00	99,12	-0,88
6	Dinas Koperasi UKM	5.069.585		5.069.585	100,00	97,16	-2,84	100,00	100,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.549.319		8.549.319	91,54	91,93	-0,39	91,54	99,06	-7,52
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan	128.682.299	401.024.162	529.706.461	70,65	87,15	16,50	86,93	96,14	9,21
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB	3.250.000		3.250.000	100,00	96,45	-3,55	100,00	100,00	0,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.628.015	1.000.000	4.628.015	100,00	90,42	-9,58	100,00	100,00	0,00
11	Dinas Permades Dan Dukcapil	118.638.538		118.638.538	75,65	72,39	-3,26	75,65	98,04	22,39
12	Dinas LH DAN Kehutanan	3.777.200		3.777.200	100,00	94,62	5,38	100,00	100,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	24.801.180		24.801.180	100,00	88,00	-12,00	100,00	99,44	-0,56
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		105.324.437	105.324.437	90,00	73,33	-16,67	100,00	93,00	-7,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	9.341.413		9.341.413	100,00	69,23	-30,77	100,00	100,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	450.000		450.000	100,00	99,99	-0,01	100,00	99,99	-0,01

	Satu Pintu									
17	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.169.778		2.169.778	100,00	96,28	-3,72	100,00	100,00	0,00
18	Dinas PU, SDA dan Penataan Ruang		94.102.628	94.102.628	100,00	97,12	-2,88	100,00	100,00	0,00
19	Dinas PU, Binamarga dan Ciptakarya		155.572.933	155.572.933	100,00	99,32	-0,68	100,00	100,00	0,00
20	Biro Pemerintah, Otda Dan Kerjasama Setda Prov Jateng	580.193		580.193	62,50	59,95	-2,55	100,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**431.036.852**	**757.024.160**	**1.188.061.012**	**94,45**	**94,45**	**-5,10**	**96,74**	**97,71**	**0,78**

Dilihat dari tabel tersebut diatas Deviasi dari OPD penerima Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak terpaut jauh dengan target yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD. Total anggaran TW IV sebesar Rp. 1.188.061.012.000,- dan target keuangan sebesar 94,45 % realisasi keuangan 88,86 % (deviasi -5,10 %) dan target fisik 95,21 % realisasi fisik 96,74 % (deviasi + 0,78 %).

Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 per OPD seperti digambarkan pada Gambar 3. .. sebagai berikut.

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan OPD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017

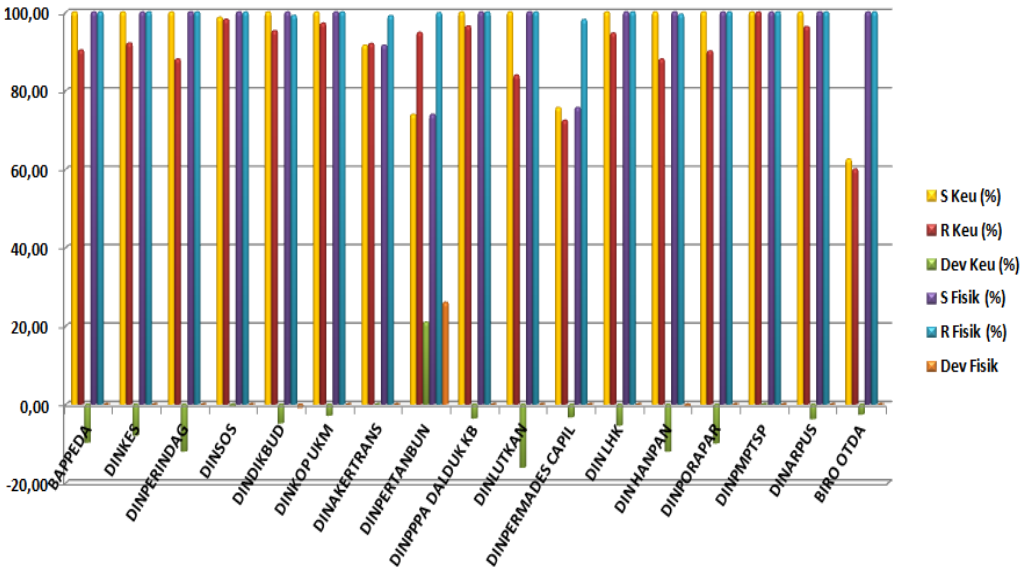

Alokasi Anggaran kegiatan Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 431.036.852.000,- Target keuangan: 94,25 % realisasi keuangan 89,96 % (deviasi keuangan: - 4,31 %) dan target fisik 90,65 % realisasi fisik 93,85 % (deviasi fisik: 1,44 %) seperti digambarkan pada Gambar 3.3

Gambar 3.3
Target Dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi OPD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun Anggaran 2017

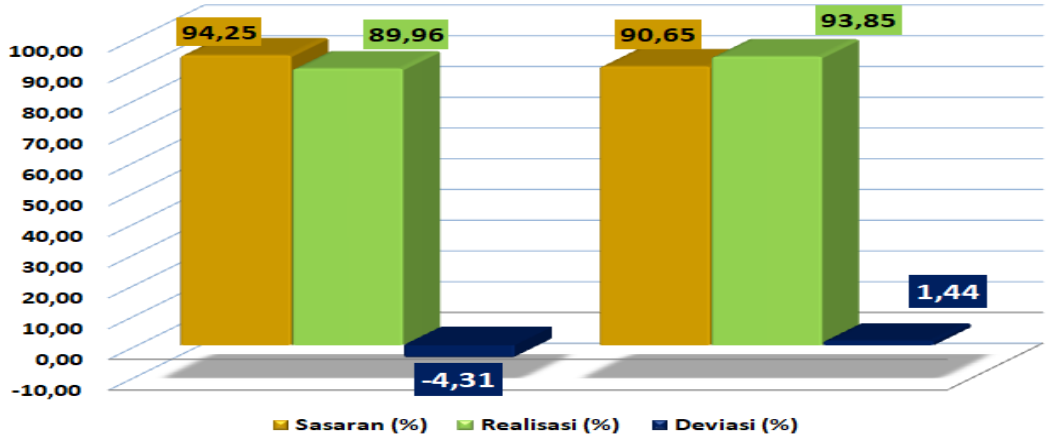

Alokasi Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV Tahun 2017 sebesar Rp. 757.024.160.000,- Target keuangan 91,49 % realisasi keuangan 89,24 % (deviasi keuangan: - 10,75 %) dan target fisik 100 % realisasi fisik 97,09 % (deviasi fisik: -2,91 %) seperti digambarkan pada Gambar 3.4

Gambar 3.4
Target dan Realisasi Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan OPD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017

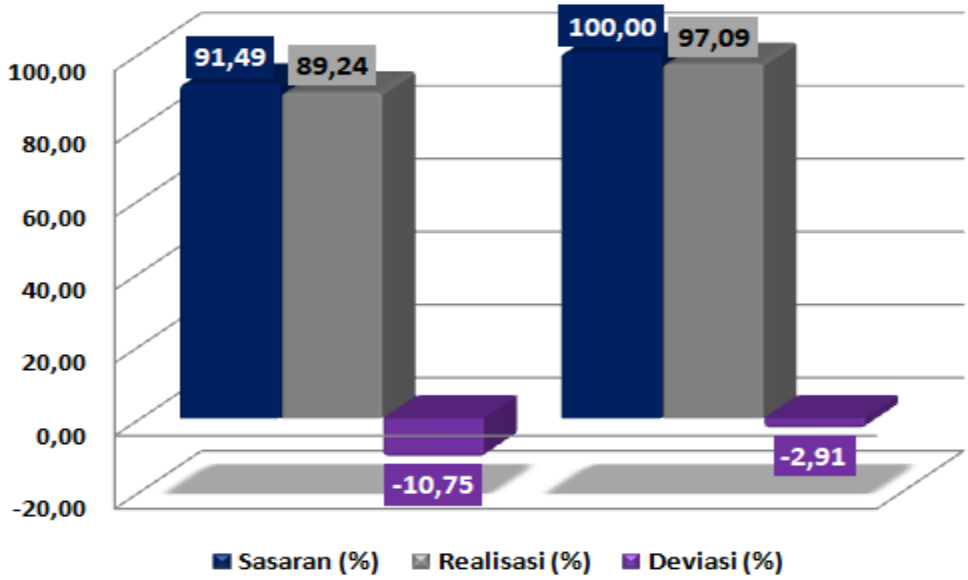

Target dan realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan OPD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017 masing-masing OPD ditampilkan dalam Tabel 3.44 sebagai berikut :

Tabel 3.44
Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan OPD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017

NO	NAMA OPD	PAGU (Rp. 000)	KEUANGAN (%)			FISIK (%)		
			S	R	D	S	R	D
1	DISNAK KESWAN	105.324.437	90,00	73,33	-22,86	100,00	93,00	-7,00
2	DIN PU SDA DAN TARU	94.102.628	100,00	97,12	-6,17	100,00	100,00	0,00
3	DIN PERTANBUN	401.024.162	67,44	79,50	-20,97	100,00	92,46	-7,54
4	DIN LUTKAN	1.000.000	100,00	96,95	-3,05	100,00	100,00	0,00
5	DINAS PU, BINAMARGA DAN CIPTAKARYA	155.572.933	100,00	99,32	-0,68	100,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**757.024.160**	**91,49**	**89,24**	**-10,75**	**100,00**	**97,09**	**-2,91**

Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan OPD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV TA. 2017 dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.5 sebagai berikut :

Gambar 3.5
Target Dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan OPD Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2017

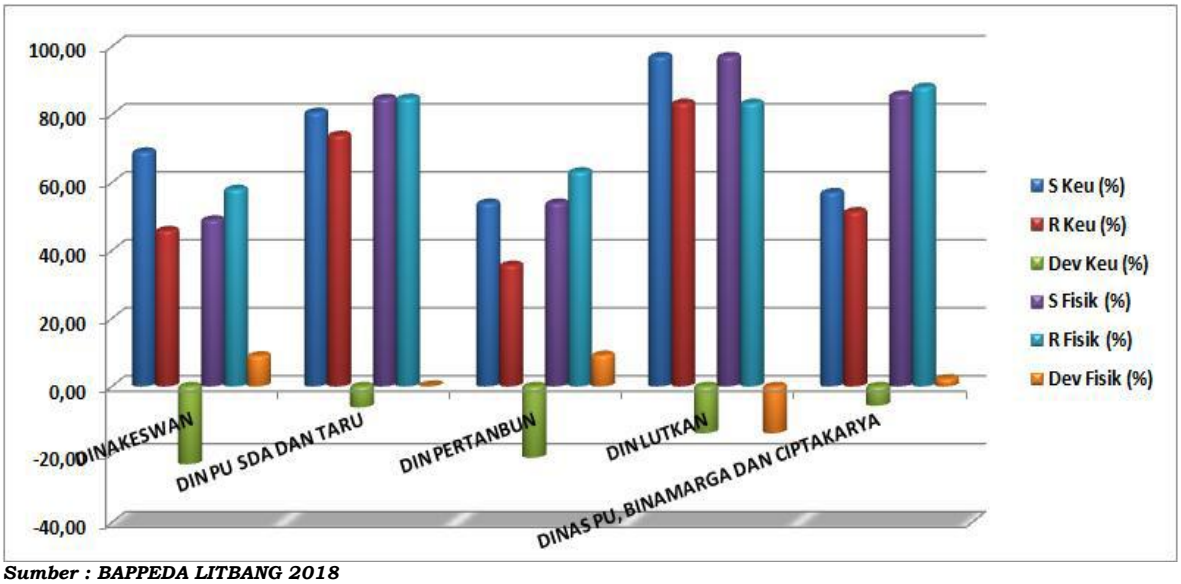

Sumber : BAPPEDA LITBANG 2018

b) Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (30 Kab/Kota) Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 464.722.327.000,- target keuangan: 78,87 % realisasi keuangan 71,01 % (deviasi keuangan: - 7,86 %) dan target fisik 79,39 % realisasi fisik 72,73 % (deviasi fisik: - 6,66 %) seperti digambarkan pada Gambar 3.6 sebagai berikut:

Gambar 3.6
Target Dan Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2017

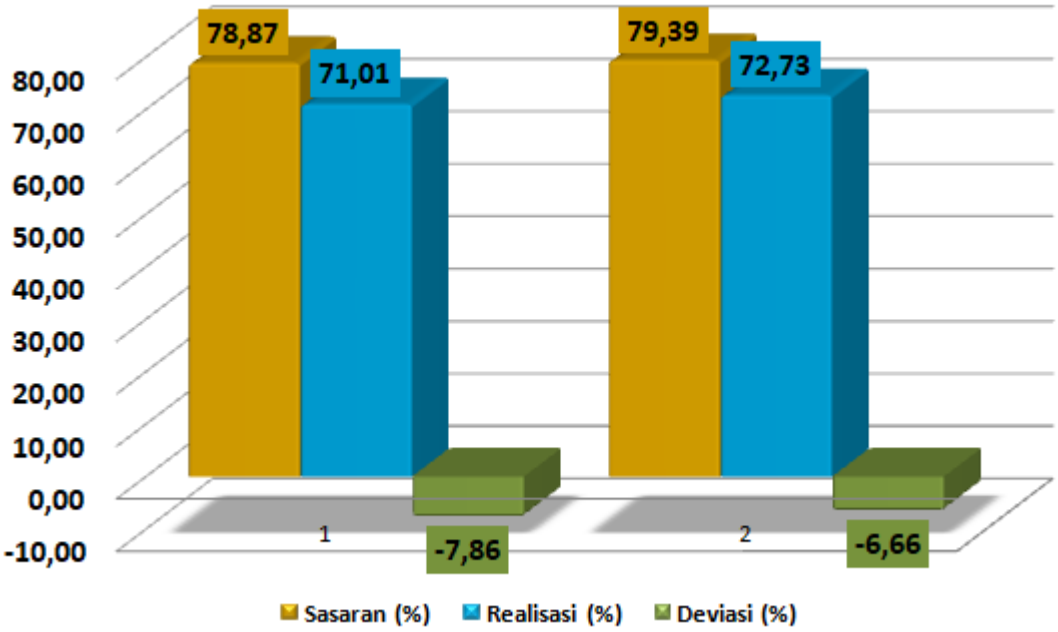

Target dan realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2017 masing-masing Kabupaten/Kota ditampilkan dalam Tabel 3.45 sebagai berikut :

Tabel 3.45
Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota per Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2017

NO	KAB/KOTA	PAGU (Rp. 000)	KEUANGAN (%)			FISIK (%)		
			S	R	D	S	R	D
1	Cilacap	950.000	100,00	98,48	-1,52	100,00	100,00	0,00
2	Banyumas	7.826.280	100,00	42,78	-57,22	100,00	37,26	-62,74
3	Purbalingga	10.231.580	100,00	100,00	0,00	100,00	97,35	-2,65
4	Banjarnegara	12.099.780	94,88	94,72	-0,16	93,93	92,74	-1,19
5	Kebumen	7.739.180	100	98,76	-1,24	100	100	0,00
6	Purworejo	12.005.000	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
7	Wonosobo	9.667.780	100,00	98,42	-1,58	100,00	97,62	-2,38
8	Magelang	24.651.580	100	95,21	-4,79	100	99,74	-0,26
9	Boyolali	23.000.692	76,92	76,92	0,00	95,35	95,49	0,13
10	Klaten	1.639.180	98,62	98,62	0,00	100,00	100,00	0,00
11	Sukoharjo	1.278.980	98,52	94,22	-4,30	98,52	97,94	-0,58
12	Wonogiri	1.519.480	100,00	96,72	-3,28	100,00	100,00	0,00
13	Karanganyar	20.655.378	100	40,14	-59,86	100	41,41	-58,59
14	Sragen	12.421.292	99,33	98,96	-0,37	100	99,86	-0,14
15	Grobogan	11.825.287	100,00	94,00	-6,00	100,00	100,00	0,00
16	Blora	10.597.972	100,00	97,62	-2,38	100,00	70,62	-29,38
17	Rembang	16.628.080	97,26	83,81	-13,45	100,00	100,00	0,00

18	Pati	29.188.212	96,37	96,79	0,42	100	100	0,00
19	Jepara	8.378.080	100,00	99,60	-0,40	100,00	100,00	0,00
20	Demak	25.749.030	100,00	95,49	-4,51	100,00	100,00	0,00
21	Semarang	1.246.580	100	94,87	-5,13	100,00	100	0,00
22	Temanggung	72.820.624	100,00	84,45	-15,55	100,00	75,00	-25,00
23	Kendal	13.958.980	100	54,8	-45,20	87,95	92,86	4,91
24	Batang	4.670.000	100,00	98,55	-1,45	100,00	100,00	0,00
25	Pekalongan	6.849.280	100,00	96,23	-3,77	100,00	100,00	0,00
26	Pemalang	477.206	99,00	99,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27	Tegal	1.070.680	100,00	98,57	-1,43	100,00	45,00	-55,00
28	Brebes	14.645.680	100	66,54	-33,46	100,00	87,14	-12,86
29	Kota Semarang	100.929.504	100,00	73,70	-26,30	100,00	79,28	-20,72
30	Kota Salatiga	950.000	100,00	97,00	-3,00	100,00	100,00	0,00
JUMLAH		**465.671.377**	**78,87**	**71,01**	**-7,86**	**79,39**	**72,73**	**-6,66**

Target dan realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2017 masing-masing Kabupaten/Kota digambarkan pada Gambar 3.7 sebagai berikut :

Gambar 3.7
Target dan Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Per Kabupaten /Kota Triwulan IV Tahun 2017

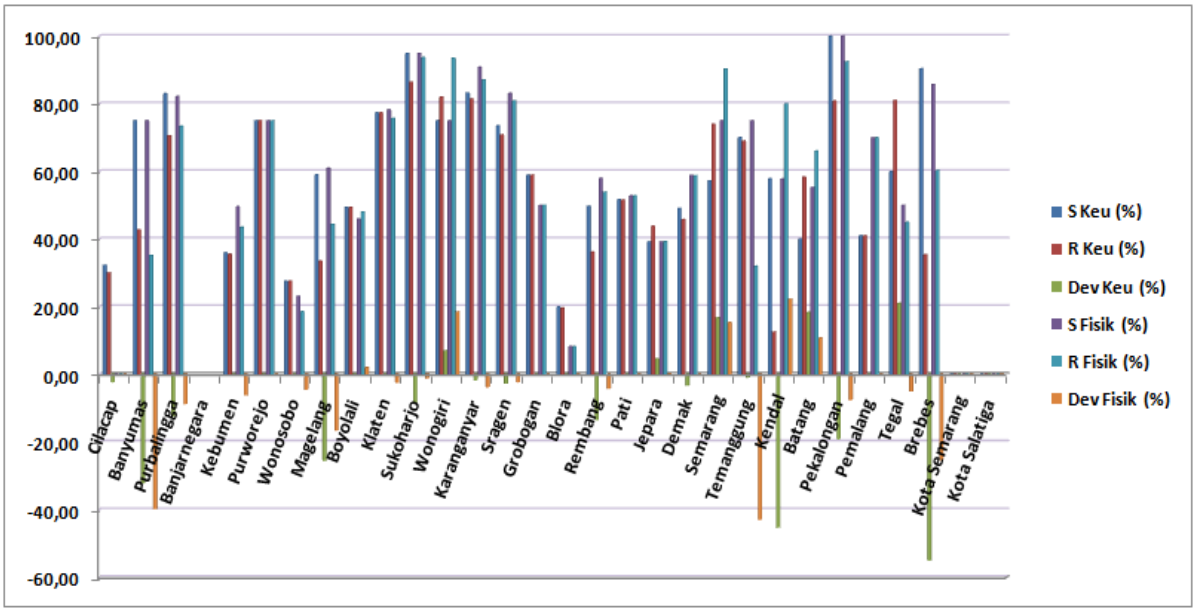

Dibawah ini disampaikan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun 2017 sebagaimana tabel 3.9

Tabel 3.40
Penyerapan Anggaran per Program tahun 2017

No	Program	Pagu	Realisasi	Efisiensi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.919.169.000	462.741.673.567	38.177.495.433	92,38
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	191.347.937.000	180.514.463.982	10.833.473.018	94,34
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3.923.989.000	3.572.592.318	351.396.682	91,04
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.661.814.000	13.148.428.524	2.513.385.476	83,95
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	500.000.000	-	-	-
6	Program Pendidikan Dasar	907.000.000	848.767.900	58.232.100	93,58
7	Program Pendidikan Menengah	1.316.150.238.000	232.003.163.988	1.084.147.074.012	17,63
8	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	500.000.000	-	-	-
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.500.000.000	3.049.141.500	450.858.500	87,12
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.597.352.000	8.383.005.132	2.214.346.868	79,10
11	Program Pendidikan Khusus	11.653.854.000	11.360.199.830	293.654.170	97,48
12	Program Pendidikan Berkelanjutan	4.724.939.000	3.984.380.950	740.558.050	84,33
13	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.887.052.000	2.752.328.492	134.723.508	95,33
14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-	-	-
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan	12.273.297.000	11.256.549.110	1.016.747.890	91,72

	Penyakit				
16	Program Promosi dan Pemberdayaan	79.129.075.000	67.664.319.964	11.464.755.036	85,51
17	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	31.149.020.000	28.668.108.117	2.480.911.883	92,04
18	Program Pengembangan Perhubungan Darat	25.787.720.000	24.613.982.101	1.143.737.899	95,50
19	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	9.588.037.000	9.252.146.770	335.890.230	96,50
20	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.300.000.000	1.238.046.500	61.953.500	95,23
21	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.827.108.000	4.514.334.753	312.773.247	93,52
22	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	265.000.000	245.733.550	19.266.450	92,73
23	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.241.615.000	1.204.654.650	36.960.350	97,02
24	Program Pelayanan Keluarga Berencana	4.474.834.000	4.423.378.150	51.455.850	98,85
25	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	10.912.800.000	10.081.160.290	831.639.710	92,38
26	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya	15.546.360.000	13.450.934.288	2.095.425.712	86,52
27	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	16.817.955.000	15.714.204.809	1.103.750.191	93,44
28	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3.414.198.000	3.359.865.778	54.332.222	98,41
29	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	27.165.739.000	24.354.978.010	2.810.760.990	89,65
30	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2.523.100.000	2.181.639.691	341.460.309	86,47
31	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	182.950.400	17.049.600	91,48
32	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	32.282.067.000	29.765.634.285	2.516.432.715	92,20
33	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.213.900.000	3.786.056.561	427.843.439	89,85

34	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	2.421.000.000	2.275.456.190	145.543.810	93,99
35	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.184.895.000	7.793.946.090	390.948.910	95,22
36	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	560.000.000	438.214.500	121.785.500	78,25
37	Program kerjasama informasi dengan mas media	4.410.819.000	4.075.009.883	335.809.117	92,39
38	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	2.045.020.000	1.937.605.800	107.414.200	94,75
39	Program Pengembangan Agribisnis	191.358.672.000	171.364.328.565	19.994.343.435	89,55
40	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	22.549.576.000	19.333.576.699	3.125.999.301	86.08
41	Program rehabilitasi hutan dan lahan	8.563.480.000	8.255.569.958	307.910.042	96,40
42	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	3.097.450.000	2.990.545.310	106.904.690	96,55
43	Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas	16.244.246.000	15.787.044.350	457.201.650	97,19
44	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	7.269.403.000	6.750.770.100	518.632.900	92,87
45	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah	10.907.762.000	10.524.622.400	383.139.600	96,49
46	Program pengembangan pemasaran pariwisata	6.759.965.000	6.251.163.565	508.801.435	92,47
47	Program pengembangan budidaya perikanan	14.601.608.000	13.827.811.278	773.796.722	94,70
48	Program pengembangan perikanan tangkap	17.110.175.000	16.181.023.280	929.151.720	94,57
49	Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor	7.575.000.000	6.006.945.712	1.568.054.288	79,30
50	Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang	1.168.000.000	1.091.019.950	76.980.050	93,41
51	Program pengembangan wilayah transmigrasi	2.840.810.000	1.557.988.400	1.282.821.600	54,84
52	Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM	2.865.700.000	2.622.047.636	243.652.364	91,50
53	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	2.760.400.0000	2.521.052.147	239.347.853	91,33

	dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri				
54	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil	7.000.000.000	5.297.996.125	1.702.003.875	75,69
55	Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika	3.000.000.000	2.625.961.300	374.038.700	87,53
56	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	6.300.000.000	5.436.444.475	863.555.525	86,29
57	Program Jasa Pelayanan Kesehatan	16.676.000.000	6.256.979.466	10.419.020.534	37,52
58	Program Pelayanan Kesehatan	258.775.973.000	246.527.449.864	12.248.523.136	95,27
59	Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	4.900.000.000	4.484.587.216	415.412.784	91,52
60	Program Kesehatan Lingkungan	3.950.000.000	3.069.700.825	880.299.175	77,71
61	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.220.608.000	3.763.862.217	456.745.783	89,18
62	Program Manajemen, Informasi & Regulasi Kesehatan	3.219.850.000	2.279.498.169	490.351.831	84,77
63	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	1.154.500.000	-	-	-
64	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	222.160.474.000	219.130.445.317	3.030.028.683	98,64
65	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	20.371.639.000	18.511.775.315	1.859863.685	90,87
66	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	557.235.120.000	539.521.546.544	17.713.573.456	96,82
67	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	89.201.110.000	82.383.048.102	6.818.061.898	92,36
68	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	83.870.012.000	73.209.825.046	10.660.186.954	87,29
69	Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	38.582.091.000	37.479.379.730	1.102.711.270	97,14
70	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan	780.000.000	725.158.000	54.842.000	92,97
71	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	5.463.751.000	4.988.081.658	475.669.342	91,29
72	Program Pembangunan dan Pengelolaan	4.753.050.000	3.778.797.458	974.252.542	79.50

	Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi				
73	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.280.000.000	2.155.588.850	124.411.150	94,54
74	Program Perencanaan Tata Ruang	2.277.466.000	2.151.463.600	126.002.400	94,47
75	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	1.019.335.000	998.589.100	20.745.900	97,96
76	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	3.440.000.000	3.034.300.376	405.699.624	88,21
77	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	100.000.0000	1.00.000.000	-	100,00
78	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	300.000.000	292.577.863	7.422.137	97,53
79	Program perencanaan pembangunan daerah	6.780.555.000	6.583.984.408	196.570.592	97,10
80	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.866.000.000	1.865.424.668	575.332	99,97
81	Program perencanaan sosial dan budaya	3.255.500.000	3.201.474.956	54.025.044	98,34
82	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	3.265.100.000	2.993.231.360	271.868.640	91,67
83	Program pengembangan data/informasi	1.200.000.000	1.198.545.586	1.454.414	99,88
84	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	348.000.000	334.017.547	13.982.453	95,98
85	Program Pos, Telekomunikasi dan SAR	526.500.000	414.371.847	112.128.153	78,70
86	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	8.720.641.000	8.666.313.874	54.327.126	99,38
87	Program Pengembangan Perhubungan Laut	2.800.675.000	2.729.163.216	71.511.784	97,45
88	Program Pengembangan Perhubungan Udara	-	-	-	-
89	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1.300.000.000	1.234.792.982	65.207.018	94,98
90	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika	750.000.000	713.968.140	36.031.860	95,20
91	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	350.000.000	338.339.000	11.661.000	96,67
92	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	300.000.000	287.985.000	12.015.000	96,00

	(RTH)				
93	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	2.000.000.000	1.808.045.301	191.954.699	90,40
94	Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa	2.150.000.000	1.971.984.810	178.015.190	91,72
95	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	4.800.000.000	4.682.533.477	117.466.523	97,55
96	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	876.325.000	858.148.400	18.176.600	97,93
97	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	155.650.000	152.245.500	3.404.500	97,81
98	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	150.000.000	150.000.000	0	100
99	Program Promosi Kesehatan Ibu - Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	775.000.000	729.228.700	45.771.300	94,09
100	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	294.693.000,00	282.059.300	12.633.700	95,71
101	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5.508.400.000,00	5.495.871.000	12.529.000	99,77
102	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5.532.551.000	5.415.198.538	717.352.462	97,88
103	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1.700.000.000,00	1.685.981.000	14.019.000	99,18
104	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6.255.420.000	6.095.550.750	156.569.250	97,44
105	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	8.147.800.000	7.051.215.099	1.096.584.901	86,54
106	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	6.564.033.000	6.296.225.650	267.807.350	95,92
107	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	3.025.000.000,00	2.728.727.970	296.272.030	90,21
108	Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM	5.575.000.000	5.520.752.700	54.247.300	99,03
109	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	1.700.000.000,00	1.466.350.590	233.649.410	86,26

110	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya	5.500.000.000,00	5.017.535.928	482.464.072	91,23
111	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	650.000.000,00	639.030.000	10.970.000	98,31
112	Program pengembangan destinasi pariwisata	9.286.380.000	8.782.370.761	504.009.239	94,57
113	Program pengembangan Kemitraan	1.520.673.000	1.423.216.467	97.456.533	93,59
114	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.766.981.000	1.699.856.150	67.124.850	96,20
115	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.488.282.000	3.379.593.990	108.688.010	96,88
116	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	421.846.000	419.857.795	1.988.205	99,53
117	Program Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga	78.338.983.000	70.538.432.149	7.800.550.851	90,04
118	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga	16.970.648.000	16.892.623.000	78.025.000	99,54
119	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan	1.733.500.000	1.663.637.845	69.862.155	95,97
120	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	864.000.000	859.540.000	4.460.000	99,48
121	Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	3.596.587.000	3.390.314.900	206.272.100	98,31
122	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	95.237.480.000	68.227.853.697	27.009.626.303	71,64
123	Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.990.000.000	3.921.111.500	68.888.500	98,27
124	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.575.000.000	1.496.848.300	78.151.700	95,04
125	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	5.269.100.000	4.927.039.550	342.060.450	93,51
126	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	1.467.400.000	1.465.010.000	2.390.000	99,84
127	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.465.490.000	1.437.806.850	27.683.150	98,11
128	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	84.470.371.000	59.558.728.172	24.911.642.828	70,51

129	Program Pengelolaan Aset Daerah	5.239.696.000	3.596.001.614	1.643.694.386	68,63
130	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	14.521.304.000	11.788.912.859	2.732.391.141	81,18
131	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	571.655.000	558.584.142	13.070.858	97,71
132	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	47.157.003.000	39.416.522.216	7.740.480.784	83,59
133	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8.077.453.000	8.008.835.576	68.617.424	99,15
134	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	2.349.691.000	2.239.706.100	109.984.900	95,32
135	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1.420.000.000	1.382.744.600	37.255.400	97,38
136	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	239.625.000	237.152.150	2.472.850	98,97
137	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.373.600.000	1.359.493.720	14.106.280	98,97
138	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1.102.000.000	1.059.283.000	42.717.000	96,12
139	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	120.000.000	119.672.500	327.500	99,73
140	Program peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	457.700.000	456.092.000	1.608.000	99,65
141	Program Pengembangan Budaya Baca	2.525.325.000	2.483.569.290	41.755.710	98,35
142	Program Peningkatan SDM Perpustakaan	200.000.000	194.030.800	5.969.200	97,02
143	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	551.000.000	538.660.000	12.340.000	97,76
144	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	1.748.900.000	1.684.270.577	64.629.423	96,30
145	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	1.604.900.000	1.538.255.416	66.644.584	95,85
146	Program perencanaan dan pengembangan hutan	1.891.569.000	1.787.602.366	103.966.634	94,50

147	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	750.000.000	666.964.000	83.036.000	88,93
148	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	5.759.000.000	5.374.329.350	384.670.650	93,32
149	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	4.400.000.000	4.037.191.182	362.808.818	91,75
150	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.200.000.000	1.844.421.500	355.578.500	83,84
151	Program Pembangunan Perumahan	8.218.552.000	7.626.654.250	591.897.750	92,80
152	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2.790.000.000	2.688.630.360	101369.640	96,37
153	Program Peningkatan Persandian Daerah	285.000.000	260.945.400	24.054.600	91,56
154	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.638.641.000	8.012.065.000	626.576.000	92,75
155	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	5.922.138.000	5.688.817.231	233.320.769	96,06
156	Program Penigkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	2000.000.000	1.808.045301	191.954.699	90,40

Tabel 3.41
Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2017

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno					
2	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan, keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	10	269.736.175.000	243.593.968.130	26.142.206.870	92,38
3	Terjaminnnya ketersedian energi dengan potensi lokal	3	34.421.411.000	33.062.436.850	1.358.974.150	95,51
4	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	2	10.069.100.000	9.609.573.027	459.526.973	95,53
5	Menurunnya angka kemiskinan	7	20.525.764.000	19.859.905.319	665.858.681	94,87
6	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	3	17.350.779.000	16.389.512.591	961.266.409	95,06
7	Meningkatnya jumlah dan kualitas	5				92,76

	daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)		27.776.833.000	26.093.217.200	1.683.615.800	
8	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	5	30.669.100.000	25.601.467.345	5.067.632.655	86,44
9	Meningkatnya realisasi investasi	5	8.200.209.000	7.680.947.626	519.261.374	94,77
10	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	3	2.382.940.000	2.308.527.600	74.412.400	95,89
11	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	2	2.887.052.000	2.752.328.492	134.723.508	95,33
12	Meningkatnya ketersediaan keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan	3	1.328.711.092.000	244.212.131.718	1.084.498.960.282	69,56
13	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat	2	4.460.587.000	4.249.854.900	210.732.100	96,87
14	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	6	18.692.601.288	18.692.601.288	303.769.712	78,85
15	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karir yang jelas	6	791.291.979.000	729.159.314.892	62.132.664.108	89,58
16	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	1	14.521.304.000	11.788.912.859	2.732.391.141	81,18
17	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	3	32.645.060.000	28.188.131.774	4.456.928.226	85,75
18	Terwujudnya Sistem Pengendalian	1	571.655.000	558.584.142	13.070.858	97,71

	Intern Pemerintah					
19	Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	2	6.392.163.000	6.342.657.000	49.506.000	95,48
20	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	2	17.152.011.659	17.152.011.659	1.131.433.341	95,77
21	Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi	3	7.032.400.000	6.882.969.800	149.430.200	97,72
22	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa	3	15.672.564.326	15.672.564.326	1.023.780.674	95,12
23	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	2	1.300.000.000	1.238.046.500	61.953.500	95,23
24	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan	12	366.468.803.000	339.495.967.365	26.972.835.635	87,95
25	Menurunnya Drop out dan Unmet Need serta Meningkatnya peserta KB Aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR	5	5.850.177.000	5.736.911.650	113.265.350	97,2
26	Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan	2	15.322.291.000	12.367.386.082	2.954.904.918	81,72
27	Meningkatnya kualitas pendidikan					
28	Meningkatnya budaya baca masyarakat	7	8.254.645.000	8.028.734.610	225.910.390	97,26
29	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, perumahan layak huni	7	25.777.254.000	23.261.975.426	2.515.278.574	78,40
30	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersedian air baku serta partisipasi masyarakat	2	40.862.091.000	39.634.968.580	1.227.122.420	95,84
31	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	3	799.767.233.000	777.163.767.176	22.603.465.824	95,44

32	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	2	28.558.395.000	27.343.145.317	1.215.249.683	96,50
33	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	7	24.046.886.000	23.144.169.087	902.716.913	96,03
34	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	2	8.495.800.000	7.385.232.646	1.110.567.354	91,26

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017 secara keseluruhan berhasil dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 116,55 %. Secara rinci dapat dijelaskan hasil pengukuran kinerja terhadap 34 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disimpulkan bahwa 24 Sasaran (70,59%) tercapai dengan dikategorikan "**Sangat Baik**", 9 Sasaran Strategis (26,47%) tercapai dengan kategori "**Baik**", dan 1 Sasaran Strategis (2,94 %) tercapai dengan kategori "**Cukup Baik**".

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja instansional yang ditunjukkan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Rumah Sakit Daerah, Setda, Sekretariat DPRD, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 Perubahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama dari 66 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 111,64%. atau dengan Kategori "**Sangat Baik**", dengan rincian sebagai berikut : sebanyak 44 (empat puluh empat) Indikator atau (66,67%) dalam kategori "**Sangat Baik**", sebanyak 17 (Tujuh belas) Indikator (25,75%) dengan kategori "**Baik**" dan sebanyak 3 (tiga) Indikator (4,55%) dengan kategori "**Cukup Baik**" serta 2 (dua) Indikator (3,03%) dengan kategori "**Kurang Baik**".

Untuk mencapai visi, misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 Perubahan dengan Indikator Kinerja yang terukur, pada tahun 2017 didukung program dan kegiatan dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD murni maupun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pencapaian target kinerja dari 34 (tiga puluh empat) sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.955.179.003.000,- dan terealisasi Rp. 22.857.700.615.831,- atau 95,42%, meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.18.081.908.866.000,- dengan realisasi Rp. 17.548.267.443.848,- atau 97,05 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.873.270.137.000,- dengan realisasi Rp. 5.309.433.171.983,- atau 90,40

%. sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.097.478.387.169,- atau 4,58%

Untuk realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sampai dengan triwulan IV tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah Rp. 1.007.803.916.000,00,- dengan target 96,82% realisasi keuangan 86,10% (deviasi: -10,73%) dan target fisik 96,82% realisasi fisik 91,73% (deviasi -5,09 %), sedangkan Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp.457.873.151.000,00 Target keuangan 100 % realisasi keuangan 96.30 % (deviasi keuangan: -3.70%) dan target fisik 100,00 % realisasi fisik 99.12 % (deviasi fisik: -0.88%).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2017 persentase pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Perubahan pada tahun ke empat perencanaan telah tercapai sebesar 97,06 %. Diharapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2018, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan Utama

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, pada Tahun 2017, berikut ini adalah permasalahan yang menjadi hambatan capaian kinerja yang terkait dengan penanganan Issu Strategis Daerah yaitu :

a) Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah yang masih cukup besar sampai dengan periode September 2017 sebanyak 4,493 Juta orang (13,28%), jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 4,507 juta orang atau 13,58 % artinya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 0,30%, namun apabila dibandingkan dengan target RPJMD untuk tahun 2017 sebesar 11,30 s.d 10,83 masih belum dapat dicapai. Belum dicapainya target penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tersebut, salah satunya dapat disebabkan oleh adanya kurang akuratnya data dan kurang terintegrasinya perencanaan program dan kegiatan di perangkat daerah untuk penurunan kemiskinan. Sehingga menyebabkan banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh perangkat daerah menjadi kurang tepat sasaran, sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak optimal.

b) Pengangguran

Angkatan kerja di Jawa Tengah Agustus 2017 sebanyak 18,01 juta orang, Penduduk bekerja sebanyak 17,19 juta orang, tingkat pengangguran sebesar 4,57% atau menurun sebesar 0,06% dibanding angka tahun 2016 sebesar 4,63%. namun Apabila dilihat dari target yang ditentukan dalam RPJMD untuk tahun 2017 sebesar 4,20% belum dapat tercapai. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya faktor terbatasa nya lowongan kerja sektor formal, pada akhirnya pencari kerja lebih banyak bekerja disektor informal, hal tersebut disebabkan oleh :

1) Kompetensi tenaga kerja relatif rendah yang disebabkan oleh karena rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja yaitu sekitar 60% hanya berpendidikan setingkat SMP..
2) Adanya pemberlakuan pengetatan persyaratan dan moratorium penempatan TKI ke beberapa negara. Kondisi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja khususnya pada tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah menjadi terhambat.

c) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Apabila pembangunan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan dengan baik, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan Kesehatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui berbagai cara yaitu : promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Salah satu sasaran prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah kelompok ibu dan anak , karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi focus perhatian pembangunan bidang kesehatan. Adapun keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, yaitu pada Tahun 2013 sebesar (118,62/kh), pada Tahun 2017 menjadi sebesar (94,14/kh). Namun demkian AKI masih menjadi perhatian, selain hal tersebut di bidang kesehatan hal-hal yang masih memerlukan perhatian serius adalah :

1. Masih adanya penderita gizi buruk di Jawa Tengah, pada November 2017 sejumlah 110 pasien gizi buruk, kemudian meningkat menjadi 140 orang pada Desember 2017 dan pada awal tahun 2018 Januari ada penurunan menjadi 113 orang penderita gizi buruk. Penderita Gizi Buruk tertinggi terjadi di Kabupaten Brebes.

2. Tingginginya angka penularan penyakit HIV/AIDS di Jawa tengah yang sudah merambah di kalangan pelajar, sebanyak 20.000 pelajar SMP hingga SMA di Jawa Tengah terjangkit HIV/AIDS. Data tersebut mulai tahun 1993 sampai 2017 penularan HIV/AIDS tertinggi pada kaum heteroseksual mencapai 85,57 persen. Kemudian disusul penularan akibat penggunaan jarum suntik 5,17 persen, perinatal 5,23 persen, homoseksual 4,69 persen, sisanya akibat transfusi darah 0,13 persen.

d). Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah sejak Tahun 2013 mendapatkan prioritas utama, berbagai infrastruktur pendukung pembangunan telah menghasilkan manfaat untuk menggerakan roda pembangunan ekonomi dan sosial. Namun demikian dalam pembangunan infrastruktur tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian kawasan perbatasan Kabupaten/ Kota dan kawasan strategis yang masih kurang tertangani dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan sebagaimana dalam UU Nomor. 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat 5 yang mengatur tentang penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia sehingga 12 kawasan yang belum berbadan hukum tidak direalisasikan.
2. Sulitnya pembebasan lahan untuk pengembangan infrastruktur dan anomali cuaca yang sering tidak mendukung untuk pembangunan infrastruktur;
3. Belum seimbangnya penganggaran untuk pembangunan infrastruktur, atau masih jauhnya kesenjangan antara kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang tersedia;
4. Kendaraan yang membawa muatan melebihi tonase yang ditetapkan tidak terkendali, sehingga berakibat pada rusaknya jalan sebelum umur teknis jalan tercapai;

e). Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan ketercukupan pangan utama, namun juga bagaimana meningkatkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat.

Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan berorientasi eksport dan mampu bersaing dipasar global, baik produk pangan mentah maupun olahan . Meskipun ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah sudah baik meskipun belum beragan, namun perlu diperhatikan factor lain yang yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu distribusi yang dibarengi dengan daya beli mayarakat yang terjaga. Beberapa permasalahan terkait dengan ketahanan pangan di Jawa Tengah diantaranya adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan daging sapi di tingkat lokal selalu mengalami berbagai kendala, seakan tidak bisa dicari solusinya. Kendala tersebut berupa penerapan budidaya sapi yang belum profesional, keterbatasan keterampilan dalam membuat pakan yang berkualitas;
2. Peternak yang belum memiliki motivasi untuk bersaing dengan pasar, serta keterbatasan modal untuk membuat atau membeli pakan berkualitas
3. Produksi susu segar hanya mencapai 1.500 ton per hari atau sekitar 547.000 ton per tahun. Sedangkan kebutuhan atau permintaan susu segar adalah 12 liter per kapita, atau sekitar 3,12 juta ton per tahun
4. Semakin terbatasnya produksi dan kapasitas pangan, hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, menurunnya kualitas dan kesuburan lahan, semakin terbatasnya ketersediaan air untuk produksi pangan, perubahan iklim dan bencana alam;
5. Kerusakan prasarana irigasi dan masih kurangnya alat mesin pertanian untuk mendukung modernisasi pertanian;
6. Masih beredarnya pangan asal hewan yang tidak memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dan unit usaha pangan hewani yang belum memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
7. Terjadinya perubahan iklim, serangan hama penyakit dan bencana alam.

f). Kedaulatan Energi.

Penyediaan Energi menjadi masalah tersendiri dalam pembangunan, hal ini dikarenakan terdapat kesenjangan yang semakin tinggi antara jumlah pasokan dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan usaha keras agar kedaulatan energy bisa diwujudkan. Dalam rangka pemenuhan energy di Jawa Tengah pada Tahun 2017, bahwa sumber energi yang paling banyak digunakan adalah batubara (86,99%), EBT (6,25%), gas bumi (3,92%) dan minyak bumi (1,84%). Sumber Energi Baru terbarukan (EBT) yang sudah banyak dimanfaatkan berupa :

potensi terjunan air, panas bumi, intensitas matahari. Adapun proporsi penggunaan EBT untuk pembangkit likstrik di Jawa Tengah, yaitu : Pembangkit Hidro (PLTA,PLTM,PLTMH) sebesar 88,8%, Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) sebesar 11,04% dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 0,16%.Pencapaian pembangunan energy, terlihat dari pencapian elektrifikasi, sampai dengan Tahun 2017 Rasio Elektrifikasi di Jawa Tengah sudah mencapai 96,3%. Adapun permasalahan utama dalam pembangunan untuk menuju Kedaulatan Energi, diantaranya adalah :

1. Masih terdapat rumah di *Jateng yang belum* berlistrik. Data Dinas ESDM menyebutkan dari 9.220.238 rumah tangga, hingga akhir *2017* yang *belum teraliri listrik* sekitar 342.253 *KK* atau 3,7 persen dari total *jumlah* rumah tangga..
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam penggunaan energi baru terbarukan, karena masyarakat masih sangat bergantung pada pemenuhan energi fosil yang disediakan oleh pemerintah;
3. Biaya produksi dan pengembangan EBT relatif masih tinggi, sehingga kurang menarik baik bagi investor maupun masyarakat;
4. Pemanfaatan produk bahan bakar nabati (biofuel), biomass dan biogas belum optimal;
5. Belum tercukupinya kebutuhan energi bagi industri.

C. Langkah di Masa Mendatang untuk Meningkatkan Kinerja

Terhadap permasalahan tersebut di atas, strategi di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

a) Kemiskinan, strategi yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar melalui Program Bantuan Sosial terpadu berbasis individu, rumah tangga atau keluarga (KKS/Kartu Keluarga Sejahtera → PSKS/ Program Simpanan Keluarga Sejahtera, KIP/Kartu Indonesia Pintar, KIS/ Kartu Indonesia Sehat);
2. Memberdayakan penduduk miskin untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

3. Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat diperbaiki apabila seluruh program menggunakan sumber data yang sama untuk menentukan sasaran (basis data terpadu yang akurat).
4. Perlu upaya peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan dalam rangka mensinergikan program CSR dunia usaha di Jawa Tengah dengan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota

b) Pengangguran, strategi yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pencari kerja dengan cara menambah Balai atau pusat-pusat pelatihan kerja, khususnya di daerah pedesaan;
2. Meningkatkan pengembangan kewirausahaan yang berbasis sumber daya lokal dan mempermudah akses modal dan pemasaran produk;
3. Mendorong penciptaan jejaring seluas-luasnya baik pasar dalam negeri maupun luar negeri;
4. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Memfasilitasi para pencari kerja untuk memperoleh akses informasi pasar kerja dan membangun dan optimalisasi pusat-pusat informasi dan bursa kerja.

c). Kesehatan,

1. Perbaikan asupan nutrisi, melakukan pengobatan, meminimalisir kebiasaan buruk, memaksimalkan keseimbangan ekonomi, serta sosialisasi ASI eksklusif.
2. Menggerakkan masyarakat untuk menjalankan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan cara "3M Plus" yaitu menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk.
3. Menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang dinilai sangat efektif dalam menekan penyebaran penyakit DBD.
4. Tidak melakukan hubungan sex sebelum menikah, setia dengan pasangan, menggunakan kondom dan melakukan edukasi dengan benar.

5. Bagi ibu hamil sesegera mungkin melakukan VCT. Dengan VCT, dapat diketahui secara dini apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV atau tidak.

d). Infrastruktur, strategi yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1. Percepatan revitalisasi kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian kawasan perbatasan Kabupaten/ Kota dan kawasan strategis dengan mengacu pada UU Nomor. 23 Tahun 2014;
2. Meningkatkan proporsi penganggaran untuk percepatan revitalisasi infrastruktur;
3. Peningkatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang dalam rangka pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengurangi potensi ancaman bencana.
4. Membangun sinergi antara binamarga, perhubungan dan perindustrian dalam regulasi yang mengatur tonase kendaraan, aspek keselamatan jalan dan kalaikan jalan;
5. Sinkronisasi sistem informasi jalan baik tingkat pusat, provinsi dan kab/kota, sehingga terbentuk jaringan jalan yang terintegrasi.

e). Kedaulatan Pangan, strategi yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1. Peningkatan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, peningkatan kualitas dan kesuburan lahan dengan pemakaian pupuk organik;
2. Revitalisasi prasarana irigasi dan peningkatan pemenuhan alat mesin pertanian untuk mendukung modernisasi pertanian;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan asal hewan yang tidak memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dan unit usaha pangan hewani yang belum memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
4. Antisipasi pengaturan sistem tanam sesuai dengan perubahan iklim, serangan hama penyakit dan bencana alam.

f). Kedaulatan Energi, strategi yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk turut berperan serta dalam penggunaan energi baru terbarukan, dan mengurangi ketergantungan penggunaan energi fosil;

2. Memberikan insentif bagi masyarakat ataupun investor yang bermaksud melakukan pengembangan EBT;
3. Melakukan kajian untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan pengembangan energi terbarukan, sehingga menarik bagi masyarakat dan pihak investor.

Semarang, Maret 2018

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.SI

Lampiran 1
Pencapaian Indikator Kinerja
Utama Selama 4 Tahun

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Tahun 2017			Kategori
						Target	Real	Capaian	
1	Laju Inflasi	**%**	8,22	8,22	2,36	4,5	2,68	167,91	Sangat Baik
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Rp.Jut	6,7	6,7*)	32,10	26,06	26,7*	102,46	Sangat Baik
3	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,05	68,78	69.49	70,87	69,98	98,74	Baik
4	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	-	-	-	102,86	103,48	100,60	Sangat Baik
5	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	100,24	130,57	103,70	127.69	134,4	127.69	Sangat Baik
6	Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	%	14,78	14,78	15,05	11,91	8,46	71,03	Cukup Baik
7	Kontribusi sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	%	1,54	1,51	1,51	1,48	1,41	96,27	Baik
8	Kontribusi sektor peternakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	%	2,51	2,51	2,40	2,39	2,54*	106,28	Sangat Baik
9	Rasio Elektrifikasi	%	88,37	91,10	93,51	35,00	34.16	97.60	Baik
10	Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	%	1,13	1,12	1,37	17,53	13.33	76,04	Cukup Baik
11	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah	Indeks	90,16	89,32	105,93	70,25	66,71	94,96	Baik
12	Persentase angka kemiskinan	**%**	13,58	13,58	13,58	10,83	13,28	85,09	Baik
13	Tingkat pengangguran Terbuka	%	93,49	101,21	100	4,20	4,57	91,19	Baik
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,68	69,68	67.15	73,22	69,11	94,38	Baik
15	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	Angka	65,72	69.67	64,04	71,83	69,96	97,39	Baik
16	Persentase Koperasi Sehat	%	15,96	16,71	18,80	18,30	19,86	108,52	Sangat Baik

17	Persentase Koperasi Aktif	%	81,20	81,69	81,78	81,90	82,81	101,11	Sangat Baik
18	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	%	36,31	36,2	35,30	35,00	34.16	97.60	Baik
19	Persentase kontribusi ekspor bersih perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	%	13,44	13,7	12,99	17,53	13.33	76,04	Cukup Baik
20	Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN		-	-	-	10	40,49	408,90	Sangat Baik
21	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN		342,87	533,13	405	10	59,21	592,10	Sangat Baik
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	67,97	91,89	92,21	69,40	92,22*	132,88	Sangat Baik
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,22	74,46	74,80	71,49	74,89*	104,75	Sangat Baik
24	Rasio Kab/Kota menuju Kota Layak Anak (KLA)	%	80,0	88,57	94,30	100	100	100	Sangat Baik
25	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMALB/MA/Paket C	Angka	73,05	74,01	76,43	78,00	76,43	97,99	Baik
26	Rasio Desa Inovatif	%	-	-	-	0,56	0,61	107,01	Sangat Baik
27	Rasio Kab/Kota Inovatif	%	-	-	-	77,14	77,14	100	Sangat Baik
28	Rasio Klaster Inovatif	%	-	-	-	68,57	68,57	100	Sangat Baik
29	Persentase penanganan PMKS	%	0,62	0,64	0,6413	0,69	0,72	104,35	Sangat Baik
30	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	1,8	3,34	5,23	1,63	3,58	111,60	Sangat Baik
31	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	73,76*	73,76	100	Sangat Baik
32	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	-	-	-	3,5	3,22*	92,0	Baik
33	Opini BPK (WTP)	Prov	76,92	84,38	90,90	Prov	Prov	100	Sangat Baik
34	Persentase Dividen	%	-	-	-	0,54	9,24	146,90	Sangat Baik
35	Tingkat Maturitas SPIP	Kalimat	-	-	-	Level 3	Level 3	100	Sangat Baik

36	Tingkat Kapabilitas APIP	Kalimat	-	-	-	Level 2	Level 3	150	Sangat Baik
37	Persentase penindakan pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	95	95	Baik
38	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	%	80	80	90	95	100	105,26	Sangat Baik
39	Persentase penggunaan hak pilih dalam: - Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur - Pilkada Kabupaten/ Kota	%	-	-	-	- 72,88	- 79,79	- 109,48	Sangat Baik
40	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	11,16	14,84	10,42	10,42	11,14	107	Sangat Baik
41	Indeks Gini	Indeks	0,387	0,39	0,37	0,341	0,365	93,42	Sangat Baik
42	Indeks Wiliamson	Indeks	0,6954	0,659	0,6656[1]	0,6993	0,6272*	111,49	Sangat Baik
43	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	-	-	-	74,75	74,02*	99,02	Baik
44	Persentase *Drop Out* peserta KB	%	16,06	13,99	13,99	13,75	13,50*	101	Sangat Baik
45	Persentase *Unmet Need*	%	10,29	10,48	9,99	9,25	9,94*	93,06	Baik
46	Persentase *Cobtraceptive Prevalence Rate*	%	78,57	78,24	78,62	79,50	78,61*	98,88	Baik
47	Rata-rata lama sekolah	Th	7,43*)	7,43*)	7.03	7,09	7,15	100,84	Sangat Baik
48	Harapan Lama Sekolah	Tahun	-	-	-	13,05	12,45*	95,40	Baik
49	APM SMA/SMALB/ MA/Paket C	Angka	102,07	100,30	100,34	64	64,02	100,03	Sangat Baik
50	Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/SMK	Angka	99,94	99,97	99,98	99,98	99,99	100,01	Sangat Baik

51	Pengunjung Perpustakaan Provinsi per tahun	orang	104	118	122	889.811	3117285	350	Kurang Baik
52	Cakupan layanan air minum perkotaan	%	72,48	75,76	80,45	78,00	80.98	103.82	Sangat Baik
53	Cakupan layanan air minum perdesaan	%	65,57	68,00	72,80	71,00	72.80	102.54	Sangat Baik
54	Cakupan layanan sanitasi	%	76,94	77,00	77,00	80,00	80	100	Sangat Baik
55	Rasio rumah layak huni		78,67	78,67	78,71	78,74	80,31	101,99	Sangat Baik
56	Persentase jaringan irigasi baik	%	74,00	76,00	79,00	80	80	100	Sangat Baik
57	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	52,33	54,49	56,49	58,50	58,50	100	Sangat Baik
58	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	86,54	88,27	88,88	88,92	88,92	100	Sangat Baik
59	Persentase panjang jalan dengan lebar >6,00 m	%	50,44	66,46	75,55	77,46	77,46	100	Sangat Baik
60	Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton)	%	67,62	74,80	81,21	79,63	79,63	100	Sangat Baik
61	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	79,00	81,98	82,76	83,61	83,61	100	Sangat Baik
62	Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	%	171,82	124,7	169,76	54,00	54	100	Sangat Baik
63	Luas Ruang Terbuka Hujau di wilayah perkotaan	Ha	165,08	192,5	119,6	40	40	100	Sangat Baik
64	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	10,80	17,20	23,02	25	28,59	114	Sangat Baik
65	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,59	0,60	0,63	0,83	0,47	56,63	Kurang Baik
66	Desa tangguh bencana	desa	39	50	14	62	66	106,45	Sangat Baik

Lampiran 2
Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata-rata	Kategori	Rincian Kategori utk Indikator				
					Tidak Baik 1< 50	Kurang Baik 51s.d.< 65	Cukup Baik 65 s.d. <85	Baik 85 s.d <100	Sangat Baik ≥ 100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno	5	93,94	Baik	1	-	-	1	3
2	Terjaminnya kedaulatan pangan	4	102	Sangat Baik		-	1	1	2
3	Terjaminnnya ketersedian energi dengan potensi lokal	2	108,07	Sangat Baik	-	-	-	-	2
4	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	94,96	Baik	-	-	-	1	-
5	Menurunnya angka kemiskinan	1	85,09	Baik	-	-	-	1	-
6	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	3	92,46	Baik	-	-	-	3	-
7	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	2	104,81	Sangat Baik	-	-	-	-	2
8	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	2	100,73	Sangat Baik	-	-	-	-	2
9	Meningkatnya realisasi investasi	2	245,0	Sangat Baik	-	-	-	-	2

10	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	2	118,81	Sangat Baik	-	-	-	-	2
11	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	1	100	Sangat Baik	-	-	-	-	1
12	Meningkatnya ketersediaan keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan	1	100,1	Sangat Baik	-	-	-	-	1
13	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat	3	102,34	Sangat Baik	-	-	-	-	3
14	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	2	161,99	Sangat Baik	-	-	-	-	2
15	Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur yang tersertifikasi dan Berintegritas serta Sistem Pola Karier yang Jelas	1	100	Sangat Baik	-	-	-	-	1
16	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	1	92,0	Baik	-	-	-	1	-
17	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian	2	167,20	Sangat Baik	-	-	-	-	2
18	Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah	2	125	Sangat Baik	-	-	-	-	2
19	Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1	100	Sangat Baik	-	-	-	-	1
20	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	105,26	Sangat Baik	-	-	-	-	1
21	Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam proses demokrasi	1	109,48	Sangat Baik	-	-	-	-	1
22	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa	1	107	Sangat Baik	-	-	-	-	1
23	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	2	102,45	Sangat Baik	-	-	-	-	2
24	Menurunnya angka kematian dan angka	1	99,05	Baik	-	-	-	1	-

	kesakitan								
25	Menurunnya Drop out dan Unmet Need serta Meningkatnya peserta KB Aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR	3	97,65	Baik	-	-	-	1	2
26	Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan	3	98,76	Baik	-	-	-	1	2
27	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	100,01	Sangat Baik	-	-	-	-	1
28	Meningkatnya budaya baca masyarakat	1	350	Cukup Baik	-	-	-	-	1
29	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, perumahan layak huni	4	102,09	Sangat Baik	-	-	-	-	4
30	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersedian air baku serta partisipasi masyarakat	2	100	Sangat Baik	-	-	-	-	2
31	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	4	100	Sangat Baik	-	-	-	-	4
32	Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi Moda serta Keselamatan transportasi	1	100	Sangat Baik	-	-	-	-	1
33	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	3	90,21	Baik	-	1	-	-	2
34	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1	106,45	Sangat Baik	-	-	-	-	1

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H.GANJAR PRANOWO,SH,M.IP

Jabatan : GUBERNUR JAWA TENGAH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, Oktober 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH

H.GANJAR PRANOWO,SH, M.IP

Lampiran : Perjanjian Kinerja Gubernur
Jawa Tengah Perubahan
Tahun 2017

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	**Memberikan haluan pada 6 (enam) misi lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno**		
1.1.1	Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno	1) Persentase capaian sasaran pembangunan	-
		2) Laju Inflasi	4,50 ± 1,00
		3) PDRB Per Kapita	26,06
		4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,87
		5) Nilai Tukar Petani	102,86
1.1.2	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	1) Persentase penguatan cadangan pangan	95
		2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	11,91
		3) Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	1,48
		4) Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	2,39
1.1.3	Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal	1) Rasio Elektrifikasi	91,70
		2) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	2,03
1.1.4	Meningkatnya partisipasi politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah	70,25

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	masyarakat		
2.1	**Menurunkan jumlah penduduk miskin**		
2.1.1	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka kemiskinan	11,30 s.d 10,83
2.2	**Menurunkan jumlah penganggur**		
2.2.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	1) Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20
		2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,22
		3) Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Usia Kerja	71,83
2.4	**Mengembangkan Koperasi dan UMKM**		
2.4.1	Mengembangkan Koperasi dan UMKM	1) Persentase koperasi sehat	18,30
		2) Persentase koperasi aktif	81,90
2.6	**Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri**		
2.6.1	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	1) Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB	35,00
		2) Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	17,53
2.7	**Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi**		
2.7.1	Meningkatnya realisasi investasi	1) Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN	10
		2) Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	10
2.8	**Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan**		
2.8.1	Meningkatnya keadilan gender dan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,40

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	perlindungan anak		
2.8.2	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,49
		2) Rasio kabupaten/ kota menuju Kota Layak Anak	100
2.8.3	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan	APK SMA/SMALB/ MA / Paket C	78,00
2.8.4	Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat	1) Rasio Desa Inovatif	0,56
		2) Rasio Kab/Kota Inovatif	77,14
		3) Rasio Klaster Inovatif	68,57
2.9	**Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS**		
2.9.1	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	1) Persentase penanganan PMKS	0,69
		2) Persentase penguatan kapasitas PSKS	1,63
3.1	**Menciptakan penyelenggaran pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, tersertifikasi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima**		
3.1.1	Meningkatnya profesionalisme dan	Indeks Reformasi Birokrasi	-

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	kompetensi Aparatur yang tersertifikasi dan berintegritas serta sistem pola karier yang jelas		
3.2	**Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel**		
3.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Indeks Persepsi Korupsi	-
3.2.2	Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	1) Opini BPK (WTP)	Prov. dan 16 K/K
		2) Persentase Dividen	0,54
3.2.4	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1) Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
		2) Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2
3.3	**Melaksanakan penegakan hukum**		
3.3.1	Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan	Persentase penindakan pelanggaran perda	100
4.1	**Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama**		
4.1.1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Persentase penanganan konflik sosial	95

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
4.3	**Meningkatkan partisipasi politik masyarakat**		
4.3.2	Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi	Persentase penggunaan hak pilih dalam: - Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur - Pilkada Kabupaten/ Kota	- 72,88
4.4	**Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan**		
4.4.2	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,42
5.2	**Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat**		
5.2.1	Berkurangnya Kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Gini	0,341
5.2.2	Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Williamson	0,6993
6.1	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**		
6.1.1	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,75
6.1.2	Menurunnya *Drop Out* (DO) KB dan *Unmet Need* serta Meningkatnya peserta KB aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	1) Persentase *Drop Out* Keluarga Berencana	13,75
		2) Persentase *Unmet Need*	9,25
		3) Persentase *Contraceptive*	79,50

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Prevalence Rate (CPR)	
6.2	**Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan**		
6.2.1	Meningkatnya kesempatan Masyarakat memperoleh pendidikan	1) Angka rata-rata lama sekolah	7,09
		2) Harapan Lama Sekolah	13,05
		3) APM SMA/SMALB/ MA/Paket C	64
6.2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Kelulusan SMA/SMALB/ MA/SMK	99,98
6.3	**Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat**		
6.3.1	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	889.811
6.4	**Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman**		
6.4.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni	1) Cakupan layanan air minum perkotaan	78,00
		2) Cakupan layanan air minum perdesaan	71,00
		3) Cakupan layanan sanitasi	80,00
		4) Rasio rumah layak huni	78,74
6.5	**Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas**		
6.5.1	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	1) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80
		2) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	58,50

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7.1	**Meningkatkan dayadukung infrastruktur dan pelayanan transportasi**		
7.1.1	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88,92
		2) Persentase panjang jalan yang lebar ≥ 6 m	77,46
		3) Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)	79,63
7.1.2	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	54,00
7.3	**Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan**		
7.3.1	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	1) Luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan (ha)	40
		2) Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	25
		3) Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,83
7.4	**Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana**		
7.4.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Desa Tangguh Bencana	62

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.552.394.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	169.035.597.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3.971.310.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.065.223.000,00
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	500.000.000,00
6	Program Pendidikan Dasar	907.000.000,00
7	Program Pendidikan Menengah	1.064.463.965.000,00
8	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	500.000.000,00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.500.000.000,00
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	11.489.393.000,00
11	Program Pendidikan Khusus	12.049.061.000,00
12	Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi	-
13	Program Pendidikan Berkelanjutan	5.000.000.000,00
14	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.880.336.000,00
15	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	12.273.297.000,00
17	Program Promosi dan Pemberdayaan	97.323.995.000,00
18	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	29.715.500.000,00
19	Program Pengembangan Perhubungan Darat	25.787.259.000,00
20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9.588.037.000,00
21	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.300.000.000,00
22	Program Penataan Administrasi Kependudukan	761.046.000,00
23	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas	265.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
	Anak dan Perempuan	
24	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.245.270.000,00
25	Program Pelayanan Keluarga Berencana	4.571.744.000,00
26	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	10.912.800.000,00
27	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya	17.346.460.000,00
28	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.236.123.000,00
29	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2.950.880.000,00
30	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	25.756.239.000,00
31	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2.523.100.000,00
32	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	6.414.163.000,00
33	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	31.293.787.000,00
34	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.213.900.000,00
35	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	2.421.000.000,00
36	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.335.000.000,00
37	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	560.000.000,00
38	Program kerjasama informasi dengan mas media	4.740.500.000,00
39	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	2.137.200.000,00
40	Program Pengembangan Agribisnis	199.125.670.000,00
41	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	17.102.866.000,00
42	Program rehabilitasi hutan dan lahan	8.623.480.000,00
43	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	3.097.450.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
44	Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas	19.603.500.000,00
45	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6.817.000.000,00
46	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah	9.980.276.000,00
47	Program pengembangan pemasaran pariwisata	6.708.750.000,00
48	Program pengembangan budidaya perikanan	5.650.000.000,00
49	Program pengembangan perikanan tangkap	9.350.000.000,00
50	Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor	7.575.000.000,00
51	Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang	1.168.000.000,00
52	Program pengembangan wilayah transmigrasi	2.840.810.000,00
53	Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM	2.865.700.000,00
54	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri	2.950.000.000,00
55	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil	7.000.000.000,00
56	Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika	3.000.000.000,00
57	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	6.300.000.000,00
58	Program Jasa Pelayanan Kesehatan	10.125.000.000,00
59	Program Pelayanan Kesehatan	147.788.802.000,00
60	Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	4.900.000.000,00
61	Program Kesehatan Lingkungan	3.950.000.000,00
62	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.220.608.000,00
63	Program Manajemen, Informasi & Regulasi	3.219.850.000,00
64	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	1.154.500.000,00
65	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	261.960.887.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
66	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	21.759.591.000,00
67	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	576.176.125.000,00
68	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	80.974.457.000,00
69	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	96.197.277.000,00
70	Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	43.200.000.000,00
71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan	1.830.000.000,00
72	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	18.130.200.000,00
73	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi	5.152.613.000,00
74	Program Pengembangan Perumahan	-
75	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.280.000.000,00
76	Program Perencanaan Tata Ruang	2.335.000.000,00
77	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	1.075.000.000,00
78	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.300.000.000,00
79	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	3.450.000.000,00
80	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	6.414.163.000,00
81	Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi	-
82	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	100.000.000,00
83	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	300.000.000,00
84	Program perencanaan pembangunan daerah	6.817.980.000,00
85	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.866.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
86	Program perencanaan sosial dan budaya	3.255.500.000,00
87	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	3.338.900.000,00
88	Program pengembangan data/informasi	1.300.000.000,00
89	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	348.000.000,00
90	Program Pos, Telekomunikasi dan SAR	526.500.000,00
91	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	8.727.755.000,00
92	Program Pengembangan Perhubungan Laut	2.757.000.000,00
93	Program Pengembangan Perhubungan Udara	-
94	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1.300.000.000,00
95	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	750.000.000,00
96	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	350.000.000,00
97	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	300.000.000,00
98	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	2.000.000.000,00
99	Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa	2.150.000.000,00
100	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	4.800.000.000,00
101	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	2.421.000.000,00
102	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	889.325.000,00
103	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	155.650.000,00
104	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	150.000.000,00
105	Program Promosi Kesehatan Ibu - Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	775.000.000,00
106	Program pengembangan model operasional BKB-	294.693.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
	Posyandu-PADU	
107	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5.508.400.000,00
108	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.132.551.000,00
109	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1.700.000.000,00
110	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6.252.120.000,00
111	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	7.995.500.000,00
112	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	30.560.033.000,00
113	Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	3.025.000.000,00
114	Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM	3.075.000.000,00
115	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	10.912.800.000,00
116	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	1.700.000.000,00
117	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya	5.500.000.000,00
118	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	650.000.000,00
119	Program pengembangan destinasi pariwisata	5.515.000.000,00
120	Program pengembangan Kemitraan	1.520.673.000,00
121	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.766.981.000,00
122	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.514.732.000,00
123	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	421.846.000,00
124	Program Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan	78.327.563.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
	Olah Raga	
125	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga	16.970.648.000,00
126	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan	1.733.500.000,00
127	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	864.000.000,00
128	Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	3.446.587.000,00
129	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	270.119.645.000,00
130	Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.990.000.000,00
131	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.575.000.000,00
132	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	5.269.100.000,00
133	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	1.475.000.000,00
134	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.470.670.000,00
135	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	77.665.620.000,00
136	Program Pengelolaan Aset Daerah	5.239.696.000,00
137	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	14.971.384.000,00
138	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	571.655.000,00
139	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	52.469.208.000,00
140	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8.283.999.000,00
141	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	2.250.000.000,00
142	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1.440.000.000,00
143	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	239.625.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
144	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.468.500.000,00
145	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1.102.000.000,00
146	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	140.000.000,00
147	Program peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	465.000.000,00
148	Program Pengembangan Budaya Baca	2.940.325.000,00
149	Program Peningkatan SDM Perpustakaan	200.000.000,00
150	Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	551.000.000,00
151	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	1.748.900.000,00
152	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	1.604.900.000,00
153	Program perencanaan dan pengembangan hutan	1.891.569.000,00
154	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	750.000.000,00
155	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	1.400.000.000,00
156	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	3.800.000.000,00
157	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.200.000.000,00

Semarang, Oktober 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH

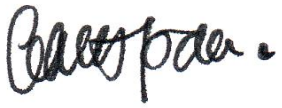

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP